

Thriwaty Aarsal

SOSIOLOGI PERKOTAAN

Sektor Informal,
Karakteristik dan
Tata Ruang Kota



Sosiologi Perkotaan

Sektor Informal, Karakteristik
dan Tata Ruang Kota

Thriwaty Aرسال

Judul :

Sosiologi Perkotaan

Sektor Informal, Karakteristik dan Tata Ruang Kota

Penulis:

Thriwati Aرسال

ISBN. 978-623-6686-27-0

Penerbit:

LPPM Universitas Negeri Semarang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak Buku Referensi ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, mikrofilm, elektronik maupun bentuk lainnya.

KATA PENGANTAR

Peradaban umat manusia hingga pada zaman pembangunan dan industri dewasa ini, pada umumnya didominasi oleh kota-kota. Sehubungan dengan pengaruh kota-kota atas peradaban umat manusia ini, para ahli sosiologi mengakui adanya kenyataan bahwa di dalam suatu negara masyarakat kotalah yang merupakan fokus, baik ditinjau dari segi ruang (*spatial*) maupun ditinjau dari segi sosial bangsa itu secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengertian tentang kekotaan adalah merupakan dasar pemberitaan tentang peradaban sesuatu bangsa. Salah satu tujuan dari pada sosiologi perkotaan ialah untuk memberikan pengertian dasar kepada para mahasiswa tentang adanya pengaruh dan peran kota-kota dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa.

Pada garis besarnya studi sosiologi perkotaan itu dapat dibagi dalam 2 bagian, dimana pada bagian *pertama* akan dibahas tentang pola ekologi dan sosial sebagai lukisan dari pada corak kehidupan masyarakat kota yang modern. Disini para mahasiswa akan diperkenalkan suatu konsep dari suatu kota, bukan sebagai satu fenomena yang statis, tetapi sebagai satu rangkaian *interrelationship* yang dinamis.

Pada bagian *kedua*, akan dipelajari berbagai-bagai

lembaga atau institusi dengan berbagai masalahnya, yang terdapat di dalam suatu masyarakat kota dewasa ini. Tidak dapat disangkal di dalam kota-kota modern, yang telah maju maupun yang sedang berkembang, lembaga-lembaga sosial senantiasa berkembang, demikian juga masalah-masalah sosial silih berganti, yang lama ada yang hilang, lalu yang baru muncul. Oleh karena itu, maka timbullah pula berbagai macam metode baru yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, yang senantiasa dicoba oleh para ahli dengan penuh ketekunan dan ketabahan. Beberapa gambaran tentang metode-metode yang aktual bagi perencanaan dan pengawasan kota tidaklah luput daripada studi ini.

Oleh karena itu setiap mahasiswa yang mempelajari kota-kota dan masyarakatnya dewasa ini, mau tidak mau menjadi ahli sosiologi profesional, yang suatu ketika akan menerima tanggung jawab masyarakat kota yang serba kompleks, dimana mereka menjadi warganya. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari antara lain mata pencaharian hidup, pola hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ragam permasalahan perkotaan dan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PERKOTAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Tata Ruang Kota Dari Berbagai Aspek	5
BAB II PRA-KARAKTERISASI KOTA-KOTA.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Pengertian Kota	18
C. Karakteristik Umum Kota Natural.....	22
D. Tahap Perkembangan Kota	25
E. Ciri-ciri Warga Kota Lainnya	32
BAB III LOKASI DAN UKURAN KOTA.....	39
A. Pendahuluan	39
B. Prinsip-prinsip Tentang Lokasi Kota	40
C. Pengaruh Rute Transportasi.....	45
D. Pengaruh –Pengaruh yang Bertentangan Dengan Lokasi.....	50
BAB IV POLA RUANG INTERN KOTA-KOTA.....	60

A.Pendahuluan	60
B.Lokasi Jasa-Jasa Komersial Dalam Kota	61
C.Beberapa Prinsip Penempatan Lokasi	67
D.Lokasi Khusus Untuk Industri	70
BAB V KAWASAN TEMPAT KEDIAMAN	74
A. Pendahuluan	74
B. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Distribusi Ruang.....	75
C. Daerah Tempat Kediaman dan Kependudukan (Populasi).....	78
D. Daerah Kependudukan (<i>Areas of Population</i>)	83
E. Perubahan-Perubahan Pada Daerah Kependudukan.....	87
F.Saling Bergantung Secara Fundamental.....	91
G.Transportasi Sebagai Matarantai Perhubungan.....	92
BAB VI PENDUDUK DAERAH PERKOTAAN	94
A. Pendahuluan	94
B. Perbandingan Penduduk Perkotaan dan Pedesaan .	95
C.Kota dan Pertambahan Penduduk	100
BAB VII HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL DI PERKOTAAN	104
A. Pendahuluan	104
B. Perbedaan Hubungan Sosial Perkotaan dan	

Pedesaan	105
C.Pengaruh Hubungan di Perkotaan	110
D.Kebudayaan yang Didominasi Kota	117
BAB VIII PENGANGGURAN DAN SEKTOR INFORMAL	
DI PERKOTAAN.....	123
A.Pendahuluan	123
B. Pengangguran dan Angkatan Kerja	125
C.Sektor Informal dan Peluang Kerja di Perkotaan	141
D.Penataan dan Pembinaan Sektor Informal	147
DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB I

RUANG LINGKUP

SOSIOLOGI PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Ruang lingkup sosiologi perkotaan adalah mengenai kehidupan serta aktivitas masyarakat kota. Masyarakat perkotaan sebagaimana kita ketahui selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewahan, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang. Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak terdapat perkampungan-perkampungan kumuh (*slum area*) yang tidak layak huni.

Kehidupan Masyarakat perkotaan Secara sosiologis penekanan perkotaan adalah kesatuan masyarakat pada bidang industri, bisnis, dan wirausaha lainnya dalam struktur yang lebih kompleks. Secara fisik kota dinampakkan dengan adanya gedung-gedung yang menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan , pabrik, kemacetan, kesibukan warga masyarakatnya, persaingan yang tinggi, polusinya, dan sebagainya. Masyarakat di perkotaan secara sosial kehidupannya cenderung heterogen, individual, persaingan yang tinggi yang sering kali menimbulkan pertentangan atau konflik. Munculnya sebuah asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah tertipu, cekatan dalam berpikir, dan bertindak, dan mudah menerima perubahan , itu tidak selamanya benar, karena secara implisit dibalik semua itu masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah standar kehidupan sosial dan tidak selamanya pula masyarakat kota dikatakan sebagai masyarakat yang modern. Karena yang di maksud sebagai masyarakat yang modern dalam bahasan ini adalah kelompok masyarakat yang berada di daerah keramaian dan lebih mudah mengalami perubahan atau pengaruh dari kehidupan masyarakat perkotaan. Sedangkan dewasa ini masih ada masyarakatnya yang tertinggal, termasuk masalah informasi dan teknologi.

Kehidupan masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan umum dan orientasi terhadap alam, Masyarakat kota cenderung mengabaikan kepercayaan yang berkaitan dengan kekuatan alam serta pola hidupnya lebih mendasarkan pada rasionalnya. Dan bila dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat kota tidak bergantung pada kekuatan alam, melainkan bergantung pada tingkat

kemampuannya (*capability*) untuk bersaing dalam dunia usaha. Gejala alam itu bisa dipahami secara ilmiah dan secara rasional dapat dikendalikan.

2. Pekerjaan atau mata pencaharian, Pada umumnya masyarakat kota bergantung pada pola industri (kapitalis) Bentuk mata pencaharian yang primer seperti sebagai pengusaha, pedagang, dan buruh industri. Namun ada sekelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal misalnya pemulung, pengemis dan pengamen. Selain yang disebutkan di atas termasuk bentuk mata pencaharian sekunder.
3. Ukuran komunitas, Umumnya masyarakat perkotaan lebih heterogen dibandingkan masyarakat pedesaan. Karena mayoritas masyarakatnya berasal dari sosiokultural yang berbeda-beda, dan masing-masing dari mereka mempunyai tujuan yang bermacam-macam pula. diantaranya ada yang mencari pekerjaan atau ada yang menempuh pendidikan. Jumlah penduduknya masih relatif besar.
4. Kepadatan penduduk, Tingkat kepadatan di kota lebih tinggi bila dibandingkan di desa, hal ini disebabkan oleh kebanyakan penduduk di daerah perkotaan awalnya dari berbagai daerah.
5. Homogenitas dan heterogenitas, Dalam struktur masyarakat perkotaan yang sering sekali nampak adalah heterogenitas dalam ciri-ciri sosial, psikologis, agama, dan kepercayaan, adat istiadat dan perilakunya. Dengan demikian struktur masyarakat perkotaan sering mengalami interseksi sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial.
6. Diferensiasi sosial, Di daerah perkotaan , diferensiasi sosial relatif tinggi, sebab tingkat perbedaan agama, adat

istiadat, bahasa, dan sosiokultural yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai daerah, cukup tinggi.

7. Pelapisan sosial, Lapisan sosialnya lebih didominasi oleh perbedaan status dan peranan di dalam struktur masyarakatnya. Di dalam struktur masyarakat modern lebih menghargai prestasi daripada keturunan.
8. Mobilitas sosial, Mobilitas pada masyarakat perkotaan lebih dinamis daripada masyarakat pedesaan. Kenyataan itu adalah sebuah kewajaran sebab perputaran uang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di pedesaan.
9. Interaksi sosial, Dalam interaksi pada masyarakat perkotaan lebih kita kenal dengan yang namanya *gesellschaft* yaitu kelompok patembayan di mana ada hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian-perjanjian tertentu yang orientasinya adalah keuntungan atau pamrih. Sehingga hubungan yang terjadi hanya seperlunya saja.
10. Pengawasan sosial, Disebabkan masyarakatnya yang kurang saling mengenal satu sama lain dan juga luasnya wilayah kultural perkotaan di tambah lagi keheterogenitasan masyarakatnya yang membuat sistem pengawasan sosial perilaku antar anggota masyarakatnya makin sulit terkontrol.
11. Pola kepemimpinan, Kepemimpinannya didasarkan pada pertanggung jawaban secara rasional atas dasar moral dan hukum. Dengan demikian hubungan antar pemimpin dan warga masyarakatnya berorientasi pada hubungan formalitas.
12. Standar kehidupan, Standar kehidupannya di ukur dari barang-barang yang dianggap punya nilai (harta benda). Mereka lebih mengenal deposito atau tabungan. Karena

menurut mereka menyimpan uang dalam bentuk deposito dianggap lebih praktis dan mudah. Ditambah lagi kepemilikan barang-barang mewah lainnya.

13. Kesetiakawanan sosial, Ikatan solidaritas sosial dan kesetiakawanan lebih renggang. Artinya, pola hubungan untung rugi lebih dominan daripada kepentingan solidaritas dan kesetiakawanan.
14. Nilai dan sistem nilai, Nilai dan sistem nilai di dalam struktur masyarakat perkotaan lebih bersifat formal, didasarkan pada aturan-aturan yang resmi seperti hukum dan perundang-undangan.

B. Tata Ruang Kota Dari Berbagai Aspek

Dalam konteks ruang, kota merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi, yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang dominan oleh struktur binaan.

Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk satu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Dalam konteks ruang kota merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, karena secara internal

kota merupakan satu kesatuan sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan yang dibangun yang terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi, yang meluas dari pusat hingga ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang dominan oleh struktur binaan.

Kota ditinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk satu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Di Indonesia kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan strata administrasinya yakni :

1. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota
2. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten
3. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan
4. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan.

C. Pentingnya Mempelajari Masalah Perkotaan

Penduduk Indonesia telah berkembang begitu pesat akhir-akhir ini, sehingga menempatkan Negara kita dalam urutan kelima dalam jumlah penduduk, setelah R.R. Cina, India, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ironisnya, laju perkembangan penduduk di Indonesia dibarengi pula oleh suatu arus

perpindahan penduduk yang semakin meningkat dari desa ke kota, yang dalam demografi dikenal dengan istilah proses urbanisasi.



Gambar 1. Urbanisasi di Perkotaan

edaobagann.blogspot.com/2017/1/urbanisasi-dan-pengaruhnya.

Urbanisasi – suatu keadaan tidak mampunya kota-kota menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai untuk penduduk yang bertambah dengan pesat – bukanlah suatu konsep yang menyenangkan para ahli ekonomi dan ahli perencanaan. Salah satu alasannya adalah bahwa urbanisasi berlebih terjadi diluar perkiraan. Para ahli ekonomi di dunia Barat dan pejabat pemerintahan di negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya sesudah Perang Dunia II dengan tergesa-gesa telah mencari dasar teoretis dan kebijakan-kebijakan praktis untuk meningkatkan pembangunan. Sayangnya, masyarakat berasumsi bahwa hanya ada satu model pembangunan – industrialisasi. Uni Soviet dan negara-negara Barat, meskipun berbeda dalam pendekatannya tetapi sependapat mengenai pentingnya industrialisasi. Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka pada waktu itu dan sekarang dirasakan amat berat sehingga terlalu lamban bila dipecahkan dengan meniru pembangunan

secara evolusioner dari kapitalisme modern. Industrialisasi terencana dan dipaksakan di Uni Soviet, tanpa kebijakannya yang paling keras, dianggap suatu cara yang lebih realistis.

Salah satu bagian dari proses industrialisasi yang tak dapat dihindarkan adalah urbanisasi. Perpindahan penduduk dan sumber daya lain dari desa ke kota diharapkan dapat memberikan tenaga kerja yang murah dan tabungan yang dipaksakan (*forced savings*) untuk mendorong industrialisasi di kota. Kemudian sampai pada titik tertentu diharapkan bahwa (seperti dengan tingkat pertumbuhan penduduk) tingkat urbanisasi akan menurun secara berangsur-angsur, disertai berkurangnya kepadatan penduduk di desa dan produktivitas yang lebih tinggi di sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan agar penduduk desa pada umumnya tidak kalah makmurnya dengan para pekerja di kota industri. Migrasi akan sangat berkurang karena rangsangan ekonomi untuk berpindah tidak ada lagi.

Meskipun ada beberapa pengecualian, industrialisasi tidak mampu mendorong seluruh masyarakat ke suatu tingkat yang lebih modern dan adil. Tampaknya, keseimbangan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan masih jauh, dan menurut pandangan beberapa ahli ekonomi dan para pemimpin pemerintahan, keseimbangan itu tidak mungkin tercapai melalui kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan industri modern saja. Sejak awal tahun 1970-an mereka mulai sadar bahwa kenyataan-kenyataan yang ada tidak sesuai dengan teori. Dalam beberapa tahun kemudian, muncullah suatu konsensus baru tentang strategi pembangunan yang paling dibutuhkan yaitu suatu strategi yang mengutamakan peranan sektor pertanian dan peningkatan pendapatan orang-orang termiskin di masyarakat. Namun, sampai sekarang dukungan

terhadap strategi ini tidak begitu kuat sehingga belum nampak banyak perubahan penting terhadap kebijakan-kebijakan urbanisasi dan industrialisasi dibandingkan dengan dasawarsa-dasarwarsa sebelumnya.

Hal lain yang merisaukan para ahli ekonomi dan para perencana kota adalah bahwa urbanisasi berlebih tidak dapat diberi batasan secara tepat. Tidak ada rumus matematik yang menentukan suatu batas tertentu sampai dimana kota-kota tidak boleh dikembangkan lagi. Selain itu, ukuran kota yang optimal ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan geografi yang berbeda-beda antara suatu negara dengan negara lain. Rupanya, tidak ada batas tertentu mengenai ukuran atau besarnya suatu kota sepanjang ia dapat berkembang ke luar dan ke atas (horisontal dan vertikal) dan pertumbuhan sektor industri dan jasa mampu menyerap sejumlah besar para pekerja baru. Dalam praktek, kebanyakan negara sedang berkembang mengalami kekurangan dana (selain masalah kemampuan berorganisasi dan perencanaan) untuk meneruskan kebijakan-kebijakan pertumbuhan yang tak terbatas itu. Para pemimpin di negara-negara tersebut sangat memperhatikan distribusi penduduk secara geografis dan mulai mengutamakan kebijakan-kebijakan memperlambat tingkat urbanisasi.

Karena semakin besar perhatian pemerintah terhadap pesatnya urbanisasi, seharusnya masyarakat dan badan-badan yang terlibat dalam usaha pembangunan lebih banyak memperhatikan masalah yang penting ini. Dibutuhkan penelitian lebih banyak lagi, tetapi pada saat ini sudah jelas bahwa ada tiga gejala yang menunjukkan bahwa kota-kota telah tumbuh terlalu pesat untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang. Ketiga gejala tersebut adalah:

1. Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar dan semakin meningkat.
2. Proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin semakin berkurang.
3. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai.

Pembahasan mengenai “daya tarik” kota, menitikberatkan pada cahaya lampu-lampu yang gemerlapan atau harapan kehidupan yang baik sebagai faktor-faktor yang berhasil memikat para petani berbondong-bondong datang ke kota. Namun, akan lebih tepat apabila dikatakan bahwa kemiskinan di desa dan harapan untuk memperoleh pendapatan lebih di kota besar secara bersama-sama menyebabkan terjadinya migrasi desa-kota. Perbedaan dalam perumusan ini tidak hanya terletak pada semantik (arti kata) saja. Ia memaksa para peneliti dan pembuat kebijakan memusatkan perhatian, baik pada kemiskinan di desa maupun pada pertumbuhan kota. Hanya dengan cara inilah dapat dirancang kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Selanjutnya, kemungkinan besar dipakainya suatu pendekatan yang tidak langsung tertuju pada persoalan perkotaan, penanaman modal yang besar di sektor pedesaan, dapat membawa pengaruh lebih besar terhadap pemecahan masalah pembangunan di kota daripada menerapkan kebijakan langsung di kota.



Gambar 2. Salah satu Daya Tarik Kota

<https://pixabay.com/id/photos/montreal-kaki-langit-kota-kanada-910653/>

Proses urbanisasi yang melanda Negara kita setelah perang kemerdekaan merupakan salah sebab timbulnya beberapa kota kecil, dan kota-kota kecil yang telah menjadi kota-kota yang lebih besar, terutama di Jawa dan Bali, hal mana memerlukan adanya perluasan aktivitas atau kegiatan alat-aat Negara untuk penyelidikan berbagai macam kejahatan, pengawasan dan pengamatan tata kerama lalu lintas, pembinaan hukum dan ketertiban, yang harus dipersiapkan sedini mungkin.

Sebagaimana kita ketahui penduduk Indonesia sebagian besar industri dari petani, yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, bahkan menurut catatan, diantara Negara-negara Asia Tenggara, Indonesialah yang mempunyai prosentase penduduk kota yang paling kurang. Sesuai dengan hasil sensus penduduk yang pernah dilakukan di Indonesia, maka pada tahun 1961 naik sekitar 15 % dan tahun 1971 meningkat lagi menjadi 19 % (18,8%).

Kalau kita hanya memperhatikan kenaikan presentasenya saja, maka hal itu nampaknya tidaklah besar pengaruhnya, baik bagi daerah pedesaan maupun bagi daerah perkotaan. Tetapi kalau kita mau mencoba melihat angkanya sesuai dengan selisih sensus 1971 dan sensus 1961, barulah kita akan me-

nyadari betapa pentingnya masalah pertambahan kota itu dan perlu mendapat perhatian yang serius se dini mungkin, sebelum timbul masalah-masalah sosial dan patologi sosial di kota-kota karenanya.



Gambar 3. Masalah Sosial

<https://www.google.com/search?q=gambar+masalah+sosial+di+masyarakat&safe>

Menurut catatan sensus 1971 penduduk daerah perkotaan adalah 22.560.000 jiwa, lalu pada sensus 1961 hanyalah 14.358.000 jiwa. Ini berarti bahwa pertambahan penduduk daerah perkotaan selama 10 tahun itu adalah sekitar 8.200.000 jiwa, jumlah mana adalah sama dengan $\frac{2}{3}$ penduduk seluruh benua Australia pada tahun 1971. Namun demikian, ini bukanlah berarti bahwa kenaikan baik jumlah maupun presentase penduduk kota-kota di Indonesia sepenuhnya merupakan ukuran yang begitu penting bagi pertumbuhan kota-kota dewasa ini.

Beberapa Pendapat Tentang Pengaruh Kota



Gambar 4. Kepadatan Penduduk Perkotaan

https://qadrifa.files.wordpress.com/2015/10/213346_pemukiman-padat-penduduk-di-sekitar-bkb_663_382.jpg

Terkumpulnya penduduk yang semakin padat di daerah perkotaan akhir-akhir ini semakin menarik perhatian masyarakat modern, terutama dinegara-negara Barat yang telah jauh berkembang, dimana pada umumnya penduduk kota yang dewasa mengawasi sebagian besar Lembaga sosial yang mendominasi kehidupan ekonomi Negara-negara tersebut.

Begitu juga keadaanya dengan sebagian besar pejabat tinggi di bidang pemerintahan, pejabat-pejabat yang menentukan kebijaksanaan dalam bidang politik, pendidikan, agama, sosial rekreasi, keamanan dan kesejahteraan, kesemuanya beroperasi dari kantor-kantor yang berlokasi di kota. Oleh sebab itu tidaklah berlebih-lebihan jika dikatakan, bahwa kecuali ikatan kekeluargaan, persahabatan dan kerukunan hidup bertetangga, maka sebagian besar dari aspek-aspek kehidupan sosial modern dewasa ini adalah bepusat di kota-kota. Oleh kerena itu adalah beralasan jika dikatakn, bahwa masyarakat kotalah yang mendominasi hamper seluruh aspek kehidupan masyarakat sesuatu bangsa, tidak terkecuali kontrask-kontrak sosial yang akrab (intim) dan personal bagi masyarakat bangsa-bangsa yang sudah maju, umumnya juga telah mendapat tempat di kota-kota.

Oleh karena itu maka para ahli sosiologi adalah berpendapat bahwa kota-kota itu senantiasanya melancarkan pengaruhnya yang sangat hebat kepada seluruh penduduk Negara, meskipun mereka itu kadang-kadang berbeda tinjauannya secara tajam sehubungan dengan efek atau pengaruh yang ditimbulkan.

1. Ada satu pandangan yang nampaknya ekstrem sekali menempatkan kota-kota itu sebagai pemegang penting dalam pembangunan dan pengembangan peradapan baik dima-

sa lampau maupun dimasa kini dan dimasa depan. Sebagai bukti dikemukakannya bahwa peradaban besar yang kuno dari Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, dan sebagainya semuanya berpusat dikota-kota. Selain itu kota-kota secara khusus telah memegang pimpinan dalam penciptaan berbagai kesenian, dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dalam penemuan cara-cara dan metode mengajar. Menurut mereka tanpa kota-kota besar, maka peradaban industri komersial dalam dunia modern yang serba kompleks dewasa ini tidak mungkin dapat dikembangkan.

2. Sebaliknya adalah satu pandangan yang sangat kontras dengan pandangan tersebut tadi, yang menggambarkan kota-kota sebagai pusat-pusat pengembangan berbagai macam kejahatan, seperti korupsi, penyelundupan, pembunuhan, prostitusi dan lain-lain kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan umat manusia. Golongan ini berpendapat, bahwa cara hidup kekotaan semata-mata mendorong manusia kepada sikap yang mementingkan diri sendiri dalam mencari kesenangan, mengeksploitasi teman sendiri, tidak memperdulikan penderitaan orang lain, sikap mana besar kemungkinan akan mengarah kepada keruntuhan standard moral yang mendasar, yang kelak pada akhirnya akan menghancurkan peradaban yang telah dikembangkan dan didominasi oleh kota-kota sendiri.
3. Diantara kedua pendapat yang kontradiktif tersebut timbul pendapat ketiga yang berdiri di tengah-tengah, dengan menggambarkan kota-kota itu sebagai suatu sarana hidup bersama, yang cukup memberikan harapan yang sebagai suatu sarana hidup manusia, yang cukup memberikah ha-

rapan yang masih perlu dikembangkan, sebagai satu pengalaman sosial dalam masa percobaan yang hasilnya belum dapat diramalkan untuk jangka waktu panjang

BAB II

PRA-KARAKTERISASI KOTA-KOTA

A. Pendahuluan

Apakah itu kota? Jawaban dari pertanyaan ini nampaknya begitu jelas sehingga mengherankan ketika muncul pertanyaan tentang mengapa pertanyaan semacam itu harus dikemukakan. Namun demikian untuk jelasnya, dapatlah diberikan sekadar informasi bahwa sebuah kota umumnya terdiri dari sejumlah penduduk tertentu, hidup berdekatan satu sama lain, dengan bangunan-bangunan permanen dengan jaringan jalanan dan sistem transportasi yang serba teratur. Hampir semua orang dewasa dapat mengenal kota yang adalah sangat berbeda dengan suatu perkebunan, hutan, atau lapangan.

Pertanyaan tambahan dan pemikiran yang berikut ini dapat menimbulkan kekurangpastian tentang karakterisasi umum yang memadai untuk menjelaskan tentang suatu kota. Misalnya, jika ada yang mencoba menentukan beberapa jumlah polusi yang dibutuhkan untuk membangun suatu kota, apakah 1.000, 5.000, 50.000, ataukah 10.000 jiwa? Lalu dengan dasar apakah kita bias menentukan sejumlah penduduk yang dibutuhkan itu ?



Gambar 5. Kepadatan Teritorial

[.detik.com/foto-bisnis/d-4738572/jumlah-penduduk-meningkat-hunian-di-dki-semakin-padat/4?zoom#](https://www.detik.com/foto-bisnis/d-4738572/jumlah-penduduk-meningkat-hunian-di-dki-semakin-padat/4?zoom#)

Selanjutnya, bagaimana padatnya penduduk yang hidup berdekatan satu sama lain dalam rangka pendirian satu kota / apakah suatu kampus tentara yang permanen atau rumah pemasyarakatan (penjara) yang berpenghuni khusus orang-orang pria dewasa, dapat dikualifikasikan sebagai suatu kota? Apakah suatu kota hanya mencakup orang-orang yang berdomisili dalam batas-batas teritorial resminya, ataukah juga meliputi tempat-tempat kediaman pinggiran kota (subur) dan penduduk diluarbatas kota itu tidak termasuk dalam batas daerah hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang erat hubungannya dengan karakterisasi kota-kota, harus memperoleh jawaban seperlunya guna memberikan pengertian yang tepat tentang bagaimana corak ragam kota-kota yang sebenarnya.

B. Pengertian Kota

Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Materi yang dipelajari antara lain mata

pencaharian hidup, pola hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan.

Pengertian kota menurut beberapa ahli yaitu:

1. Max Weber berpendapat bahwa “suatu tempat adalah kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan dijualbelikan di pasar itu. Jadi menurut Max Weber, ciri kota adalah adanya pasar, dan sebagai benteng, serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri, dan bersifat kosmopolitan.
2. Cristaller dengan “central place theory”-nya menyatakan kota berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah lingkungannya. Jadi menurut teori ini, kota diartikan sebagai pusat pelayanan. Sebagai pusat tergantung kepada seberapa jauh daerah-daerah sekitar kota memanfaatkan penyediaan jasa-jasa kota itu. Dari pandangan ini kemudian kota-kota tersusun dalam suatu hirarki berbagai jenis.
3. Sjoberg berpendapat bahwa, sebagai titik awal gejala kota adalah timbulnya golongan literati (golongan intelegensia kuno seperti pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan), atau berbagai kelompok spesialis yang berpendidikan dan nonagraris, sehingga muncul pembagian kerja tertentu. Pembagian kerja ini merupakan ciri kota.
4. Wirth, mendefinisikan kota sebagai “pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosialnya menjadi longgar acuh dan tidak prib-

adi (*impersonal relation*).

5. Karl Marx dan F.Engels memandang kota sebagai “persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat –alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri”. Perbedaan antara kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi.
6. Harris dan Ullman, berpendapat bahwa kota merupakan pusat pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya yang cepat dan luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi bumi, tetapi di pihak lain juga berakibat munculnya lingkungan yang miskin bagi manusia. Yang perlu diperhatikan, menurut Harris dan Ullman adalah bagaimana membangun kota di masa depan agar keuntungan dari konsentrasi pemukiman tidak mendatangkan kerugian atau paling tidak kerugian dapat diperkecil.
7. Menurut Bintarto, (1984:36) kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemutusan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.”
8. Menurut Tonybee, sebuah kota tidak hanya merupakan pemukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomple-

kan yang khusus dan setiap kotamenunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing.

Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kota adalah suatu wadah yang memiliki batasaan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan (Hauser dan Garder, 1985)

Ada 2 macam definisi yang lazim digunakan dalam literatur guna memberikan batasan pengetahuan tentang suatu kota, yakni (1) definisi legal, dan (2) defines natural. Definisi pertama menggambarkan kota-kota sebagai satu unit pemerintahan, sedangkan definisi kedua melukiskan kota-kota itu sebagai satu kesatuan sosial yang alami (natural).

- 1) Definisi Legal : “ Kota atau Kotamadya (municipality) adalah satu kota yang meliputi suatu wilayah yang digabungkan secara legal (menurut hukum) dengan jumlah penduduk tertentu yang diisyaratkan, dimana suatu aparat pemerintah kota menjlankan pemerintah yang dilegalisaikan oleh Negara-negara kepadanya”.

Definisi semacam ini adalah perlu bagi ahli ilmu politik dan pejabat pemerintah yang mengetahui wewenang (authority) yang demikian oleh pemerintah setempat, yang dijalankan dalam batas wilayah teritorialnya.

- 2) Definisi Natural : “ kota sebagai suatu pedoman alami (natural) adalah merupakan satu unit wilayah tertentu dengan ciri-ciri tertentu, seperti : ukuran dan kepadatan penduduknya, pekerjaan khusus da yang terspesialisasi serta hubungan sosialnya, yang berbeda dengan kota-kota lain “.(Daldjoeni, 1986)

Berbeda dengan definisi legal, maka definisi natural ini lebih condong melihat kota itu dari segi sosial kulturalnya, yang tidak tergantung pada hukum legal dan batas-batas teritorial menurut hukum yang berlaku. Untuk memahami kota dengan berbagai masalahnya, kecuali aspek hukum dan administrasinya, maka adalah lebih tepat menggunakan tipe definisi legal daripada definisi natural. Oleh sebab itu dalam membicarakan kota selanjutnya, dalam diktat yang mendapat prioritas utama adalah kota natural, kecuali dalam hal dimana diperlukan informasi mengenai batas-batas hukum, pemerintahan dan pengawasan yang betul-betuk diperlukan untuk dipahami.

C.Karakteristik Umum Kota Natural

1. Karakteristik Kota

Dilihat dari aspek jumlah penduduknya, secara praktis jumlah penduduk yang ada dapat digunakan sebagai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga

tidak terlepas dari kelemahan – kelemahan. Kriteria jumlah penduduk ini dapat secara mutlak atau dalam arti relatif, yakni kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Sebagai contoh ada beberapa Negara misalnya di amerika serikat dan meksiko, suatu tempat pemukiman yang dihuni oleh 2.500 jiwa ke atas sudah dapat disebut dengan kota, sedangkan di Albania dan swedia diatas 200 jiwa sudah dapat disebut juga dengan kota. Sehingga di dalam perhitungan praktis ini pada setiap Negara bisa saja berbeda satu dengan yang lain, daerah dengan jumlah penduduk 100 jiwa disebut *community*, kemudian daerah yang berpenduduk 100 sampai 1000 jiwa disebut *village*, dan 1000 jiwa keatas disebut dengan *city* (Asy'ari. 1993)

Pemerintah Republik Indonesia pun kemudian juga menggolongkan kota berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Kota kecil, jumlah penduduk 20.000 – 50.000 orang
2. Kota sedang, jumlah penduduk 50.000 – 100.000 orang
3. Kota besar, jumlah penduduk 100.000 – 1.000.000 orang
4. Kota metropolis, jumlah penduduk < 1. 000.000

Dari aspek sosial, gejala–gejala dalam kota dapat kita lihat dari hubungan– hubungan sosial (*sosial interelation dan sosial interaction*) diantara penduduk warga kota, yakni yang bersifat kosmopolitan. Hubungan sosial yang bersifat impersonal, sepintas lalu, berkotak – kotak, biasanya terjadi karena kebutuhan. Misalnya saja hubungan antar warga kota yang terjalin karena hubungan kerja dalam satu perusahaan.

Karakteristik kota dari segi ekonomi dapat kita lihat dari segi bentuk dan cara hidup warga kota, yang dimaksudkan disini tentunya akan jauh berbeda dengan bentuk yang ter-

dapat di desa. Mata pencaharian warga kota biasanya terpusat pada bidang – bidang produksi atau jasa. Kota juga merupakan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta kegiatan – kegiatan pelayanan yang lain (Marbun, 1990.)

Dari aspek morfologis, antara kota dan pedesaan terdapat perbedaan bentuk fisik, seperti cara membangun bangunan – bangunan tempat tinggal yang berjajar, mencakar langit dan serba kokoh. Tetapi pada praktiknya kriteria itu sukar di aplikasikan kedalam bentuk pengukuran, karena sudah banyak ditemukan dibagian – bagian kota yang tampak seperti desa, misalnya di daerah pinggiran kota, sebaliknya terdapat juga desa – desa yang mirip kota, seperti desa – desa dipegunungan di Negara – Negara laut tengah (Eropa).

2. Sejarah Kota

Membicarakan sejarah kota tentunya kita juga akan membicarakan mengenai kehidupan peradaban manusia dimasa silam. Para ahli pun sebenarnya juga belum dapat menentukan kapan atau pada tahun berapa kota pertama di dunia ini berdiri. Dalam sejarah kehidupan manusia kota atau embrio kota dimulai ketika warga masyarakat mulai mengakhiri hidup mengembara dan mulai menetap pada satu tempat tertentu, sedangkan aspek kehidupan semakin meluas seiring berkembangnya peradaban. Tetapi tidak semua bentuk kehidupan tersebut lantas otomatis menjelma menjadi sebuah kota (Marbun, 1990)

Sejarah pembentukan kota di Indonesia sendiri juga dari berbagai macam latar belakang kejadian dan peristiwa yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan peradaban.

1. Kota yang berasal dari perkebunan. Misalnya saja

- kota Bandung, Bogor, Batu malang, Salatiga, Palembang, Jambi dan Bengkulu.
2. Kota yang berasal dari pusat pertambangan. Misalnya saja Muntok (timah), Tarakan (minyak), Martapura (intan) dsb.
 3. Kota yang berasal dari pusat administrasi. Dalam hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan misalnya saja Jakarta (ibukota Negara), Semarang (ibukota provinsi Jateng) Sukoharjo (ibukota kabupaten)
 4. Kota yang berasal dari pusat perdagangan. Misalnya ,Makassar, Jakarta dan Surabaya
 5. Kota yang berasal dari pusat industri. Misalnya kota Batam, Tangerang dan sebagainya.
 6. Kota yang berasal dari pusat budaya. Misalnya Surakarta dan sebagainya

D.Tahap Perkembangan Kota

Seperti yang telah diuraikan dalam berbagai karya, banyak yang menyebutkan bahwa kota adalah hasil dari sebuah peradaban umat manusia. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia maka kota yang telah dihuni manusia pun tentunya juga berkembang. Mumford (dalam Marbun, 1990) menggambarkan perkembangan bentuk kota – kota dan beberapa tingkatan bentuk perkembangan kota, sebagai berikut:

1. Neopolis : Kota menempati suatu pusat daerah pertanian dengan adat istiadat bercorak pedesaan dan serba sederhana. Misalnya saja kota kecamatan yang berada dalam sebuah lingkup wilayah kabupaten. Disini dimaksudkan bahwa kota kecamatan ini berada diluar kawasan pusat kota kabupaten tersebut.

2. Polis :Merupakan pusat kehidupan keagamaan dan pemerintahan. Contoh nyata dari kota polis ini yaitu kota vatican yang berada di Roma, yang kemudian juga mendirikan sebuah pemerinyahan sendiri.
3. Metropolis : Dalam kota besar ini telah terjadi pertemuan orang dari berbagai bangsa untuk tujuan dagang dan saling bertukar kebudayaan. Terjadi perkawinan campuran antar bangsa maupun antar ras sehingga menyebabkan penduduk kota heterogen.
4. Megapolis : Merupakan peningkatan dari kota metropolis. Terjadi gejala sosiopatologis. Kekuasaan dan kekayaan semakin menonjol, kemiskinan juga semakin meluas.
5. Tyranopolis : Kota besar ini dilanda kepincangan-kepincangan sosial yang berupa korupsi dan kemerosotan moral. Kaum miskin merupakan kekuatan yang tak dapat diremehkan.
6. Nekropolis : Merupakan tahap terakhir dari perkembangan kota. Kota mengalami kemunduran, menuju keruntuhan.

Fungsi-fungsi kota

Gambaran tentang kualitas umum dari masyarakat urban, yang tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman, merupakan salah satu titik tolak yang baik guna memberikan karakterisasi suatu kota natural sebagai obyek studi ilmiah. Bagaimana pun, ada sebagian daripada kualitas umum tersebut, misalnya ukuran dan kepadatan penduduk, secara berangsur-angsur nampak secara ekstrem dari kota ke pedalaman, sehingga perlu ditentukan garis pemisah antara kedua

zone tersebut, guna dapat membedakan masyarakat urban dan masyarakat non-urban, atau masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan, sebagai berikut :

(1) Fungsi Khusus dalam perekonomian

Dalam usaha untuk memahami ciri-ciri umum kota natural, bisa dimulai dengan memberikan lukisan peranan spesialisasi kota itu dalam jaringan human relations, dengan satu analogi, seperti jika kita mempelajari satu karburatur mobil sebagai mekanisme yang terpisah, dengan memasukkan didalamnya : jumlah, ukuran dan bentuk suku cadang komponennya, dan bagaimana cara kesemua bagian itu membentuk satu unit kerja yang terintegrasi. Karena jika tidak dapat kita memahami peranan apa yang dimainkan oleh karburator mobil itu dalam menjalan mesin, terutama bagaimana hubungannya dengan supply gasoline, supply udara, cylinder dan bagian-bagian lainnya dari mesin tersebut, maka kita tidak dapat memperoleh suatu pengertian dasar tentang wujud karburator itu.

Demikianlah juga halnya dengan orang yang mempelajari ciri-ciri kota itu sebagai suatu bagian khusus dari satu kesatuan ekonomi yang lebih luas, terlebih dahulu harus mampu mempelajari ciri-ciri kota itu sebagai satu fenomena manusia yang terpisah, dengan jumlah penduduk dan kepadatannya, struktur ruang internya dan lingkungan sosialnya.

(2) Fungsi Non Agraris

Pekerjaan non agraris merupakan salah satu jenis spesialisasi dasar yang membedakan fungsi masyarakat urban dengan masyarakat desa pertanian. Penduduk kota sehari-harinya menjalankan berbagai macam fungsi non agraris, seperti misalnya : perdagangan, industry, dan berbagai jasa-jasa non

agraris, antara lain menjadi pegawai, karyawan, sopir dan lain sebagainya.

Sebagai imbalan dari pekerjaan dari penduduk kota memperoleh bahan-bahan sandang dan pangan yang diproduksi oleh para petani di daerah pedesaan. Jadi nyata-lah, bahwa tanpa hasil produksi pertanian, penduduk kota tidak bisa memperoleh bahan makanan sehari-hari, tetapi sebaliknya juga tanpa jasa-jasa non agraris dari penduduk kota, maka sudah barang tentu penduduk desa pertanian tidak bisa memperoleh barang-barang ekonomis dalam berbagai volume, variasi dan kualitas yang mereka butuhkan.

Kenyataan tersebut diatas membuktikan, bahwa dalam kehidupan modern, di zaman berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, antara para petani di daerah pedesaan dan para warga kota, baik di kota-kota besar maupun kota-kota sedang dan kecil, terdapat satu ikatan yang saling berkait dan saling bergantung satu sama lain, meskipun kedua belah pihak menjalankan spesialisasi yang berbeda bagi kesejahteraan masing-masing secara timbal balik.

(3) *Spesialisasi pekerjaan*

Informasi tentang kota sebagai suatu fenomena spesialisasi adalah berdasarkan kenyataan bahwa dan dugaan, bahwa dalam proses penyesuaian diri manusia baik kepada alam lingkungan, maupun kepada orang lain disekitarnya, setiap orang pada umumnya akan berusaha mencari jalan yang paling mudah ditempuhnya. Meskipun pilihannya tersebut akan mendapat tantangan dari tradisi, adat istiadat, prasangka dan misinformasi, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap orang sudah barang tentu akan berusaha untuk memilih jalan

yang paling mudah dalam menyesuaikan diri dengan alam lingkungan dan orang lain.

Tidaklah mengherankan, jika warga kota, maupun petani di pedesaan, memilih dan mengikuti spesialisasi dalam usaha mengembangkan pekerjaan mereka sehari-hari. Dengan jalan memilih spesialisasi dalam usaha mereka, dapatlah diharapkan bahwa mereka akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan jerih payah yang lebih kurang.

Berdasarkan pada pertimbangan yang demikian tadi, maka setiap pabrik, setiap toko dan setiap kantor jasa cenderung untuk memilih lokasi tertentu secara berkelompok, karena dengan pengelompokan usaha sejenis tersebut, mereka akan lebih mudah menjalankan spesialisasi mereka yang lebih efektif. Telah menjadi ciri khas bagi suatu kota industri perdagangan untuk mengelompokkan dalam bidang-bidang usaha tertentu, dimana mereka timbul dan bertumbuh sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing mempersembahkan jasa-jasa komersial dan non agraris, bagi penduduk sekitar dan warga kota itu sendiri dalam penyesuaian mereka kepada ruang lingkup yang beraneka ragam disekitarnya.

(4) *Spesialisasi Politik, Rekreasi dan Agraria*

Pada umumnya, setiap kota itu dapat ditandai, baik oleh warga kotanya sendiri, maupun oleh orang luaran, karena kota itu mempunyai fungsi dan pekerjaan non agraris, sebagai spesialisasi khusus yang dimilikinya, yang dapat membedakannya dengan kota-kota lain, misalnya ada kota yang terkenal sebagai kota pusat pemerintahan, seperti : New Delhi di India, Washington di Amerika Serikat, Camberra di Australia, dsb.

Selain itu ada pula kota-kota yang terkenal sebagai

kota suci, kota pusat peribadatan, yang setiap tahun ramai dikunjungi oleh penganutnya dari berbagai bagian dunia, misalnya kota Makkah di Saudi Arabia bagi umat Islam, kota Vatikan di Italia bagi umat Khatolik, dan lain-lain. Disamping itu ada juga kota-kota yang terkenal sebagai kota rekreasi atau kota peristirahatan, misalnya : Atlantic City di Amerika Serikat, Puncak di Jawa Barat, Malino di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Juga ada kota-kota yang termasyur sebagai Kota Pendidikan, atau kota pusat kebudayaan, seperti : Colombia dan Missouri di Amerika Serikat, Leiden di Belanda, Yogyakarta di Indonesia, dan lain-lain lagi.

Kesemua kota-kota itu menjadi lebih terkenal dan dikenal karena adanya fungsi-fungsi khusus non agraris mereka, baik dalam bidang politik dan pemerintahan, maupun dalam bidang – bidang lainnya, seperti rekreasi, pendidikan dan agama. Selain itu ada juga beberapa kota besar yang menjalankan jasa-jasa spesialisasi yang beraneka ragam, sehingga tidak bisa ditandai secara eksklusif dengan menggunakan satu istilah fungsinya yang tertentu. Kota yang demikian biasanya dikenal dengan sebutan : *diversified city* atau kota yang aneka ragam, sesuai dengan fungsi yang diembannya itu. Namun demikian, setiap kota bagaimanapun tipenya, masih tetap mempunyai ciri-ciri yang penting, karena memiliki satu atau lebih jasa-jasa spesialisasi non agraris, dalam pembagian kerja secara ekonomi yang lebih luas.

(5) Jumlah dan kepadatan penduduk

Selain dari pada fungsi dan spesialisasinya, kota-kota juga secara umum bisa dibedakan dengan daerah pedesaan, berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduknya, yang tidak

dapat dilepaskan dari pada pekerjaan spesialisasi dan jasa-jasa non agraris, yang terdapat di kota-kota itu, yang sangat berbeda dengan pekerjaan spesialisasi agraris di daerah pedesaan.

Pekerjaan di kota secara khusus tidaklah memerlukan areal tanah yang seluas lahan pertanian yang dibutuhkan oleh seorang petani di pedesaan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan tanah yang diperlukan oleh seorang petani dengan seorang warga kota, antara lain untuk berbagai keperluan, seperti : pekerjaan, berolahraga, dsb, maka tanah yang dimanfaatkan oleh warga kota dengan segala macam kebutuhannya itu adalah relative kurang, atau hanya merupakan sebagian kecil dari lahan pertanian dari seorang petani, kemungkinan 500 banding 1 (500:1).

Dengan hidup secara mengelompok diatas areal tanah yang relatif sempit, maka penduduk kota dapat mengurangi jumlah waktu yang mereka gunakan sehari-hari dalam bepergian, antara rumah, pekerjaan, toko, sekolah, masjid dan tempat rekreasi. Sekaligus, mereka juga dapat mengurangi biaya untuk membuat jalan, memasang pipa air dan kabel listrik serta penggunaan transportasi yang padat itu berkembang secara lebih efektif dalam usaha mereka menyesuaikan diri, baik dengan lingkungan material maupun dengan lingkungan manusia mereka, dengan lebih mudah.

Jumlah penduduk juga dapat dijadikan indicator secara tidak langsung dalam membedakan wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, oleh karena ukuran jumlah penduduk juga mempunyai pengaruh dalam pembinaan dan sifat hubungan sosial masyarakat kota dan masyarakat desa.

Menurut kenyataan, semakin besar jumlah penduduk suatu kota, semakin sukarlah bagi sebagian besar penduduk

kota itu untuk saling kenal mengenal, apa lagi untuk saling tolong menolong antara mereka satu sama lain. Itulah yang menyebabkan sering munculnya hubungan sosial kekotaan yang impersonal dan anonym, yang amat berbeda dengan hubungan sosial pedesaan yang personal dan intim.

E.Ciri-ciri Warga Kota Lainnya

Disamping kepadatan dan jumlah penduduk yang besar masih ada 3 macam kualitas penduduk kota yang sangat kontras dengan penduduk pedesaan, yakni : (a) mobilitas, (b) permanen dan (c) heterogonitas.

- (a) Mobilitas. Penduduk kota umumnya mempunyai kecenderungan sikap yang lebih mobil, misalnya suka bepergian, suka keluar rumah, suka berpindah tempat kediaman, tempat pekerjaan, dll. Sedangkan penduduk desa sebaliknya tidak mudah penduduk desa sebaliknya tidak mudah bepergian, pindah rumah atau pindah pekerjaan. Mereka serba statis dalam kehidupan mereka sehari-hari.
- (b) Permanen. Berbeda dengan sikap penduduk kota secara individual yang suka berpindah-pindah (mobil), umumnya tempat kediaman mereka dan bangunan-bangunan lainnya dalam kota dibangun secara permanen, sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Pada umumnya perlengkapan material yang dibangun dalam suatu kota dikerjakan secara saksama dan serba permanen, misalnya : gedung-gedung, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, rumah-rumah ibadat, jalan raya dan perusahaan umum lainnya, dengan biaya yang cukup besar, karena itu sukar dipindahkan.

(c) Heterogenitas. Selain itu, kota-kota pada umumnya didiami oleh penduduk yang heteroean, baik wanita maupun pria, mereka terdiri dari berbagai jenis usia, berbagai kelompok suku – bangsa dan bangsa – bangsa, dari berbagai jenis kelas sosial ekonomi, agama dan kepercayaan. Jadi penduduk kota itu, secara khusus, betul-betul bersifat heterogenius, baik dalam usia maupun dalam jenis kelamin, karena itu memiliki potensi untuk mereproduksi turunan mereka secara biologis.

Dari segi sosial, kota-kota juga cukup heterogenius, sebagai penunjang kelangsungan hidup lembaga sosial setempat, dalam pembinaan kebutuhan dasar mereka sehari-hari, seperti sekolah, keluarga, tempat ibadat, pemerintahan, industri, dsb.

Dengan adanya penduduk kota yang heterogenius dan berimbang secara biologis itu, maka suatu kota adalah jauh berbeda dengan suatu lembaga perpanen dengan spesialisasi tertentu, seperti penjara (lembaga pemasyarakatan, tangsi tentara dan asrama mahasiswa yang hanya didiami oleh populasi pria dewasa saja.

Hubungan Sosial yang Berbeda

Ukuran jumlah, kepadatan dan mobilitas penduduk kota sebagai mana telah diuraikan diatas, sudah barang tentu membawa pengaruh yang besar dalam perbedaan sifat hubungan sosial antara penduduk kota-kota modern dengan penduduk pedesaan yang masih serba sederhana.

Dapat dikemukakan adanya 3 macam diri hubungan sosial kekotaan yang sangat kontras dengan hubungan sosial

masyarakat pedesaan yang swasembada, yaitu :

- (a) Impersonalitas : Ada beberapa bagian hubungan sosial kota yang bersifat external (mendatar) dan interpersonal. Hal ini disebabkan karena besarnya dan padatnya penduduk kota, sehingga mereka tidak sempat berkenalan secara mendalam satu sama lain, sebagaimana yang terjadi pada penduduk pedesaan yang relatif jarang dan sedikit jumlahnya.
- (b) Kompleksitas : Dunia kemasyarakatan kekotaan sangat rumit atau kompleks, halaman sangat berbeda dengan kesederhanaan hidup penduduk daerah pedesaan. Hal ini merupakan akibat daripada besarnya jumlah dan banyaknya variasi penduduk kota yang saling berjumpa, sebagai produk daripada aneka ragam spesialisasi pekerjaan dan kelompok-kelompok sosial heterogenius, dimana para warga kota itu berpartisipasi setiap hari.
- (c) Segmentasi personal : Untuk sebagian besar penduduk kota, kehidupan sosial mereka terbagi dalam kelompok (kotak) yang terisolasi satu sama lain, halaman tidak pernah atau jarang terjadi dalam masyarakat pedesaan. Kebanyakan penduduk dewasa di kota-kota memainkan peranan yang beraneka ragam dalam berbagai kelompok, yang berbeda satu sama lain, misalnya kelompok keluarga di rumah, kelompok sekerja di kantor, kelompok sepermainan dalam perkumpulan olahraga, berburu dan lain-lain.

Jadi kesimpulannya, pada tingkat impersonalitas, kompleksitas dan segmentasi personal, kehidupan sosial kekotaan memamerkan kecenderungan yang berbeda dengan hubun-

gan sosial pedesaan yang belum didominasi oleh pengaruh kekotaan.

Organisasi Intern Kota

Kota adalah merupakan satu kesatuan masyarakat yang terorganisasi secara intern, baik dalam bidang spasial (ruang), maupun dalam bidang sosial (kemasyarakatan).

Jika ditinjau dari segi ruang (*spacial*), tampaklah bahwa satu kota besar biasanya terbagi dalam beberapa kawasan, daerah dan bagian-bagiannya antara lain :

- (a) Kawasan perdagangan, terdiri dari daerah-daerah pusat perbelanjaan yang meliputi daerah pertokoan, daerah perdagangan besar dan menengah.
- (b) Kawasan Industri, yang terdiri dari daerah-daerah industri besar, sedang dan ringan yang terbagi lagi dalam bagian masing-masing sesuai dengan jenis dan kualitas barang yang diproduksinya
- (c) Kawasan pemukiman, yang terdiri dari daerah-daerah pemukiman mewah, menengah dan rendah, yang bervariasi dalam berbagai bentuk dan tipe masing-masing.
- (d) Kawasan perkantoran, yang meliputi bangunan kompleks perkantoran pemerintah dengan instansi-instansi dan jawatan serta dinas-dinasnya.

Setiap kawasan, daerah dan bagian-bagiannya, yang menempati ruang pada lokasi tertentu pada suatu kota masing-masing mempunyai hubungan satu sama lain, melalui satu sistem jaringan komunikasi dan transportasi, sehingga seluruh kawasan dalam kota tersebut merupakan satu kesatuan yang

saling bergantung dan tidak terpisahkan satu sama lain.

Secara keseluruhan, setiap kawasan mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kawasan lainnya, dimana mereka masing-masing cenderung untuk menempati lokasi ruang yang ideal, dimana setiap kawasan ini mampu menjalankan fungsi spesialisasinya secara efisien, namun secara keseluruhan kesemua kawasan itu secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang terintegrasi.

Dan jika ditinjau dari segi sosial (kemasyarakatan), maka suatu kota adalah mencakup berbagai macam lembaga, golongan dan kelompok-kelompok sosial, yang masing-masing memperlihatkan derajat segmentasi kehidupan secara terpadu, baik secara mikro maupun secara makro.

Pada umumnya lembaga-lembaga yang beroperasi dalam suatu kota secara fungsional adalah terintegrasi satu sama lain, sehingga memungkinkan penduduk kota itu memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Dengan demikian maka nyatalah, bahwa baik secara ruang, maupun secara sosial, kota itu merupakan satu kesatuan sosial yang terorganisasi pada kota-kota tertentu.

Kesimpulan Karakterisasi Kota

Kota-kota besar pada umumnya bisa berkembang, oleh karena adanya kemampuan mereka membina dan mempersembahkan cara-cara penyesuaian yang lebih mudah dan lebih baik, bagi warga kotanya dan penduduk sekitarnya, baik terhadap lingkungan hidup alamiah, maupun terhadap lingkungan manusia disekitarnya.

Dengan jalan memberikan jasa-jasa spesialisasi non agraris dalam suatu perekonomian yang luas, maka kota-kota itu telah membantu mempromosikan sikap efisiensi kerja dan cara penyesuaian baik alami maupun manusiawi bagi seluruh warga kota. Untuk melakukan pekerjaan non agraris dalam kota hanya di areal tanah yang relatif sempit, jika disbanding dengan lahan pertanian penduduk desa. Namun demikian, dengan cara hidup berkelompok pada lokasi-lokasi yang strategis, penduduk kota mampu mempersembahkan fungsi spesialisasinya secara lebih efisien.

Berbeda dengan masyarakat petani di pedesaan yang berpenduduk jarang dan hidup terpencar, penduduk kota yang jumlahnya begitu besar dan padat, tidak akan bisa hidup dari lahan pertanian kota itu sendiri, tanpa bantuan bahan makanan dari daerah sekitarnya.

Ukuran jumlah, kepadatan dan mobilitas penduduk kota merupakan sumber tumbuhnya hubungan sosial kekotaan yang beraneka ragam, dengan ciri-ciri khusus yang bersifat impersonalitas, kompleksitas dan segmentasi personal yang tinggi tingkat intensitasnya.

Penduduk kota adalah relative permanen, berkesinambungan dalam komposisi usia dan jenis kelamin, sehingga mempunyai potensi untuk dapat mereproduksi mereka sendiri secara biologis. Disamping itu umumnya kota-kota besar itu juga mengalami penambahan penduduk yang non alami, melalui urbanisasi dan imigrasi.

Akhirnya, secara intern, setiap kota beroperasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (terpadu), baik secara ruang, maupun secara sosial, meskipun setiap kawasan atau daerah mempunyai kecenderungan untuk menempati lokasi yang

ideal, namun tetap terbina hubungan totalitas antar kawasan dan antar daerah. Pada setiap lokasi yang telah dipilih oleh kawasan dan daerah tertentu itu, mereka tetap berusaha untuk memberikan pelayanan spesialisasinya secara potensial, bagi kesejahteraan mereka bersama dan dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya pada umumnya.

BAB III

LOKASI DAN UKURAN KOTA

A. Pendahuluan

Kota-kota pada umumnya tidak hanya timbul dan tumbuh sesuai dengan perubahan yang terjadi secara alami semata-mata, tetapi pertumbuhannya itu tidak bisa dilepaskan daripada prinsip umum tentang lokasi yang mempengaruhi pertumbuhan kota itu.

Prinsip pertumbuhan kota semacam inilah yang bisa membantu menjelaskan, mengapa suatu kota menempati lokasi yang lebih istimewa dibanding dengan kota-kota lainnya, demikian juga mengapa suatu kota bisa bertambah luas dan berkembang menjadi suatu biasa, tidak berkembang atau lambat sekali perkembangannya.

Mungkin seorang mahasiswa merasa tidak perlu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang lokasi dan pertumbuhan kota-kota itu, karena jawaban atas pertanyaan itu hanya mempunyai nilai praktis, baik kini maupun dimasa depan.

Sebaliknya dengan praktisi yang ingin menjalankan operasi dalam suatu kota, jawaban atas pertanyaan tadi justru sangat berguna bagi pengembangan usahanya, misalnya bagi seorang businessman, seorang pengusaha yang ingin mengetahui di kota mana dia dapat mendirikan perusahaannya, juga bagi seorang investor, penanam modal yang ingin meramal-kan nilai tanah dan harta benda setempat, bagi seorang pengacara, yang bertanggung jawab atas berbagai macam jasa untuk warga kota, bagi seorang anggota kamar dagang dan industry, yang ingin mempromosikan perkembangan satu kota yang sehat, dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka dalam uraian selanjutnya akan dicoba untuk memberikan penjelasan selayang pandang, mengenai beberapa prinsip dasar sehubungan dengan lokasi dan pertumbuhan kota-kota, yang materinya dibagi dalam 2 bagian: pertama tentang analisa lokasi kota secara abstrak dan kedua, mengenai komparasi size (ukuran) kota-kota secara umum.

B.Prinsip-prinsip Tentang Lokasi Kota

Sudah barang tentu setiap kota, akan berusaha untuk mendapatkan dan menempati lokasi yang dapat memberikan kemungkinan baginya dalam melayani kebutuhan warga kotanya semudah mungkin, guna memberikan pemuasan yang semaksimal mungkin bagi manusia, terutama penduduk kota itu sendiri.

Menurut kenyataan, tidak semua kota berhasil menempati lokasi yang dicita-citakannya, namun dalam jangka panjang, setiap kota senantiasa berusaha untuk memperoleh

lokasi yang ideal, bagi perkembangan dan pengembangannya di masa depan.

Dalam system persaingan ekonomi secara bebas, suatu kota perdagangan (*commercial city*) berusaha menempati lokasi yang mudah baginya untuk mempertukarkan komoditi tertentu antara daerah pedalamannya dengan pengusaha luar negeri yang dilayaninya, demikian juga dengan pengusaha luar negeri yang dilayaninya, demikian juga dengan penduduk kotanya itu sendiri.

Kota perpabrikasi (*manufacturing town*), berhasrat untuk berlokasi, dimana ia mudah melaksanakan perakitan (*assembling*) – produksinya yang berlebih dan mudah mendistribusikan komoditi jadinya ke pasaran, dalam dan luar negeri.

Kota Resort Kesehatan dan Rekreasi (*Health and Recreation Ressorts*) berusaha untuk menempati lokasi, dimana alam sekitarnya senantiasa menyediakan fasilitas istimewa (*exceptional facilities*) untuk permainan tertentu, baik untuk relaksasi maupun untuk mengembalikan kesehatan jasmani sehari-hari.

Kota Pemerintahan, meskipun hanya memerlukan terkumpulnya para pejabat dan pegawai pemerintahan, barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, namun diperlukan adanya pertimbangan yang seksama guna memperoleh satu lokasi yang bisa memiliki fasilitas dan efisiensi yang semaksimal mungkin.

Dengan demikian, maka secara umum dapat dikatakan, bahwa lokasi yang baik bagi satu kota, bisa menciptakan efisiensi yang lebih besar bagi usaha penyesuaian manusia kepada alam sekitarnya. Oleh sebab itulah, maka diperlukan adanya usaha yang keras dan perencanaan yang baik, dalam

menciptakan efisiensi, yang sangat dibutuhkan dalam bagi penentuan lokasi yang ideal bagi suatu kota.

(1) *Prinsip Biaya Minimum*

Karena adanya tekanan yang mendesak bagi satu usaha penyesuaian yang lebih mudah terhadap lingkungan sekitar, bagi setiap warga kota, maka usaha semacam itu hendaknya dapat digambarkan sejalan dengan suatu prinsip umum mengenai biaya yang rendah (*minimum cost*).

Penduduk suatu kota mempunyai kecenderungan untuk bertempat tinggal menyebar di seluruh wilayah kota sedemikian rupa, dimana biaya yang mereka keluarkan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar dan orang lain, termasuk segala macam biaya kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dapat ditekan menjadi serendah mungkin.

Lokasi penyebaran dan ukuran penduduk kota, yang merupakan aspek kebijaksanaan distribusi penduduk, umumnya sejalan dengan prinsip biaya minimum itu. Demikian juga halnya dengan prinsip-prinsip umum lainnya dari lokasi kota, senantiasa beroperasi sesuai dengan prinsip biaya minimum tersebut.

Dalam kalkulasi penempatan lokasi kota yang lebih efisien, ada 4 macam aspek biaya yang perlu dipertimbangkan yakni :

- (a) Perbedaan dalam kegunaan dan harga pembelian tanah, bahan baku, tenaga listrik, pekerjaan modal, untuk berbagai – bagian dari satu kota.
- (b) Perbedaan dalam penawaran dan harga penjualan produksi, komoditi dan jasa-jasa dalam berbagai pasar.
- (c) Biaya transportasi, baik orang maupun barang, dari rumah ke dan dari pabrik, toko dan kantor, dsb.

(d) Perbedaan biaya penempatan produksi tak terpakai (*waste product*)

Semua aspek biaya, termasuk risiko kebakaran, bencana alam juga harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi mana yang bisa menciptakan biaya paling rendah dalam penyesuaian itu.

Jadi jelaslah, bahwa didalam persaingan ekonomi secara murni, seorang fabricant akan mencoba untuk memperoleh bahan baku, listrik, tenaga kerja dan faktor produksi lainnya yang harganya relatif kurang, seorang merchant (saudagar), berusaha untuk membeli persediaan barang-barang, dari mana saja ia memperoleh tawaran yang lebih baik, selanjutnya baik pengusaha maupun pedagang itu masing-masing akan menjual barang-barang mereka di pasaran, dimana mereka dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.

(2) Prinsip Lokasi Mediaan

Seandainya untuk kepentingan analisa biaya transportasi diperhitungkan, bahwa lokasi ruang daripada bahan baku, pekerja dan pemasaran dari sebuah perusahaan telah diperhitungkan sebelumnya, maka lokasi perusahaan tersebut yang paling efisien, kecuali untuk perhentian transportasi, dapat dikalkulasi secara seksama, yakni pada pertengahan atau median dari segala sesuatu yang akan diangkut ke dan dari tempat perusahaan tersebut.

Jadi prinsip lokasi median berkenaan dengan penempatan ruang yang efisien dari semua fungsi bangunan dalam kota, yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkannya ialah penjeleasan tentang pemilihan lokasi ideal, yang berpengaruh

bagi pengembangan kawasan dan daerah –daerah tertentu dalam suatu kota.

Misalnya untuk mempertimbangkan alokasi median yang serasi bagi sebuah toko, yang umum dalam kota, dimana pemiliknya berdiam di loteng toko itu, transportasi bagi barang dagangannya tidak begitu penting, maka median lokasinya terletak di tengah-tengah dari apda langganan potensialnya. Andaikata terdapat 20 langganan sepanjang jalan itu, maka median lokasi tokoh ialah persis ditengah-tengahnya, dengan 10 langganan sebelah menyebelahnya. Dalam kalkulasi lokasi median bagi langganan yang menyebar secara linear ini, hanya jumlah kangganan dan bukan jarak tempat tinggal mereka itu.

Adapun pada distribusi langganan yang non linier, median lokasi tetap terletak di tengah-tengah unit atau antara unit-unit yang paling dekat di tengah-tengah.

Satu kawasan atau daerah kota pada lokasi median pada semacam itu menduduki lokasi yang efisien untuk perdagangan keseluruhan wilayah sekitarnya, jika seandainya transportasi ke dan dari berbagai bagiannya dapat beroperasi dengan fasilitas dan kemudahan yang sama jurusan.

Demikian juga jumlah penduduk satu kota yang sudah terkenal harus diperhitungkan untuk menentukan populasi median dari wilayah tersebut. Misalnya jika satu kota berpendudukan 10.000 jiwa, sedang daerah pedalamannya berpenduduk 3.000 pada satu jurusan, sedang pada jurusan lain desa dengan 6.000 jiwa, maka median lokasi terletak dimana saja dalam kota itu sendiri.

Bangunan toko-toko, pabrik-pabrik dan kantor-kantor memilih lokasi tertentu dalam suatu kota yang telah masyhur, oleh karena jumlah penduduk kota itu membuat lokasi yang

mereka pilih itu menduduki lokasi median yang menguntungkan dan menyenangkan.

Menurut kalkulasi seorang manager industri, lokasi median, yang didasarkan pada kalkulasi transportasi bahan baku dan barang jadi yang diangkut dan dikapalkan ke dan dari pabrik itu, sudah barang tentu akan memperkecil jumlah biaya transportasi. Jadi pemilihan lokasi median yang tetap dengan sendiri akan menunjang prinsip biaya minimum.

C. Pengaruh Rute Transportasi

Pada pembahasan terdahulu, diandaikan bahwa transportasi adalah sama mudah dan murah ke semua jurusan dalam kota, halmana membawa konsekuensi diabaikannya pengaruh rute transportasi yang sebenarnya, padahal bagaimanapun juga, skala gerak yang luas, baik untuk barang maupun untuk orang, pada hakekatnya, cenderung untuk senantiasa mengikuti rute transportasi yang tepat jadwalnya dengan sendirinya mempengaruhi perkembangan lokasi dari suatu kota.

Demikian juga median yang efektif dari satu wilayah atau satu komunitas dalam satu kota, banyak-banyak tergantung pada kontinuitas rute transportasi yang mereka gunakan secara rutin. Pengaruh rute transportasi semacam itu dapat dilihat pada titik pertemuan antara berbagai jenis sarana transportasi, seperti kapal air, kereta api, bus umum, dan pada titik persimpangan rute transportasi, misalnya pada terminal kereta api, yang yang melayani angkutan barang dan manusia ke dan dari berbagai jurusan.

Titik pertemuan dan titik persimpangan rute transpor-

tasi pada umumnya menciptakan satu lokasi yang efisien bagi pengembangan satu kota, karena lokasi semacam itu dengan sendirinya membuat satu median yang paling efektif. Toko yang terletak pada simpang jalan, merupakan salah satu contoh tentang pengaruh titik persimpangan tersebut diatas.

Oleh sebab itu kadang-kadang orang membuat generalisasi secara umum, bahwa kota-kota mudah timbul dan berkembang pada titik pertemuan dan titik persimpangan garis-garis rute transportasi. Generasi semacam ini ternyata mendapat support dari gambaran yang dikemukakan tadi, oleh karena hal itu merupakan salah satu cara penterapan khusus daripada prinsip lokasi median.

Rute Transportasi dan Pertumbuhan Kota

Saling hubungan dan pengaruh mempengaruhi antara garis-garis transportasi pada titik pertemuan atau titik persimpangan di satu pihak dengan lokasi dan pertumbuhan kota dilain pihak, adalah sangat kompleks dan rumit, jika dibandingkan dengan satu prinsip lokasi median yang sederhana, sebagaimana telah dibahas pada uraian terdahulu.

Tidak dapat disangkal, bahwa pertemuan garis-garis transportasi pada satu kota bukan saja merupakan daya tarik dari kota asal (permulaan), yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kota itu seterusnya, tetapi oksistensi daripada kemajuan kota itu lebih lanjut merupakan promosi daripada rute-rute garis transportasi yang bertemu pada titik-titik tersebut.

Sebaliknya, jika kota itu semakin berkembang, maka garis-garis transportasinya pun semakin meluas ke pedala-

man, lalu kemudian tambahan rute itu semakin menjadi daya tarik penduduk disekitarnya untuk datang ke kota itu, karena prospek perdagangan di kota itu semakin cerah dimasa mendatang.

Jadi, dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Kota itu bertumbuh karena adanya rute-rute transportasi, yang saling bertemu, perkembangan kota mempromosikan eksistensi daripada garis-garis transportasi tersebut. Lalu seterusnya garis-garis transportasi itu menjadikan kota itu semakin terkenal dan berkembang dengan pesat.

Selain karena menempati lokasi pada titik median, juga ada beberapa kota yang timbul dan bertumbuh pada pertemuan rute transportasi yang berlainan, misalnya pada pelabuhan laut, station kereta api atau terminal angkutan darat, dari landasan udara ke pegunungan atau pertemuan antara jalan kereta api ke jalan perkotaan.



Gambar 6. Sarana Transportasi Perkotaan

<http://transportasi-transportasiumum.blogspot.com/2012/01/manfaat-transportasi.html>

Sudah menjadi kenyataan, bahwa kapanpun dan dimana pun terjadi perpindahan barang-barang muatan dari satu jenis sarana ke sarana angkutan lainnya, selalu diperlukan adanya tenaga kerja yang permanen (tetap). Itulah sebabnya maka inti populasi kota, umumnya terdapat pada atau titik pertemuan sarana angkutan yang berlainan jenis itu.

Apakah satu kota itu bisa berkembang atau tidak pada titik pertemuan transportasi semacam itu, sebagainya disebabkan karena bertambahnya jumlah populasi yang menyebar di tempat itu, lalu sebagian lagi tergantung pada volume dan jenis komoditi yang diturunkan dan dipindahkan dari dan ke angkutan lainnya.

Karena begitu besar dan lancarnya volume perdagangan yang dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, maka dengan sendirinya memerlukan tenaga kerja permanen yang cukup besar juga, maka di kedua lokasi itu tertampunglah populasi yang makin lama makin padat.

Adanya usaha bongkar muat dan pemindahan komoditi dari satu angkutan ke sarana angkutan lainnya, secara fisik, memerlukan jasa-jasa khusus pada titik pertemuan transportasi tersebut, terutama jika komoditi itu harus diperpak kembali, sebelum dipindah tangankan. Demikian juga jika komoditi itu harus disimpan dalam gudang, sebelum dikapalkan kembali, maka semakin banyaklah tenaga pekerja khusus yang dibutuhkan untuk menangani jasa – jasa itu.

Apabila kondisi lokal setempat memungkinkan, biasanya pada titik pertemuan rute transportasi yang berlainan jenis itu bisa menjadi satu lokasi yang strategis untuk pusat perdagangan dan atau perindustrian, terutama karena popu-

lasinya yang semakin berkembang itu dapat membuat lokasi itu wilayah median.

Selain daripada populasi yang secara langsung terlibat dalam bongkar muat dan perpacking komoditi secara langsung, juga dibutuhkan orang-orang dari profesional lainnya, seperti pewarung, guru-guru dan pemberi jasa-jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di tempat itu. Dengan demikian ternyatalah, bahwa kebanyakan kota-kota yang menempati lokasi pada titik perhentian dan pertemuan rute transportasi mudah bertumbuh dan berkembang, sedangkan kota-kota lainnya tetap seperti sediakala.

Kondisi Fisik Lokasi Kota-kota

Disamping pengaruh rute transportasi, maka faktor-faktor yang berhubungan dengan lokasi fisik setempat, juga dapat menentukan secara tepat, dimana satu kota bisa lebih cepat berkembang.

Jika satu pelabuhan samudera dapat dicapai dengan mudahnya, melalui garis rute kereta api, maka semua bagian dari pinggir pantai seluas 50 mil dari satu pelabuhan tunggal, yang airnya cukup dalam, merupakan satu lokasi yang mempunyai prospek besar menjadi satu kota pelabuhan yang cepat pertumbuhannya.

Selanjutnya, jika satu lokasi kota sering dilanda banjir yang destruktif, sedangkan lokasi lainnya lebih kurang mengalami ancaman semacam itu, maka sudah barang tentu lokasi yang ideal bagi satu kota ialah pada lokasi yang pertama.

Demikian juga, jika satu lokasi terdiri dari areal tanag

dataran yang luas, sedangkan lokasi lainnya berbukit dan miring topografinya, maka suatu kota perdagangan akan lebih tepat jika menempati lokasi yang pertama tadi.

Kondisi – kondisi fisik lokasi sebagaimana dikemukakan diatas bisa dijumpai secara umum dan secara local dimana-mana. Jadi disamping prinsip-prinsip umum, seperti lokasi median, biaya minimum dan pengaruh rute transportasi, juga faktor-faktor fisik dan kondisi lokasi dapat menentukan lebih tepat, dimana satu kota dalam satu wilayah tertentu dengan baik.

Adapun pengaruh lokasi fisik lokasi tersebut sudah barang tentu harus disinkronisasikan dengan prinsip biaya minimum, lokasi median dan pertemuan rute transportasi yang beroperasi secara local, dimana biaya dapat ditekan lebih rendah, dimana lokasi median yang efektif dan dimana garis rute transportasi akan bertemu dalam satu kawasan wilayah kota itu.

D.Pengaruh –Pengaruh yang Bertentangan Dengan Lokasi

Meskipun telah dikemukakan bagaimana pengaruh lokasi yang ideal bagi pengembangan satu kota, tetapi tidak dapat dimungkiri adanya beberapa kota yang mempunyai kecenderungan tidak dapat bertumbuh dan berkembang pada lokasi tertentu untuk jangka panjang, apdahal lokasinya cukup strategis. Hal semacam ini disebabkan oleh karena disamping pertimbangan efisiensi, masih saja terdapat kemungkinan adanya pengaruh lain, yang tidak rasional, yang ikut memegang peranannya, sehingga kota-kota itu tak mampu memperkembangkan dirinya secara wajar, antara lain :

(a) Tidak mengetahui dan salah perhitungan

Salah satu pengaruh terpenting yang merupakan tantangan dalam hal ini adanya faktor tidak mengetahui dan salah hitung. Faktor tidak mengerti dan salah hitung dari warga kota tentang lokasi yang baik dan lebih efisien guna membangun rumah-rumah kediaman, toko-toko, pabrik-pabrik maupun kantor-kantor jasa, sehingga mereka membangun sesukanya secara tidak sadar pada lokasi yang keliru. Padahal, jika sekali fasilitas membangun itu akan bertahan, hal mana bisa mengundang orang-orang lain untuk membuat kekeliruan yang sama, pada lokasi yang terlanjur dibangun secara keliru itu.

(b) Memuaskan keinginan sendiri

Pengaruh kedua yang merupakan tantangan ialah adanya kenyataan, bahwa setiap warga kota selalu berjuang untuk memuaskan keinginannya sendiri, meskipun lokasi yang diinginkan itu bisa berbeda dengan perencanaan kota, misalnya seorang yang ingin bertempat tinggal dengan sanak keluarganya dan sekaligus membangun satu pabrik didekatnya, meskipun tempat itu tidak efisien secara ekonomis, dibandingkan dengan tempat lainnya.

(c) Pengawasan yang melanggar efisiensi

Rangkaian ketiga dari pengaruh-pengaruh yang kontradiktif itu bersumber dari kenyataan, bahwa ada pejabat-pejabat kotamadya yang dengan sengaja mengawasi sikap-sikap penduduk kota, meskipun hal semacam itu bertentangan dengan prinsip efisiensi, misalnya melalui system perpajakan, pembagian kawasan/ daerah, dan pembatasan lainnya misalnya melarang dibangunnya pabrik-pabrik, toko-toko dan kan-

tor-kantor jasa tertentu pada lokasi yang efisien, atau dipromosikannya pabrik dari satu perusahaan tertentu yang justru tidak memiliki prospek baik.

Dalam berbagai cara yang dikemukakan diatas nyatalah, bahwa penduduk kota sering suka melawan hukum alam, baik secara phisik, maupun secara biologis dan sosial, karena terdorong oleh pemikiran yang kurang efisien, sebagai akibat adanya pola pemilikan penyesuaian baik disengaja maupun tidak disadari akibatnya.

Namun demikian tidaklah dapat disangkal, bahwa pada umumnya terdapat lebih banyak penduduk kota yang cenderung untuk bekerja secara rasional dan tidak menentang hukum alam, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakanw aktu, usaha dan risiko yang seminimal mungkin.

Jadi meskipun ada pengaruh-pengaruh yang kontradiktif yang beroperasi secara tidak sadar untuk jangka panjang, namun tidaklah dapat diabaikan adanya generalisasi, bahwa pada umumnya kota-kota cenderung untuk melokasi, bertumbuh dan berkembang dimana saja mereka dapat mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi spesialisasinya secara lebih efisien dan lebih berdayaguna.

Komparasi ukuran kota-kota

Untuk memperoleh informasi tentang komparasi ukuran (*size*) kota-kota, ada 2 macam pertanyaan dapat diketengahkan, yang jawabannya mungkin bisa memberikan pengertian yang lebih baik dalam hal tersebut. Pertama, mengapa kota-kota terbesar dari sosiotas (masyarakat) atau dari satu

periode sejarah melampaui pertumbuhan kota-kota lainnya, misalnya mengapa kota-kota modern New York dan Chicago jauh lebih besar dari pada Kota Kuno Athena dan Kota Abad Pertengahan Paris? Kedua, mengapa didalam satu periode sejarah atau societies (masyarakat) yang sama, perkembangan satu kota dapat melampaui pertumbuhan kota-kota lainnya, misalnya mengapa Jakarta dan Surabaya bisa lebih besar daripada kota – kota Yogyakarta atau Kediri?

(1) Kota-kota Periode sejarah dan Societas yang Berbeda

Adanya pertumbuhan kota-kota yang tidak sama didalam periode sejarah dan masyarakat yang berbeda, disebabkan oleh karena adanya beberapa pengaruh yang bervariasi. Ada beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap kurangnya kota-kota abad pertengahan di Eropa yang bertumbuh, disbanding dengan kota-kota modern dewasa ini di Amerika Serikat, seperti peningkatan dalam sector pertanian, transportasi dan komunikasi, pengembangan sector industry dan pemeliharaan kesehatan.

a. *Peningkatan dalam Sektor pertanian*

Selama kota-kota masih tergantung pada hasil produksi pertanian untuk bahan makanan dan pakaian, maka jumlah populasi kota-kota itu akan dibatasi oleh adanya efisiensi di sector pertanian, demikian juga ukuran perkembangan kota-kota itu sendiri.

Tidak adanya efisiensi produksi pertanian pada kalangan bangsawan (*landlord*) di zaman pertengahan di Eropa, tidak memungkinkan tumbuhnya kota-kota besar pada zaman itu. Petani budah masa itu bekerja dengan pembatasan adat istiadat dan keterbekalangan teknologi, sesuai dengan system

feedal, mengakibatkan para petani itu hanya memproduksi, maupun untuk bagian tuan tanah, menjadi tidak terkumpulnya populasi kota secara besar-besaran, sebagaimana yang terjadi di kota modern London dan New York dewasa ini.

Setelah abad pertengahan efisiensi di sector pertanian makin bertambah melalui system mekanisme yang ekstensif, penyebar luasan penggunaan pupuk, system pembajakan tanah yang lebih baik, dan peningkatan penyediaan bibit unggul, menyebabkan terjadi produksi pertanian secara besar-besaran. Adanya peningkatan di bidang pertanian ini menyebabkan salah faktor yang mendorong terjadi perkembangan kota yang pesat akhir-akhir ini.

b. *Peningkatan Sektor Transportasi dan Komunikasi*

Pada abad pertengahan masyarakat masih terisolasi secara lokal dan swasembada, transportasi pengangkutan komoditi pertanian masih sangat sederhana dan lamban serta mahal. Nanti setelah sebagian besar berbagai bagian daratan telah dapat dihubungkan dan dipersatukan oleh sarana transportasi dan komunikasi barulah timbul dan tumbuh kota-kota metropolitan.

Dengan adanya fasilitas sarana transportasi yang memungkinkan manusia bisa memindahkan volume besar komoditi melalui jarak yang panjang, maka bermunculanlah sejumlah pedagang spesialisasi dalam berbagai jenis komodi dan jasa. Dengan adanya system transportasi yang efisien, mulailah pula dikembangkan perakitan (*assembling*) pada pabrik yang besar-besaran dengan menggunakan bahan baku dan pekerja secara besar-besaran pula.

c. *Perubahan dalam Manufaktur*

Revolusi perpabrikasi yang ditunjang oleh system mekanisasi dan elektrifikasi memungkinkan pengembangan bermacam macam logam dan kadar campurannya, berhasil menciptakan konstruksi mesin-mesin ukuran besar dan lebih tepat, semakin menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota-kota, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan mesin-mesin ukuran besar modern yang digerakkan oleh tenaga listrik, selain memindahkan usaha industry kecil-kecil dari rumah-rumah, juga secara berangsur-angsur membangun konsentrasi pekerja-pekerja industry dalam jumlah yang semakin besar.

Perubahan yang terjadi dalam usaha perpabrikasi ini adalah sejalan dengan perubahan dalam sector transportasi dan pertambangan, mendukung timbulnya volume yang besar dalam sector perdagangan, baik local antar pulau maupun perdagangan internasional, merupakan basis utama pertumbuhan besar industry dan komersial dewasa ini, yang dikenal dengan istilah kota metropolitan.

d. *Kemajuan Sektor Kesehatan dan Sanitasi*

Pembinaan dan pembangunan sector kesehatan dan sanitasi juga merupakan dorongan, baik langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan kota-kota. Kemajuan dalam bidang kesehatan yang telah mampu memberantas bermacam-macam penyakit, sejalan dengan berkembangnya praktek-praktek secara medis dan pembedahan menyebabkan turunnya tingkat kematian secara drastic, sehingga penduduk dunia bertambah lebih pesat lagi.

Populasi yang semakin meningkat ini adalah sumber utama timbul dan tumbuhnya kota-kota yang lebih banyak dan

lebih besar. Jadi secara langsung, pembinaan kesehatan masyarakat dan sanitasi, menciptakan lingkungan satu kota menjadi tempat kediaman yang lebih baik dan karenanya banyak orang pindah ke kota-kota.

Perbedaan Ukuran kota-kota

Timbulnya perbedaan dalam ukuran kota-kota dewasa ini dalam suatu Negara atau masyarakat, sudah barang tentu disebabkan oleh faktor-faktor dan prinsip-prinsip yang berbeda, dengan terjadinya perbedaan pertumbuhan kota-kota dalam suatu periode sejarah dan masyarakat yang berlainan. Dalam hubungan ini ada 3 faktor yang dapat diketengahkan dalam pembahasan tentang perbedaan ukuran kota-kota tersebut, yakni :

- (1) Jumlah dan ukuran jasa spesialisasi yang diberikan
- (2) Kompetisi dengan kota-kota lainnya dan
- (3) Posisi dalam hirarki fungsional diantara kota-kota itu

(1) Jumlah dan Ukuran Jasa Spesialisasi

Pertama-tama perlu ditekankan, bahwa eksistensi dan pertumbuhan kota-kota besar dewasa ini tidaklah dapat dipisahkan dari adanya jasa-jasa spesialisasi yang dibinanya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa setiap penambahan daftar komoditi yang dikumpulkan dan atau didistribusikan melalui satu kota, maka semakin meningkat pula jumlah penghasilan para pekerja di bidang komersial dalam kota itu. Demikian juga, setiap lembaga pendidikan baru, kantor pemerintahan atau kantor professional baru yang dibuka dalam satu kota, semakin meningkatkan pula jumlah

penghuni kota, seterusnya setiap pabrik baru yang beroperasi di atau dekat satu kota, akan semakin meningkat jumlah populasi kota itu.

Nyatalah bahwa peningkatan volume, jumlah dan jenis jasa-jasa spesialisasi yang diselenggarakan dalam satu kota akan semakin meningkatkan pula jumlah populasi kota itu. Adanya ekspansi dan pengembangan jasa-jasa spesialisasi dalam suatu kota juga tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

a) *Peningkatan jumlah populasi yang dilayani*

Jumlah populasi dalam kota yang semakin meningkat, dapat menciptakan volume penawaran jasa-jasa yang lebih besar pula. Adanya pengembangan dalam volume jasa-jasa ini bisa dating dari penduduk kota itu sendiri, dan pertumbuhan populasi daerah sekitarnya (pedalaman), ekspansi perbelanjaan dari wilayah tetangga, atau perkembangan wilayah pasaran luar negeri.

b) *Peningkatan Taraf Hidup Penduduk pedalaman*

Meningkatnya pendapatan para petani di pedalaman satu kota, karena meningkatnya hasil produksi mereka yang dijual ke kota-kota dengan sendirinya akan meningkatkan pula daya beli mereka untuk memberi barang dan jasa-jasa dari kota itu.

c) *Peningkatan Layanan transportasi*

Sarana transportasi yang lebih baik dan rute yang tetap dan teratur menyebabkan satu kota lebih mudah dicapai, baik dalam perjalanan dan antar kota, maupun dari luar negeri, juga dapat menciptakan jasa-jasa khusus yang menjadi spesialisasinya. Segala sesuatu usaha yang dapat meningkatkan volume dan jenis jasa-jasa dan kemakmuran bagi penduduk kota, atau usaha untuk mudah didekati, se-

makin meningkatkan pula jasa-jasa khusus yang terdapat dalam kota itu demikian juga populasi kota.

(2) Kompetisi dengan kota-kota lainnya

Pada umumnya setiap warga kota, pedagang, pengusaha, pemberi jasa dan penduduk professional lainnya, senantiasa mengadakan persaingan dengan rekan-rekan mereka dari kota-kota lain dalam usaha mencari langganan dan relasi. Oleh karena itu ukuran dan besarnya 2 kota dalam usia yang relative sama, sebagian besar tergantung pada kemampuan mereka untuk mencari sukses dalam perjuangan persaingan semacam itu.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan satu kota memperoleh sukses dalam menarik minat langganan potensial ke kota itu, yang perlu mendapat perhatian yang saksama, antara lain :

Setiap orang bersedia kemana saja untuk berbelanja, dimana dia dapat memperoleh apa yang diinginya dengan lebih mudah dan lebih mudah.

Dalam menentukan pilihan kekota mana seorang itu akan berbelanja, dia akan mempertimbangkan antara lain : jarak ruang, waktu biaya dan kesenangan transportasi, jumlah dan variasi jasa yang dibutuhkannya, harga dan kualitas barang dan jasa-jasa serta dimana ia dapat mengadakan seleksi dengan sebaik-baiknya.

Apabila terdapat pengaruh dan daya tarik yang bersamaan, diberikan oleh beberapa kota, maka setiap langganan potensial akan lebih senggapan untuk pergi ke suatu kota yang lebih dekat, mudah dan murah. Jadi disini lokasi ruang, pelay-

anan dan kesenangan turut mempengaruhi kekuatan kompetitif dari satu kota.

(3) Posisi Hierarki Fungsional diantara Kota-kota

Posisi hirarki secara fungsional diantara kota-kota dalam satu Negara atau provinsi, juga mempengaruhi pengembangan dan pertumbuhan satu kota misalnya kota yang ditetapkan sebagai Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Kabupaten sudah barang akan berkembang sesuai dengan fungsi spesialisasi yang diembannya itu. Demikian juga kota-kota pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pelabuhan samudera, pelabuhan ekspor, pelabuhan perintis dan lain-lain

BAB IV

POLA RUANG INTERN KOTA-KOTA

A. Pendahuluan

Apabila seorang ilmuwan (*scientist*) menggunakan sebuah teleskop, yang kuat untuk mempelajari kota-kota di Amerika Serikat, maka dia akan mencatat beberapa persamaan pola ruang yang sangat menarik daripada kota-kota itu.

Pada setiap kota metropolis industri komersial, terdapat satu kelompok bangunan pencakar langit dimana-manak di sekitar pusat-pusat kota, lalu sesudah itu diluarnya terdapat kelompok bangunan tinggi, tetapi tidak setinggi bangunan pencakar langit tadi dan lebih serta lebih besar daripada bangunan diluarnya. Kemudian barulah terdapat wilayah-wilayah yang lebar-lebar dengan bangunan-bangunan yang lebih kecil, disekeliling kelompok bangunan tersebut.

Pada beberapa bagian kawasan kota, terdapat bangunan-bangunan yang begitu padat berdempetan satu sama lain, sehingga tanah pekarangan disekitarnya tidak kelihatan, kecuali disepanjang jalan-jalan. Sedangkan pada kawasan lainnya,

terdapat bangunan-bangunan rumah, yang terpisah dari tetangganya, dengan pekarangan yang lebar-lebaran, dibandingkan dengan luas bangunan itu sendiri.

Apabila diobservasi keadaan jalan-jalan dengan lalu-lintas bersimpan siur, dapatlah diketumkan, bahwa kebanyakan jalan-jalan tersebut tetap ramai sepanjang hari dan dimalam hari, namun ada juga sebagian yang tidak begitu intensif lalu-lintasnya pada jam-jam tertentu. Garis-garis lalu lintas yang paling padat ialah sekitar kelompok bangunan-bangunan besar di pusat kota dan sekitarnya.

Keadaan semacam ini dengan persamaan-persamaan lainnya yang dapat diobservasi, merupakan gambaran tentang eksistensi pola ruang yang teratur dan mantap dalam kota-kota tertentu.

Meskipun kota-kota itu dapat berbeda dalam beberapa hal yang penting, menyangkut ruang lingkup penyebaran bangunan-bangunannya, namun mereka tetap memamerkan suatu struktur pola ruang yang tipikal. Tipikal disini tidaklah sama artinya dengan identical, yang berarti sama atau serupa.

Kota-kota pada umumnya mempunyai pola jalanan dan juga penempatan dan luas kawasan untuk industri, perdagangan dan tempat kediamannya yang berbeda satu sama lain, namun demikian hampir semua kota-kota industry komersial dewasa ini mempunyai struktur ruang yang pada hakekatnya sama.

B.Lokasi Jasa-Jasa Komersial Dalam Kota

Di dalam satu kota terdapat kawasan yang berbeda antar : Lokasi ruangan industry, perdagangan dan tempat pemu-

kiman. Setiap kawasan tersebut dibagi lagi dalam daerah-daerah dan bagian-bagiannya sesuai dengan perencanaan kota itu sendiri.

Pada bab ini pertama-tama akan dibahas tentang pola ruang kawasan perdagangan dan industri. Pada bab berikutnya barulah dibicarakan mengenai pola ruang untuk tempat kediaman.

Setiap toko dan kantor jasa-jasa hanya dapat melayani para langganan secara lebih efisien, apabila ini dapat menempati lokasi tertentu yang strategis bagi usahanya itu. Oleh karena itulah, maka setiap badan usaha senantiasa berusaha untuk menempati lokasi yang memiliki daya kompetitif yang menguntungkan baginya.

Berbagai jenis komersial, sesuai dengan variasi jasa-jasa spesialisasinya, secara berturut-turut melokasi mulai dari pusat kota pada jantung kawasan perdagangan, lalu pada luar dari pusat perdagangan itu, seterusnya dekat dan sekitar terminal kereta api atau stasiun bus umum, kemudian disepanjang garis-garis transportasi dalam berbagai bagi wilayah kota.

Perbedaan Kelas Jasa-Jasa Komersial

Pemasaran barang dan jasa komersial senantiasa berbeda-beda lokasi lokasi idealnya, sesuai dengan aneka macam jenis dan bentuknya masing-masing. Setiap tipe dan jenis barang atau jasa-jasa komersial mempunyai dispensasi, jumlah dan pembayaran langganan potensial sendiri-sendiri.

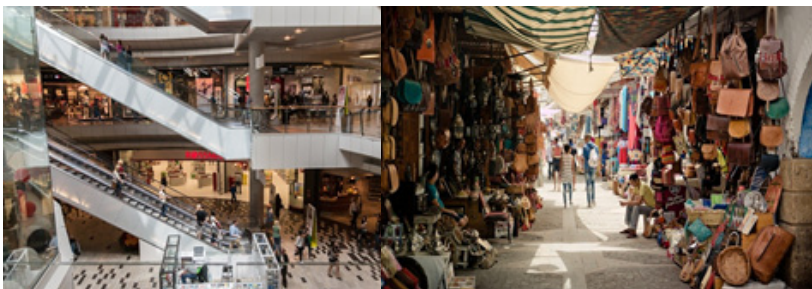
Tempat-tempat pemasaran barang-barang dan jasa-jasa komersial dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu (1) tempat untuk menjual komoditi yang bersifat material, dise-

but toko dan (2) tempat untuk memberi jasa-jasa komersial, disebut kantor, namun pembagian tersebut tidak bisa dipakai secara tetap (*consistent*), karena bias terjadi kombinasi, misalnya sebuah toko pakaian, juga memberikan jasa membuat pakaian, atau sebuah usaha pemegang kas rambut yang menjual minyak rambut.

Ada beberapa toko pengecer yang menjual secara langsung ke pada consumer (pemakai), tetapi ada juga toko yang menjual secara leperan kepada pedagang eceran, bukan kepada para consumer.

Adapun toko-toko pengecer itu dapat lagi dibagi sesuai dengan jenis barang yang dijualnya, yang pada umumnya dapat didasarkan kepada pedagang eceran, bukan kepada para consumer.

Adapun toko-toko pengecer itu dapat lagi diberi sesuai dengan jenis barang yang dijualnya, yang pada umumnya dapat di dasarkan pada ukuran dan harga barang dagangannya, tingkat-tingkat standarisasi dan fokwensi penjualannya. Kriteria tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi yang sesuai dengan jenis toko-toko tersebut.



Gambar 6. Pusat Pertokoan dan perbelanjaan di perkotaan
<https://pixabay.com/id/photos/tangga-pusat-perbelanjaan-toko-906720/>

_____ Berdasarkan penggolongan tersebut diatas, maka barang yang dijual langsung kepada consumer itu dapat dibedakan atas barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang kelontongan dan barang-barang laka (mewah).

(a) *Toko Pengecer Kebutuhan Sehari-hari*

Yang dimaksud dengan kebutuhan sehari-hari ialah barang-barang yang dikonsumsi setiap hari oleh para konsumen pada umumnya, meliputi komoditi bahan makanan dan minuman, rokok, surat kabar alat-alat kecantikan, dan lain-lain. Yang berlokasi dalam didaerah simpanagn jalan.

Untuk membeli barang-barang semacam itu para langganan biasanya membeli secara berulang-ulang dalam unit yang kecil. Barang-barang kebutuhan sehari-hari umumnya harga baku (standar) dan kualitas yang sama secara menyeluruh, sehingga para pembeli yang membutuhkanya tidak perlu pergi jauh-jauh berbelanja dan melakukan pilihan.

Toko-toko yang menjual barang-barang itu tidak perlu memiliki persediaan yang besar, cukup melakukan operasinya dengan supply yang terbatas dalam rak-rak tokonya. Biasanya pedagang leperan mensupply mereka barang-barang kebutuhan sehari-hari pada umumnya tergolong dalam pedagang kecil eceran, kecuali di super market (pusat pertokoan).

(b) *Toko-toko Penjual Barang Kelontongan*

Barang-barang kelontongan ialah barang-barang kebutuhan masyarakat yang penggunaanya relative lama, mulai dari kancing, sampai kepada pakaian tertentu, pakaian jadi, setelan perabotan rumah tangga, sepatu dan lain-lain.

Barang-barang kelontongan umumnya mempunyai jenis, kualitas dan harga yang berbeda-beda, sehingga mengundang para pembeli untuk mengadakan komparasi pendahuluan dengan cara berbelanja keliling untuk memilih barang yang akan dibelinya. Jika banding dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari tidak banyak yang membeli barang kelontongan itu, karena harganya cukup tinggi dan bervariasi, sehingga pembeli perlu mengadakan komparasi yang seksama, dengan terlebih dahulu membuat daftar barang-barang yang dibutuhkannya, sebelum melakukan perjalanan ke pusat pertokoan.

Pedagang kelontong karena itu perlu menyediakan lebih banyak macam ragam dan variasi barang-barang yang dipanjangkannya guna minat para langganan untuk melakukan pilihan secara bebas. Presentase keuntungan yang di tarik biasanya tinggi, karena omzet penjualan tidak terlalu besar. Pada umumnya secara individual took-toko kelontongan lebih besar dalam ukuran dan melokasi secara mengelompok satu sama lain, sehingga menciptakan serangkaian variasi pemilihan yang tempat cukup menarik bagi para pembeli.

(c) *Toko-toko Penjual Barang Mewah (Lux)*

Pada umumnya barang-barang luks itu memberikan standardisasi jenis, kualitas dan harga yang paling kecil. Biasanya barang-barang mewah itu tunggal, tidak berbilang dan berbeda dalam bentuk atau ukuran. Barang-barang itu merupakan barang-barang antic dengan ukiran-ukiran yang berharga, seperti misalnya permata yang berkualitas tinggi, topi-topi model asli, gaun-gaun wanita yang serba

mahal dan gemerlapan, peralatan oleh raga yang jarang dipakai dan barang-barang antik lainnya.

(d) *Toko-toko Kantor-kantor Jasa-jasa Komersial*

Toko-toko dan kantor yang hanya memberikan jasa-jasa tertentu juga dapat dibedakan satu sama lain dalam jenis spesialisasinya. Salah satu basis klasifikasi yang dapat digunakan untuk membedakannya ialah : pertama, yang memberikan jasa-jasa kepada manusia itu sendiri, seperti : tukang cukur rambut, salon kecantikan, dokter, tukang pijat, dsb : kedua, yang memberikan jasa-jasa kepada milik manusia, seperti ; tukang sepatu, tukang menatu, tukang pipa, tukang menjahit pakaian, dsb.

Jasa-jasa tersebut juga berbeda-beda dalam harga dan frekwensi penggunaannya, misalnya : tukang cukur versus dokter, menatu versus tukang cet, pengacara versus tukang pijat, dsb. Juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat spesialisasi yang di lakukannya, misalnya : dokter umum dengan dokter spesialis otak, pengacara dengan pokrol bamboo, dsbnya.

Toko-toko dan kantor-kantor jasa-jasa komersial adalah sama halnya dengan toko-toko biasa, keduanya tergantung pada lokasi yang edisien, pada jenis dan volume jasa-jasa spesialisasi yang diberikannya dan pada distribusi ruang dari tempat tinggal langganan potensialnya.

Salah satu kesulitan yang di jumpai dalam membuat klasifikasi yang memuaskan tentang took-toko dan kantor-kantor jasa-jasa ini, terletak pada kenyataan, bahwa ada jasa-jasa ini terletak pada kenyataan,

bahwa ada jasa-jasa bentuk baru yang senantiasa timbul, demikian juga praktek-praktek perdagangan baru misalnya supermarket dengan system menolong diri sendiri dalam berbelanja yang berbeda dengan system took-toko tradisional.

Demikian juga halnya dengan bioskop-bioskop dan restaurant-restaurant yang mengembangkan usahanya dengan jalan menyediakan tempat-tempat parkir kendaraan, sehingga lebih memudahkan dan lebih menyenangkan bagi pengunjung-pengunjung yang memakai mobil pribadi.

C.Beberapa Prinsip Penempatan Lokasi

Didalam satu Negara yang menganut system ekonomi yang kompetitif (bersaing), seorang saudagar tidak akan hanya memikirkan cara-cara memajukan usahanya semata, oleh karena keuntungan yang akan diperolehnya sebenarnya tergantung pada langganan-langganannya. Oleh sebab itu maka mau tidak mau dia harus mencari lokasi, dimana dia bisa menarik perhatian dan minat para langganan sebanyak mungkin, sesuai dengan kemungkinan kemampuannya.

Di samping itu dia harus mempertimbangkan beberapa factor mengenai lokasi yang dipilihnya, misalnya perbedaan bunga uang atau harga pembelian areal lokasi itu, kemudian kualitas dan volume perdagangan yang mungkin dilakukannya di setiap tempat.

Sesuai dengan prinsip Biaya Minimum, maka dia harus mencari lokasi, dimana dia bisa menarik pengembalian netto tertinggi dari investasi modal yang ditanamnya, baik ditinjau dari segi waktu maupun dari ekonomi keuangannya. Adapun

lokasi yang sesuai dengan prinsip Biaya Minimum adalah tergantung pada a) Median langganan potensial, dan b) Lokasi toko-toko sejenis yang merupakan saingannya.

Kemudian daripada itu, sesuai dengan Prinsip Lokasi Median, maka lokasi yang dipilihnya itu hendaknya terletak pada median atau ditengah-tengah langganan potensialnya. Lokasi median semacam itu akan sangat menyenangkan bagi para langganannya, sehingga dia akan mampu bersaing dengan pedagan-pedagang lainnya.

Begitu juga halnya, dalam system ekonomi yang kompetitif, langganan akan selalu memilih toko-toko ke mana mereka berbelanja, dengan memperhitungkan harga yang diberikan, kualitas barang dan jasa-jasa yang akan diperolehnya, kemudahan mencapai toko itu dan pelayanan ditoko tersebut.

Jadi jika seandainya ada terdapat 2 atau lebih toko yang menawarkan harga dan pelayanan yang sama baiknya, maka para langganan potensial itu akan lebih suka berlangganan pada toko-toko yang menempati lokasi yang lebih baik dan lebih dekat kepada mereka itu.

Lokasi untuk Pabrik-Pabrik (Industri)

Untuk menentukan lokasi dimana satu pabrik sebaiknya ditempatkan dalam satu kota, biaya pengusaha lebih mementingkan masalah biaya yang akan dikeluarkannya dan tidak terlalu pusing dengan kepuasan langganannya, yang membeli produksinya melalui toko-toko.

Oleh sebab itulah maka pabrik-pabrik lebih cenderung untuk menempati lokasi, dimana dia dapat melakukan assembling atau merakit semua factor-faktor yang dibutuhkan untuk

memproduksi barang jadi, dengan biaya seminimal mungkin, dan dimana dapat diproduksi yang tak terpakai, serta mudah mengapalkan barang-barang jadinya kepadar luar negri dan antara pulau.

Jadi yang terpenting bagi suatu pabrik dalam memilih lokasi ialah menggunakan prinsip biaya miimum dan lokasi median untuk penyediaan bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja dan pemasaran hasil produksinya

Faktor-faktor yang harus diperhatikan

Penyediaan tenaga kerja, biasanya tidaklah masuk dalam memilih lokasi untuk satu pabrik di dlam satu kota tunggal, sebab pad aumunya para pekerja itu sendiri yang membayar biata transportasinya ked an dari pabrik, demikian juga gaji atau upah pekerja itu pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang berarti, dari satu tempat kediaman ke tempat kediaman lainnya .

Demikian juga halnya, setiap unit bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi, harganya hampir sama di semua bagian dari kota itu, kecuali sewa kendaraan yang agak berbeda. Adapun faktor produksi lainnya, seperti unit bahan baku seperti air, bahan bakar, tenaga kerja modal tidaklah berbeda di bagian manapun dari kota tunggal itu.

Namun demikian, ada faktor-faktor tertentu yang dibutuhkan oleh suatu industri yang mempunyai perbedaan yang penting, baik dalm harganya, maupun kemungkinannya, antara satu bagian kota sengan bagian kota lainnya, perbedaan mana dapat mempengaruhi penempatan lokasi pabrik dalam batasan-batasan lingkungan kota besar.

Salah satu faktor yang paling penting, yang sangat berbeda dalam harga, dari mulai ribuan sampai dengan ratusan ribu rupiah per meter persegi, yaitu harga tanah. Tanah adalah merupakan salah satu faktor penting bukan saja bagi lokasi suatu pabrik, tetapi juga bagi kemungkinan tempat untuk penyimpanan stok-stok bahan baku dan hasil produksi jadi, begitu juga untuk pembuangan air dan barang-barang tak terpakai lainnya.

Dibawah ini kondisi tertentu, pekerja-pekerja bias meningkat dan lebih siap pada lokasi tertentu, jika dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya, hal mana bias mempengaruhi lokasi pabrik yang tergantung pada waktu-waktu kerja karyawannya. Oleh sebab itu dalam kota besar, kotamadya-kotamadya bersaing memberikan ikatan khusus, seperti pembebasan pajak bagi pabrik yang melokasi dalam batas-batas wilayah kekuasaannya.

D.Lokasi Khusus Untuk Industri

Meskipun bangunan pabrik-pabrik bisa berlokasi dimana saja dalam suatu kota, sesuai dengan perencanaan kota itu, namun ada 3 lokasi khusus yang istimewa dan dianggap sebagai lokasi yang paling ideal. Kawasan sekitar pinggiran kota, lokasi sentral dekat pertokoan, dan lokasi median pada terminal kereta api atau stasiun bus umum atau sepanjang garis transportasi yang berat. Selain itu ada juga pabrik yang melokasi pada bagian luar dari daerah kota metropolitan.

a. Kawasan Industri Sekitar Batas Kota

Ada beberapa bangunan pabrik yang melokasi di kawasan pinggiran kota, bahkan ada diantaranya yang melokasi

beberapa kilometer di luar batas kota. Pabrik pabrik semacam itu umumnya berukuran besar dan memiliki sifat-sifat kombinasi karena membutuhkan areal tanah yang cukup luas tidak dapat menggunakan bentuk bangunan yang ada di jantung kota membutuhkan konstruksi bangunan khusus tersendiri membutuhkan bahan bakar bahan baku dan sehingga membutuhkan hubungan dengan system transportasi yang berat dan efisien, produksinya tidak lekas rusak sehingga jarak ke pasar tidak begitu penting, menguasai tenaga kerja yang tidak terpengaruh oleh musiman.

Juga ada beberapa dari pabrik semacam itu yang mengandung gangguan polusi, pencemaran, berbau, bisingan, berbahaya dan memerlukan tempat pembuangan bahan-bahan tidak terpakai lagi.

Meskipun tidak semua industri yang melokasi di pinggiran kota memamerkan karakteristik seperti tersebut diatas namun mereka itu umumnya memiliki sebagian daripada tipe industri tertentu yang disebabkan mereka memilih lokasi pinggiran kota.

b. Industri yang Melokasi Secara Sentral

Ada beberapa bangunan industri yang bias menggunakan tanah secara intensif di pusat pertokoan, misalnya industri-industri yang menempati bangunan khusus bertingkat, atau yang hanya membutuhkan ruang terbatas bagi setiap pekerjanya. Industri-industri semacam itu berusaha menempati tanah yang relatif mahal harganya, dekat dengan daerah pusat pertokoan, jika ada pertimbangan lainnya yang membuat lokasi itu layak bagi usahanya.

Ada beberapa industri yang membuat kontrak produk-

sinya secara besar pada musim tertentu. Industri semacam itu berubah memperoleh ruang tambahan, dimana ia dapat mengembangkan usahanya pada saat banyak permintaan. Karena itu mereka melokasi pada pusat kota, agar bisa membuat perjanjian dengan tenaga kerja musiman pada lokasi sentral tersebut.

Industri yang melokasi secara sentral lainnya, karena memerlukan hubungan dekat dengan pasar, guna dapat menjual produksinya yang lekas membusuk. Demikian juga industri yang melayani industri lainnya pada daerah pertokoan, juga cenderung memilih lokasi dekat langganan potensialnya itu.

Adapun industri lainnya, misalnya industri yang memproduksi permata, instrument teknis, alat kecantikan, rokok dan perabot khusus, juga melokasi pada pusat kota, karena di tempat itu biaya operasinya bisa ditekan serendah mungkin.

c. Lokasi Sepanjang Garis Transportasi

Ada beberapa industri yang melokasi sepanjang garis rute transportasi berat yang datang dari pedalaman ke jantung kota, yang lain lagi memilih lokasi pada titik perhentian rute transportasi. Industri semacam itu terutama yang termasuk kelompok industri ukuran menengah, (1) yang menggunakan jumlah bahan baku dan tanah yang sedang (2) dan mengapalkan produksinya dalam volume dan kualitas yang moderat saja. Tanah disepanjang tempat itu harganya murah, (3) oleh karena tidak cocok untuk perumahan dan toko-toko yang layak.

Dengan melokasi sepanjang garis transportasi, (4) maka industri-industri itu bisa menghemat biaya transportasi bahan-bahan baku dan barang-barang jadinya.

Selanjutnya ada beberapa industri besar yang bisa memperoleh keuntungan dengan menggunakan 2 atau lebih lokasi dalam satu kota, misalnya kantor administrasi dan personalianya diberlokasi dipusat perdagangan, bangunan pabrik induknya dipinggiran kota, fasilitas gudang dan kantor perkapalannya dekat pelabuhan, sedangkan laboratoriumnya bisa dimana saja.

Pada umumnya, jika satu usaha industry yang begitu besar, melakukan berbagai macam aktivitas, yang terpisah secara ruang, maka untuk efiseinsi semaksimal mungkin, adalah menguntungkan bagi perusahaan itu, jika ia menggunakan lokasi kegiatan yang saling berbeda intensitas tanah yang dibutuhkannya.

BAB V

KAWASAN TEMPAT KEDIAMAN

A. Pendahuluan

Disamping kawasan Perdagangan dan kawasan Industri, dalam satu kota modern juga terdapat Kawasan Tempat Kediaman atau pemukiman penduduk kota, yang terdapat dalam beberapa daerah dan daerah-daerah bagian, sesuai dengan bentuk dan variable dari bangunan perumahan penduduk setempat.

Pada umumnya di kota itu terdapat variasi tempat-tempat kediaman, misalnya ada gubuk-gubuk dan pondok-pondok kualitas rendah ada bangunan rumah-rumah sedang besar dan bagus-bagus. Disamping itu ada apartment besar dengan sewa yang cukup tinggi, disampaikan itu ada juga bagian perumahan yang dapat buat golongan rendah dan miskin, dan seterusnya.

Meskipun berbagai macam bentuk dan tingkat bangunan boleh dibangun berdampingan satu sama lain pada satu jalan, namun ternyata bahwa terdapat kelompokan rumah tempat tinggal dengan bentuk-bentuk istimewa sering menguasai daerah pada lokasi tertentu, yang menampakkan adanya perbedaan lokasi tempat-tempat kediaman, misalnya satu daerah bagian untuk sebuah country-club, untuk golongan bagian elite, melokasi pada satu lokasi kawasan dengan lapan-

gan yang luas dengan tempat kediaman yang mewah, lalu terdapat satu daerah bagian untuk perumahan keluarga-keluarga kecil, disamping satu daerah perumahan apartment, yang hampir seragam (monoton), lainnya daerah tempat tinggal untuk orang-orang miskin dan kotor (*slum-area*), dan seterusnya.

Penyebaran rumah-rumah tempat kediaman secara ruang, begitu juga distribusi daerah-daerah pemukiman dalam satu kota, tidak terjadi begitu saja secara topografis dan cultural, demi terciptanya pola ruang tempat kediaman yang layak, yang beberapa aspek dari padanya nampaknya berulang otomatis dari suatu kota-kota lainnya.

Rupanya anggapan dasar yang dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa penduduk kota dalam usaha penyesuaian mereka kepada alam sekitar dan orang lain, selalu berusaha mencari cara atau yang semudah mungkin, juga berlaku dalam usaha mereka membangun tempat-tempat kediaman dalam kota.

Pada umumnya, seseorang yang memilih lokasi tempat kediaman itu, akan berusaha memilih tingkat lokasi dianggapnya layak yang mampu diperolehnya sebagai nilai dan jumlah kepuasan dari satu rumah tempat kediaman. Jadi makin tinggi kemampuan dan daya beli seseorang, maka layak pula tingkat lokasi tempat kediaman, yang dipilihnya.

B. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Distribusi Ruang

Diantara sekian banyak hal yang, bias mempengaruhi penyebaran ruang-ruang tempat kediaman dalam kota, ada 6 hal yang menonjol, yang dapat diketengahkan dalam pempa-

hasan ini, yaitu :

(1) Persaingan (*competition*)

Setiap keluarga dari warga kota pada umumnya senantiasa mendambakan untuk memperoleh rumah yang layak dengan lokasi yang ideal baginya. Oleh sebab itu timbullah persaingan antara sesama warga kota, guna mencapai tujuannya itu, sesuai dengan kemampuan (tingkat) ekonomi mereka masing-masing.

(2) Milik Pribadi (*Private Ownership*)

Pemilikan secara pribadi satu persil kocil tanah, yang bias dikuasai sendiri, yang luasnya mulai dari puluhan sampai ratusan meter persegi, merupakan ciri khas satu kota yang tidak mempunyai perencanaan yang teratur. Setiap pemilik tanah berusaha menggunakan tanahnya seluas mungkin, yang dianggapnya layak bagi bangunannya, kecuali jika peraturan tidak mengizinkannya, sesuai dengan garis sempadan yang telah ditetapkan.

(3) Kepatutan yang Berbeda-beda

Pertimbangan-pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih satu lokasi yang dianggap layak, biasanya berbeda secara drastik untuk befungsi kategori penduduk kota itu sendiori, misalnya kesenangan di suatu lokasi, 1) Kenikmatan, 2) Kesunyian, 3) Nilai, Prestis, 4) Kontak sosial, dan lain-lain. Sebagai contoh : ada satu lokasi yang sangat menyenangkan bagi satu keluarga, tetapi sebaliknya tidak disenangi oleh keluarga lain; mungkin keluarga yang satu mempertimbangkannya dari segi kesunyian, sedangkan keluarga lain-

nya, dari segi kenikmatan hidup, atau dari segi prestise sosial.

(4) Topografi (*Topography*) Tanah

Keadaan tanah secara topografis, juga bisa mempengaruhi kepatutan satu lokasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sehubungan dengan kenikmatan hidup, 1) Ada orang yang suka tinggal dekat pantai, 2) Ada yang ingin hiloren/ bukit, 3) Ada yang mau dekat danau, dan lain-lain. Jadi keadaan topografi juga bisa berpengaruh terhadap kenikmatan hidup, lokasi yang disenangi dan kualitas bangunan yang diidamkan oleh seseorang warga kota.

(5) Transportasi (*Transportation*)

Fasilitas dan rute transportasi juga membawa pengaruh pada bermacam-macam aspek kehidupan yang layak dalam satu kota, karena hal itu bisa mempengaruhi 1) Waktu dan 2) Biaya perjalanan. Disamping itu bisa menimbulkan polusi, berupa kebisingan dan pencemaran lingkungan.

(6) Sejarah Kota (*City History*)

Demikian juga halnya dengan kondisi-kondisi terdahulu atau sejarah kota, biasanya ikut mempengaruhi distribusi tempat-tempat kediaman dewasa ini, baik menyangkut kelembagaan fasilitas-fasilitas yang ada, maupun karena masih terikatnya tetangga-tetangga tertentu pada nilai-nilai prestise, baik yang positif maupun yang negative.

C. Daerah Tempat Kediaman dan Kependudukan (Populasi)

Meskipun suatu kawasan atau daerah tempat pemukiman, telah mencakup bukan saja bangunan perumahan dimana manusia bertempat tinggal tetapi juga penduduk yang menempati rumah-rumah itu sendiri, nmaun dalam pembahasan ini akan dicoba untuk memberikan kriteria yang berbeda mengenai bentuk atau tipe bangunan rumah saja dengan tipe dari pada penduduk yang berdiam di suatu kawasan tertentu.

Batas-batas ruang daerah tempat kediaman dengan tipe bangunan tertentu, bisa dilihat secara nyata perbedaannya dengan bantas-batas daerah kependudukan khusus pula. Sebagai misal dapat dikemukakan keaneka ragam daerah tempat kediaman golongan elite dan tempat kediaman golongan orang-orang bisa dan orang-orang miskin.

Demikian juag halnya dengan daerah kependudukan yang bersambung tidak putus-putusnya, yang didiami oleh penduduk pribumi, menenagh, bisa meluas menjadi daerah tempat tinggal keluarga tunggal atau keluarga campuran (*multi families*).

Daerah Tempat Kediaman (Dwelling Areas)

Dalam membahas jenis dan corak daerah tempat kediaman dalam kota sudah barang tentu akan disinggung berbagai hal menyangkut kawasan itu, seperti : umur bangunan, keadaan perawatannya, perubahan dan perbaikannya, nilai penjualan atau sewa bangunan, dan keintensifan penggunaan tanahnya.

Karakteristik yang aneka ragam demikian itu tidaklah

mempunyai penyebaran yang identic dalam satu kota. Adakalanya terdapat bangunan-bangunan yang berbeda umurnya, tetapi mempunyai ukuran yang sama, demikian juga tingkat nilai ekonomisnya, tetapi kadang-kadang juga terdapat bangunan-bangunan yang sebaya usianya, tetapi berbeda ukuran dan nilai ekonomisnya.

Ada 3 macam karakteristik mengenai tempat kediaman yang bisa menyebabkan timbulnya kombinasi yang datang berulang kali dalam kawasan tempat tinggal, yakni : usia lokasi, ketidak teraturan penggunaan tanah dan nilai ekonomis lokasi.

(1) Usia Lokasi Tempat Kediaman

Pada sebagian besar kota-kota yang sedang berkembang ternyata, bahwa usia bangunannya semakin menurun, jika lokasinya semakin jauh jaraknya dari jantung kota. Umumnya ada lebih dari separuh tempat kediaman di pusat kota, telah berusia puluhan tahun, ada 50 tahun keatas, seperempatnya berusia antara 20 sampai 40 tahun dan selebihnya ada yang berusia kurang dari 20 tahun.

Pertumbuhan kota yang demikian itu memperlihatkan ukuran pola konsentrasi tempat kediamannya. Apabila kota itu masih kecil, maka bangunan rumah-rumahnya cenderung untuk mengelompok dekat pusat perdagangan, yang dominan, demi penyesuaian warga kota kepada alam sekitarnya dan orang-orang lain.

Jika penduduk kota itu semakin meningkat dan karena itu membutuhkan tempat kediaman yang lebih banyak lagi, maka ada beberapa yang akan dibangun dicelah-celah rumah-rumah yang telah ada, dan sebagian lainnya dibangun diatas areal tanah-tanah yang masih kosong ke jurusan pinggiran kota.

Jika kota itu berkembang terus, maka sebagian dari bangunan perumahan itu akan dibangun diatas tanah yang kurang intensif penggunaannya di luar batas wilayah kota itu sendiri. Dalam hal ini terjadi ekspansi keluar kota.

(2) Ketidak-teraturan Penggunaan Lokasi

Ada beberapa ketidak-teraturan (*irregularities*) yang merupakan hambatan bagi terjadinya konsentrasi distribusi tempat kediaman yang sebaya usianya. Misalnya, jika kota itu kecil, yang oertumbuhannya sebelum zaman kendaraan bermotor, maka kedudukan dusun-dusun disekitarnya, mungkin sama tuanya dengan pusat kota itu sendiri, yang hanya berkembang pada jarak beberapa kilometer.

Jika penduduk regionalnya bertambah, maka dusun-dusun dipinggiran kota lama itu juga bertumbuh terus, meskipun tidak sepadat pertumbuhan pusat kota itu tadi.

Proses ekspansi keluar secara ruang dari kota-kota besar biasanya sampai melampaui pendudukan sub-urban tersebut, yang berakibatnya terjadinya kantong-kantong bangunan lama dengan variasi usia pada kawasan luar dari bangunan-bangunan baru. Demikian juga halnya dengan pemukiman terdahulu sepanjang gris transportasi, yang dicaplok oleh ekspansi pertumbuhan kota tersebut.

Disamping bangunan-bangunan lama yang sering bertahan di kawasan kota yang baru, juga sering terdapat bangunan-bangunan baru yang tersisip diantara bangunan-bangunan lama. Keadaan demikian itu dapat digambarkan dalam 2 contoh dibawah ini :

(a). Ada satu proyek pembersihan slum area (daerah miskin) yang direncanakan untuk membersihkan rumah-rumah tua

dan kotor pada beberapa blok, kemudian di atasnya dibangun rumah-rumah bangunan baru. Setelah proyek-proyek itu selesai, ternyata bangunan-bangunan baru itu tetap dikelilingi oleh bangunan-bangunan lama usianya sebaya dengan rumah-rumah di naskah itu tadi.

(b). Pertumbuhan kota-kota besar biasanya diikuti oleh suatu usaha pembangunan perumahan dengan penggunaan tanah secara lebih intensif, menyebabkan timbulnya satu lingkaran kedua dari rumah-rumah bertingkat dan rumah-rumah tinggal dengan pekarangan yang luas. Rumah-rumah lama tetap bertahan, setelah ditata kembali, sedang sebagian dari padanya dibagi dalam beberapa persil, dimana dibangun rumah-rumah yang lebih kecil.

(c).Tingkat Ekonomis Lokasi Tempat Kediaman

Didalam satu kota, dimana pemilikan swasta atas bangunan-bangunan diperkenankan, penjualan dan penyewaan rumah-rumah berlaku secara kompetitif, tanpa pengawasan dari pemerintah kotamadya tentang harga dan sewa rumah.

Dalam kondisi semacam itu, maka nilai jual dan nilai sewa dari berbagai jenis dan bentuk rumah tempat kediaman di beberapa bagian kota, tergantung pada ukuran dan kepatutan yang berbeda-beda dari pada pemilih potensial.

Berhubungan karena bentuk tradisional rumah-rumah itu tidak mudah diubah, maka bentuk-bentuk baru dari rumah-rumah baru dibangun ditempat itu menentukan nilai ekonomis yang sebenarnya di kawasan itu, terutama bangunan-bangunan dengan gaya yang menarik.

Adapun tanah untuk perumahan yang dimanfaatkan

dalam satu kota metropolis yang sedang berkembang, mempunyai daya tarik yang berbeda dari calon pemakainya. Bagi orang-orang berpenghasilan tinggi, dimana saja mereka bisa memilih ruang perumahan yang paling layak, sesuai dengan kemampuannya, sedangkan bagi orang-orang berpenghasilan sedang dan rendah, ingin menggunakan tanahnya secara intensif. Kalau perlu mereka berusaha secara kolektif, agar mampu bersaing secara sehat untuk membangun rumah-rumah keluarga yang tunggal, meskipun kecil, asal sehat dan layak.

Demikianlah berbagai ragam rumah-rumah baru dibangun untuk berbagai tingkatan kemampuan ekonomis penduduk. Pada umumnya, makin tinggi pendapatan satu golongan, makin tinggi pula proporsi dari golongan mereka itu yang tinggal dalam rumah-rumah baru, yang mereka bangun untuk dipakai sendiri.

Adapun golongan yang berpenghasilan rendah, secara berangsur-angsur, akan menjadi pemilik atau penyewa rumah-rumah yang selama ini digunakan oleh golongan yang berpenghasilan tinggi, yang kini menempati rumah-rumah baru mereka. Jadi rumah-rumah dalam kota umumnya berpindah kebawah, dari satu tingkat ekonomi yang lebih tinggi ketingkat yang lebih rendah, jika rumah-rumah itu menjadi semakin tua usianya.

Oleh sebab itu nyatalah, bahwa tingkat ekonomi dari satu kawasan dalam kota dengan bangunan perumahan yang berbeda usia bukan saja tergantung pada tingkat ekonomi pada waktu bangunan itu dibangun, tetapi juga tergantung pada perkembangan dan sejarah bangunan itu selanjutnya.

D. Daerah Kependudukan (*Areas of Population*)

Daerah-daerah kependudukan yang saling berbeda juga terdapat dalam suatu kota besar. Ada beberapa daerah yang pemukiman yang berpenghuni kelompok-kelompok yang lebih besar, yang satu sama lain seupa dalam kualitas, yang sangat berbeda dengan penduduk tetangganya, halmana dapat dilihat pada contoh dibawah ini :

- (1) Daerah Rasial : penghuninya sebagian besar atau mayoritas orang-orang asing, seperti perkampungan orang Cina, India, Eropa dan lain-lain, yang mendiami satu kawasan secara mengelompok.
- (2) Daerah Kebudayaan : penghuninya terdiri dari golongan ahama yang menganut satu ajaran tertentu, dengan areal yang cukup bagi kelompok mereka sendiri.
- (3) Daerah Sosio-Ekonomis : penghuninya terutama terdiri dari kelompok penduduk dengan tingkat sosial dan ekonomi tertentu, misalnya nelayan, pengemudi becak, dsb.
- (4) Daerah Komposisi Usia dan Jenis Kelamin : penghuninya ditandai oleh suatu proporsi yang tinggi dan luar biasa orang-orang seusia atau sejenis kelamin, seperti ; seperti pria-pria tanpa rumah kediaman (*home-less man*), gadis-gadis pelayan, dsb.

Berbeda dengan keseragaman atau horogenitas seperti dikemukakan diatas, ada beberapa daerah pemukiman dalam kota, yang justru ditinggali oleh penghuni-penghuni yang bervariasi sedemikian rupa, sehingga mereka layak disebut dengan istilah penduduk cosmopolitan, sesuai dengan karakteristik yang paling layak bagi penduduk semacam itu.

Proses yang Menopang Daerah-Daerah Populasi

Ada 3 macam proses yang merupakan penyebab terciptanya kelangsungan eksistensi daerah-daerah kependudukan dalam satu kota, ialah : (1) Pemilihan yang tidak disadari, (2) Pengelompokan sosio-kultural sukarela, dan (3) Eksklusi penduduk minoritas dari daerah kependudukan tertentu.

(1) Pemilihan Lokasi yang Tidak Disadari

Ada golongan tertentu penduduk kota secara tidak sadar memilih lokasi dan mengelompok bersama dengan orang-orang segolongannya, baik karena pertalian keluarga, persahabatan maupun karena ikatan kebudayaan dan agama, yang tidak termasuk golongan minoritas penempatan lokasi tempat kediaman mereka sebagian tergantung pada operasi tidak sadar dari proses ekologis yang impersonal melalui persaingan dengan golongan penduduk lainnya.

Setiap keluarga bebas untuk bertempat tinggal dimana saja. Mereka bisa memperoleh perumahan, yang ditawarkan secara kompetitif di pasaran real estate, untuk bentuk dan jenis rumah yang sesuai kemampuan mereka masing-masing.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatutan satu tempat kediaman, yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa pemilihan proses ekologis dari satu kota, antara lain :

- (a) Karakteristik dari rumah itu sendiri
- (b) Sifat-sifat dan adat idtiadat tetangga
- (c) Kemudahan bepergian dari rumah ke pekerjaan, sekolah, rumah ibadat dan tempat rekreasi
- (d) Ketenangan atau kesunyian lingkungan
- (e) Harga penjualan atau sewa rumah

Adapun karakteristik rumah itu meliputi beberapa, misalnya jumlah dan ukuran kamar, penerangan dan ventilasinya, perlengkapan dan fasilitas rumah tangga, risiko kebakaran, kondisi kebersihan dan pemeliharaan, material dan kekuatan konstruksi, jumlah keluarga dalam rumah, bentuk luar dan pemeliharaan bangunan, garase, dan jalan masuk, luas ruang terbuka dipersil, dan perjanjian sewa atau beli.

Sifat-sifat tetangga meliputi : ukuran dan bentuk bangunan bukan perumahan, karakteristik populasi tetangga dan kecepatan serta arah perubahan di lingkungan setempat.

Kemudahan lokasi, termasuk dalam pertimbangan jumlah trip yang dilakukan oleh variasi anggota keluarga kesemua tempat yang akan dikunjungi secara regular, waktu, biaya dan risiko perjalanan, semuanya diukur sesuai dengan sifat-sifat individual keluarga yang melakukan perjalanan.

Ketenangan dan kesunyian meliputi pemisahan ruang dari tetangga, terutama yang memungkinkan terhindar dari mata dan telinga mereka yang suka mengintai dan atau mengobrol. Semua pertimbangan tersebut secara harmonis, sering tanpa analisa yang kritis, mempengaruhi harga yang ditawarkan oleh satu keluarga untuk satu tempat kediaman.

(2) Pengelompokan Sosio-Kultural Sukarela

Di dalam satu biasanya ada beberapa keluarga yang ingin bertempat tinggal dekat keluarga sendiri, agar mereka dapat menikmati hubungan sosial yang lebih sering antar keluarga.

Pengaruh sosial kultural semacam itu cenderung untuk menarik para keluarga yang tinggal dibagian lain dari kota itu ke dekat keluarganya untuk tinggal bersama. Bagaimanapun

juga, bagi penduduk kota yang mobilitasnya besar, pengelompokan secara ruang dengan kerabat genealogis dalam jumlah besar biasanya tidak lagi mempengaruhi kontak sosial antar mereka, sehingga pengelompokan sosio-kultural tidak lagi besar artinya bagi daerah-daerah populasi dewasa ini.

(3) Eksklusif (Pengasingan) Penduduk Minoritas

Ada kalanya penduduk yang tergolong minoritas, baik ditinjau dari suku atau bangsa, maupun ditinjau dari kategori budaya dapat didesak keluar oleh golongan mayoritas yang dominan dari daerah-daerah tempat kediaman tertentu. Eksklusi atau pengasingan penduduk kelompok minoritas dari beberapa bagian kota, bisa menyebabkan timbulnya konsentrasi pemukiman kelompok minoritas pada satu bagian pemukiman secara terisolasi.

Lokasi Ruang Daerah-Daerah Kependudukan

Lokasi daerah-daerah kependudukan (*population areas*) dalam satu adalah tergantung pada banyak factor yang bisa mempengaruhinya. Ada beberapa gambaran yang bisa memberikan sesedikit gambaran, bagaimana faktor-faktor tertentu itu beroperasi guna memperoleh lokasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah itu, antara lain : Pendapatan penduduk, keintensifan penggunaan tanah, dan anonimitas daerah-daerah tertentu.

(a) Penghasilan Penduduk

Penduduk yang berpenghasilan tinggi umumnya mencari lokasi pada bagian kawasan kota yang paling intensif penggunaan tanahnya, kediaman mereka dapat memperoleh akomodasi yang sesuai dengan kemampuan penghasilan mereka.

Kalau dianggap perlu mereka mendesak penduduk yang berpenghasilan rendah untuk pindah melokasi pada daerah-daerah kurang layak dari kota, misalnya daerah-daerah kotaor dan miskin (slum area) dengan bangunan murahan, daerah bising dekat pabrik, dekat garis transportasi berat, atau lokasi lainnya yang tidak disenangi oleh golongan berpenghasilan tinggi.

(b) Penggunaan Tanah Yang Intensif

Penggunaan yang sering dan gemar berpergian umumnya mencari lokasi pada bagian kota yang paling intensif pemanfaatannya, dimana mereka dapat memperoleh akomodasi yang sepadan dengan kemampuan mereka, misalnya pada daerah-daerah hotel untuk orang-orang yang tidak punya rumah, kamar-kamar dirumah-rumah, hotel keluarga, atau apartment dengan peralatan sederhana.

(c) Komunitas Daerah Pemukiman

Suatu daerah kependudukan yang pada bagian kota tentu bisa menjadi sangat mnarik khusus bagi penduduk tertentu misalnya, para penjahat criminal yang tetap ingin tidak diketahuidentitasnya, atau wanita-wanita yang diceraikan suaminya, yang ingin menghibur teman laki-laki mereka tanpa didesus-desuskan oleh tetangganya, dan lain-lain.

E. Perubahan-Perubahan Pada Daerah Kependudukan

Dari sekian banyak macam pengaruh yang merupakan sumber terjadinya perubahan-perubahan dalam daerah-daerah pemukiman kota, ada 3 hal yang menonjol yang dapat diketomahkan disini, yaitu:

(a) Pengaruh Perubahan Dalam Populasi

Apabila terjadi perbedaan dalam jumlah penduduk kota yang semakin berkembang, maka keadaan semacam itu sudah barang tentu akan membawa perubahan dalam karakteristik pada daerah-daerah yang mengalami perkembangan penduduk.

Bagi setiap kota secara keseluruhan, kenaikan jumlah penduduknya berarti bertambahnya kepadatannya atau meluasnya wilayahnya kepinggiran kota. Pertumbuhan kota bukan hanya terjadi karena pertambahan penduduk semata, karena pertumbuhan satu kota biasanya terjadi secara simultan dalam berbagai tingkatan daerah tempat kediaman, yang melokasi pada berbagai kawasan.

Penduduk dari setiap daerah bagian (sub-area) meningkat begitu rupa, sehingga mereka semakin meluas dalam ukuran, lalu merembes ke wilayah sekitarnya. Dan pada alirannya daerah-daerah yang diserbu oleh pendatang baru itu, terpaksa melakukan juga ekspansi kedaerah lain disekitarnya, sampai keluar batas dari kota yang semakin membengkak penduduknya.

Proses ekspansi dari satu kawasan ke kawasan lain dalam kota it membawa pengaruh yang tidak sedikit pada penduduk kota dalam berbagai aspek, terutama dalam kualitas pertumbuhan internalnya dan komposisi penduduknya.

(b) Pengaruh Perubahan Lokasi dan Transportasi

Jika rumah-rumah dalam kota, semakin manusianya, maka hal itu akan menimbulkan kemerosotan nilai tempat kediaman, yang bisa menimbulkan perubahan-perubahan dalam daerah populasi. Dan apabila ada daera-daerah baru yang lebih layak dibangun, karena daerah-daerah lama semakin membu-

rak keadaanya, maka beberapa penduduk dari berbagai kelas sosial ekonomi cenderung untuk berpindah lokasi, sesuai dengan perubahan yang relative layak dari tetangga-tetangga mereka.

Selain itu, juga perubahan-perubahan rute transportasi, membawa paruh daerah kependudukan dalam satu kota, karena dengan adanya perubahan garis transportasi baru, atau meningkatnya pelayanan rute-rute transportasi lama, selain membuka daerah-daerah yang tadinya terisolasi, juga membuat penduduk setempat lebih mudah mendekati perhentian transportasi yang dominan.

Jelaslah, bahwa satu perubahan rute transportasi cari terminal yang lebih ramai ke stasiun-stasiun di pinggiran kota, sebagai garis transportasi lokal yang dominan, dapat merubah secara drastis penyebaran penduduk antara masyarakat-masyarakat kecil di pinggiran kota dengan pusat kota. Demikian juga rute kereta api ke rute mobil, dapat merubah kepadatan daerah-daerah tertentu, ada yang bertambah padat disamping ada juga yang berkurang kepadatannya, karena polusi dan kebisingan tak dapat dipisahkan dari garis-garis transportasi. Demikianlah perubahan dalam rute atau bentuk transportasi dapat membawa pengaruh pada kepadatan dan kepatutan daerah pemukiman dan komposisi penduduknya.

(c) Pengaruh Perjuangan untuk Prestise

Perjuangan demi prestise kadang-kadang mendorong penduduk kota untuk berhenti guna memperoleh tempat kediaman di daerah-daerah yang lebih layak, sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang. Misalnya seorang kaya baru dapat mencari satu rumah bentuk baru di daerah elite, dimana ang-

gota keluarganya dapat memperoleh kesempatan berkenalan dengan tetangga-tetangga yang baru dari golongan elite itu.

Adakalanya, perjuangan untuk prestise ini akan lebih banyak menjumpai komplikasi bagi orang-orang gila pangkat (*sosial-climber*), misalnya dalam kasus sementasi sosial dalam hirarki kelas prestise, baik pada penduduk minoritas maupun pada penduduk mayoritas. Di dalam kondisi semacam itu, seorang anggota kelompok minoritas bisa memperoleh tempat tinggal dekat kelompok mayoritas, bukan saja kualitas yang superior dari rumah itu, atau karena ia ingin berasosiasi dengan kelompok superordinate (mapan) itu, tetapi terutama karena tempat tinggal semacam itu memberikan suatu prestise kepadanya, disatu assosiasi kelompok minoritasnya.

Masuknya seorang minoritas kedalam lingkungan tetangga mayoritas, pada mulanya akan menurunkan nilai prestisnya dipandangan penduduk mayoritas, namun kelask jika sudah banyak keluarga minoritas yang salah tempat di permukiman itu, maka lama-kelamaan para tetangganya akan menganggap hal itu biasa saja.

Jadi perjuangan untuk prestise dari kedua belah pihak penduduk mayoritas dan minoritas, dapat berasosiasi untuk sementara, guna mempercepat invasi daerah pemukiman, sehingga factor prestise akhirnya menjadi tidak begitu penting, apalagi jika invasi semacam itu pesat dan terjadi penggantian populasi secara rasial.

Didalam kondisi tertentu, kelanjutan perjuangan untuk pretasi dsapat menciptakan stabilitas yang lebih besar di daerah elite, misalnya di suatu kawasan yang well-established menurut yang kuat, bisa sukses melintasi invasi sosial climbers, penduduk minoritas dengan aktivitas komrsial. Adanya

aktivitas dan kekuatan ekonomi semacam itu memungkinkan penduduk lama dan baru betah tinggal di daerah baru itu dengan penuh ketekunan, karena pertimbangan ekonomis rasional menarik mereka untuk meninggalkan adat kebiasaan yang lama.

Antar Relasi dari Berbagai Kawasan

Didalam membicarakan struktur ruang intern kota, telah dibahas secara terpisah lokasi-lokasi dari berbagai kawasan, seperti : kawasan perdagangan, industry dan pemukiman, tetapi belum disinggung tentang bagaimana saling hubungan antara kawasan-kawasan tersebut satu sama lain. Oleh sebab itu dalam uraian selanjutnya perlu diberikan perhatian perhatian secara langsung mengenai saling hubungan antara berbagai kawasan itu.

F.Saling Bergantung Secara Fundamental

Adanya berbagai bentuk kawasan di dalam suatu kota, tidak dapat dilepaskan dari satu pandangan tentang adanya rangkaian saling bergantung antara kawasan-kawasan itu secara fundamental satu sama lain dalam satu system ekonomi yang luas.

Agregasi kawasan perdagangan atau jasa-jasa komersial, misalnya sesuai dengan kebutuhan fungsi bertempat tinggal langganan potensialnya; kawasan pemukiman sebaliknya, juga tergantung pada kawasan perdagangan dan jasa-jasa komersial untuk kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan lain-lain.

Demikian juga halnya dengan kawasan industry, per-

baikan tergantung pada tempat-tempat pemukiman pekerja-pekerjanya, bahwa sering juga terjadi ada sebagian besar warga kota bermukim di kawasan industry, dimana mereka bekerja. Lalu toko-toko komersial memperoleh barang-barang yang dijualnya kepada penduduk dari pabrik-pabrik, meskipun kadang-kadang secara tidak langsung, karena biasanya melalui pedagang besar atau pedagang perantara, jadi pabrik-pabrik tergantung juga pada toko-toko, sebagai tempat pelemparan hasil produksinya.

Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan ketiga kawan utama dari kota, yakni kawasan perdagangan, industry dan pemukiman, yang masing-masing merupakan kawasan yang terbagi dalam sejumlah daerah dan daerah-daerah bagian dengan spesialisasi khusus tertentu, terintegrasi dalam satu kota metropolitan, yang memamerkan serangkaian karakteristik dari satu system ekonomi yang luas, yang saling bergantung satu sama lain secara integral

G. Transportasi Sebagai Matarantai Perhubungan

Satu sistem transportasi dengan jaringan jalan-jalan yang serba teratur dalam kota merupakan satu sarana perhubungan yang efektif antara pusat kota dengan kawan-kawan potensialnya. Demikian juga antara satu kawasan dengan kawasan-kawasan lainnya, menjadikan semua bagian dari kota itu terintegrasi secara efektif dalam satu organism totalitas. Oleh karena itu, antara kawasan-kawasan tertentu dengan sarana transportasi itu sendiri terdapat kepentingan timbale balik, misalnya dengan adanya rute dan sarana transportasi yang baik yang memperhubungkan antar kawasan dan antar daerah, maka pengembangan penduduk dan penyebarannya

di pinggiran kota akan lebih maju. Karena keluarga-keluarga pendatang baru akan membangun rumah-rumah disepanjang garis transportasi yang bisa memudahkan perjalanan mereka. Dan dengan semakin bertambahnya penduduk pinggiran kota, dapat mendorong dikembangkannya jalan-jalan yang sudah ada dibukanya jalan-jalan baru, yang memungkinkan semakin membaiknya rute dan pelayanan kendaraan-kendaraan umum.

Demikian juga dengan adanya rute pengangkutan barang-barang yang teratur, bisa merupakan daya tarik bagi pabrik-pabrik baru dan adanya pertumbuhan pabrik-pabrik yang lebih besar dapat pula lebih meningkatkan fasilitas dan jasa-jasa komersial disepanjang rute pengangkutan barang-barang tersebut.

Proksimitas yang Berbeda-beda

Berbagai kawasan dalam kota ternyata mempunyai tingkat proksimitas (kedekatan) yang berbeda satu sama lain, misalnya pekerja-pekerja industry lebih senang melokasi dekat pabrik dimana mereka bekerja, peelaahar dan maahsiswa lebih suka tinggal dekat kampus mereka, pedagang barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat meladeni daerah-daerah pemukiman dengan baik, jika dia melokasi pada median langaan potensialnya.

Adanya kebutuhan proksimitas yang saling berbeda antara satu dengan lain daerah atau kawasan secara ideal adalah sesuai dengan prinsip jarak ekologis yang minimum. Oleh sebab itu setiap kota perlu membangun satu pola ruang tamu, dimana setiap kawasan bisa menempati lokasi yang menunjang kemudahan hubungan antar kawasan dalam kota itu.

BAB VI

PENDUDUK DAERAH PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Daerah perkotaan bukan hanya dapat di tandai menurut ukuran, fungsi spesialisasi dan pola ruang interiornya, tetapi juga menurut komposisi atau susunan penduduknya. Penduduk daerah perkotaan adalah sangat berbeda dengan penduduk antara satu kota dengan kota-kota lainnya. Biasanya saling berbeda dalam hal komposisi menurut umur, ratio pria terhadap wanita, fertilitas (tingkat kelahiran), mobilitas, tingkat pendapatan orang tua dan presentase orang dewasa dalam angkatan kerja. Hal-hal semacam ini perlu diketahui, guna memperoleh gambaran tentang aneka ragam karakteristik penduduk kota.

Namun demikian, data statistik mengenai susunan penduduk kota, tidaklah mampu menggambarkan keadaan penduduk kota secara langsung sebagai satu kesatuan masyarakat yang terintegrasi secara fungsional, baik ditinjau dari segi ruang, maupun ditinjau dari segi sosial.

Sebagai konsekwensinya, maka data statistik semacam itu tidak akan mampu memenuhi lowongan masyarakat yang

lebih menyukai adanya suatu deskripsi yang dramatis dari satu kota sebagai suatu masyarakat dunia yang kompleks (rumit), dimana manusia bisa bertempat tinggal, dan kepada siapa penduduk dan lembaga-lembaganya menyesuaikan diri secara lebih baik.

Meskipun begitu, data demografis penduduk kota, bagaimanapun juga tetap penting artinya bagi mahasiswa yang serius, yang ingin memperoleh analisa yang lebih kuantitatif yang lebih pesat dari satu kota dengan segala permasalahannya. Adanya data tentang komposisi penduduk kota, memungkinkan diadakan penaksiran tentang penimbangan dan arah kuantitatif penduduk kota berdasarkan kategori-kategori tertentu yang dipamerkan kelompok penduduk tertentu, misalnya kalulasi kenakalan anak-anak remaja, dapat dilakukan secara langsung, berdasarkan pemuda-pemudi dalam usia deliquensi (pubertas), berdasarkan jumlah penduduk kota secara keseluruhan.

B. Perbandingan Penduduk Perkotaan dan Pedesaan

Jika penduduk kota industry komersial dibandingkan penduduk dusun pertanian, maka dapatlah dijumpai sejumlah perbedaan yang berarti, antara lain :

1) Perbedaan komposisi Usia dan Jenis Kelamin

Secara umum dapat dikatakan, bahwa kota-kota itu memmnyuai presentase wanita yang lebih tinggi dibanding dengan presentase wanita di daerah pedesaan. Sebaliknya daerah pertanian memiliki presentasi pria yang lebih tinggi, dibandingkan presentase pria di daerah perkotaan. Hal ini ada

hubungannya dengan fungsi apredisasi di lingkungan pertanian, yakni memerlukan lebih banyak tenaga pria dibandingkan tenaga wanita. Sebaliknya di kota lebih banyak kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan bagi wanita, terutama wanita muda.

Menurut sensus penduduk 1980, perbandingan penduduk secara keseluruhan adalah 98,6 pria terhadap 100 wanita, tetapi di kota perimbangannya adalah 95 pria terhadap 100 wanita, hal mana sangat berbeda dengan perimbangan penduduk di daerah pertanian, dimana terdapat 110 pria terhadap 100 wanita.

2) Perbedaan sex ratio berdasarkan Umur

Demikian juga antara daerah-daerah perkotaan dengan daerah pertanian, terdapat perbedaan sex ratio, baik pada usia muda, maupun pada kelompok lanjut. Pada usia 15 sampai 24 tahun, perimbangan pria dan wanita di kota-kota adalah bekisar antar 90 pria – 100 wanita. Hal tersebut sangat kontras dengan keadaan di dusun pertanian, yang perimbangannya adalah 117 Pria – 100 wanita. Perbedaan yang menyolok ini disebabkan karena adanya migrasi wanita-wanita muda dari desa-desa ke kota-kota, sebagai satu refleksi dari satu anggapan dasar yang tersebar luas dalam masyarakat pedesaan, bahwa wanita-wanita muda lebih banyak mempunyai kesempatan untuk bekerja di kota daripada di pedesaan. Data semacam ini adalah penting untuk menganalisa problem-problem tertentu tentang pemilihan teman hidup dan perkawinan, demikian pemilihan pekerjaan baik di kota maupun di desa.

Migrasi kaum pria dari desa – desa ke kota-kota juga sering terjadi, namun pada umumnya terjadi pada kelompok

usia yang lebih tua, hal yang dapat dilihat pada perimbangan ratio pria dan wanita di kota dan desa pada kelompok usia 30 – 34 tahun, dinamika persentase pria hanya 5 % lebih rendah daripada presentase wanita, sedangkan didaerah pedesaan presentase pria lebih tinggi sekitar 5 % juga.

3) Perbedaan dalam komposisi umur

Perbedaan komposisi penduduk menurut umur di kota-kota dan di desa- desa, yang sangta berbeda dalam berbagai kategori, dapat dilihat pada table tentang presentase penduduk menurut umur antara daerah perkotanan dengan pedesaan, menurut hasil sensus penduduk 1947, yang dikeluarkan oleh biro pusat statistic, sebagai berikut :

Persentase Penduduk menurut umur Kota-Desa

Kelompok Umur	Daerah Kota	Pedesaan	Indonesia
-0 – 14	41,98	44,57	44,12
15 – 24	20,20	15,52	16,34
25 – 44	25,65	26,33	26,20
45 – 64	9,95	11,03	10,84
65 – keatas	2,20	2,55	2,49
Tidak Diketahui	0,04	0,00	0,01

Sumber : Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971

Pada tabel diatas ternyata, bahwa pada usia 14 tahun kebawah, penduduk pedesaan lebih tinggi presentasenya dis-

banding dengan presentase penduduk kota, tetapi sebaiknya pada kategori usia 15-24 tahun penduduk kota lebih tinggi presentasinya daripada penduduk pedesaan.

Kemudian pada kategori usia 25-44 tahun penduduk desa menjadi lebih tinggi presentasinya dari pada penduduk kota . demikian juga pada kategori usia 45-64 tahun dan 65 tahun keatas.

4) Perbedaan Tingkata Kelahiran (Fertilisasi)

Kategori atau tingkat kelahiran antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan umumnya juga berbeda, hal mana disebabkan antara lain :

- a) Karena umur rata-rata pada waktu kawin perintah lebih rendah di daerah pedesaan, maka fasilitas penduduk desa umumnya lebih tinggi daripada penduduk perkotaan.
- b) Karena latar belakang pendidikan orang kota lebih tinggi dari pada penduduk pedesaan, maka hal-hal ini juga membawa pengaruh pada tingginya fasilitas penduduk pedesaan.
- c) Karena perbedaan tingkat pendapatan penduduk kota umumnya lebih tinggi daripada penduduk pedesaan, maka tingkat kelahiran di pedesaan umumnya lebih tinggi daripada didaerah perkotaan. Pada umumnya penduduk yang tingkat pendapatannya tinggi, tingkat kelahiran rendah.

5) Perbedaan Tingkat Kematian (Mortalitas)

Pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah pedesaan lebih tinggi tingkat kematiannya, dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan

kan antara lain,-

Karena adanya fasilitas dalam berbagai sector kehidupan kota, misalnya fasilitas kesejahteraan yang semakin menarik, fasilitas air bersih yang cukup memadai, fasilitas pendidikan dan rekreasi yang semakin meningkat, dan berbeagai fasilitas lainnya yang tidak sempat dinikmati oleh penduduk desa pertanian.

Perbedaan tingkat kematian antara desa dan kota juga disebabkan karena orang-orang desa pada umumnya bekerja sebagai pekerja kasar di dawah, dikebun, di peternakan, dilaut dan lain-lain yang umumnya memerlukan tenaga jasmani yang besar, dan kadang-kadang berada di tempat-tempat yang kurang sehat lingkungannya dan berbahaya.

6) Proses Urbanisasi Di Indonesia

Salah satu masalah kependudukan yang melanda kota-kota di Indonesia akhir-akhir ini yang perlu diberikan perhatian yang serius, ialah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota kecil selanjutnya dari kota-kota kecil ke kota-kota yang lebih besar, proses mana lebih dikenal dengan istilah Urbanisasi, yang berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Proses urbanisasi di Indonesia baru nampak gejalanya setelah perang kemerdekaan, dimana semakin banyak penduduk desa yang membanjiri kota-kota, sebagai akibat terjadinya gangguan keamanan di daerah-daerah yang berpenduduk padat, seperti Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.

Bagaimana pesatnya proses urbanisasi di Indonesia akir-akhir ini, dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya

presentase penduduk kota-kota di Indonesia, dari sensus ke sensus.

Pada sensus 1930, dari jumlah penduduk Indonesia 60,7 juta jiwa, barulah sekitar 7% atau 247 ribu yang tinggal di daerah perkotaan. Ini tidak mengherankan, karena pada waktu itu lebih 90% penduduk Indonesia yang hidup tergantung pada hasil produksi pertanian.

Ketika diadakan sensus penduduk 1961, presentase penduduk daerah perkotaan ternyata mengalami kenaikan menjadi 14,9% dari 96.318.000 jiwa seluruhnya dan pada sensus penduduk 1971 meningkat lagi menjadi 18,8% dari jumlah penduduk 119.182.542 jiwa, yang berarti 22.560.000 jiwa.

Dengan demikian nyatalah, bahwa dari tahun 1930-1961 presentase penduduk kota naik 7,9% dalam waktu 31, kemudian dari tahun 1961-1971, dalam tempo 10 tahun naik lagi 3,9% dan dari 1971-1980, naik lagi sekitar 5% jadi dalam jangka waktu 50 tahun presentase penduduk kota di Indonesia naik $\pm 17\%$.

C. Kota dan Pertambahan Penduduk

Sebagai akibat dari urbanisasi, maka kota-kota semakin bertumbuh dan berkembang di seluruh wilayah tanah air. Pada tahun 1930 barulah 7 kota di Indonesia yang berpenduduk 100.000 keatas, pada tahun 1961 jumlah itu menjadi 22 kota dan pada tahun 1971 meningkat terus menjadi 27 kota sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kota-kota berpenduduk 100.000 keatas di Indonesia (ribuan)

Wilayah	Nama Kota	1930	1961	1967
DKI. JAYA	Jakarta	533.0	2.971.1	4.577.0
Jawa Barat	Raya]Bandung	166.8	972.6	1.201.7
Yogyakarta	Bogor	t	154.1	195.9
Jawa Timur	Cirebon	t	158.3	178.5
Sumatra	Yogyakarta	136.6	321.6	342.5
Sulawesi	Surabaya	341.7	1.007.9	1.556.3
Kalimantan	Malang	86.6	341.4	422.4
	Kediri	48.5	158.9	178.9
	Madiun	t	123.4	136.1
	Semarang	217.8	503.1	646.6
	Surakarta	163.0	367.6	414.3
	Palembang	t	102.4	115.5
	Tegal	t	89.0	105.7
	Magelang	t	96.4	110.3
	Medan	76.6	479.1	635.6
	Pemantang Siantar	15.5	114.9	129.2
	Padang	53.1	143.7	196.3
	Jambio	22.9	113.0	158.5
	Palembang	108.1	474.9	582.9
	Tanjungkarang	52.2	153.9	198.9
	Pekanbaru	t	70.8	145.0
	Uajung Pandang	84.9	384.2	434.8
	Manado	27.5	129.9	169.9

Wilayah	Nama Kota	1930	1961	1967
	Pontianak	45.2	150.2	217.5
	Banjarmasin	65.7	241.0	281.7
	Balikpapan	t	91.7	137.3
	Samarinda	t	69.7	137.5

Sumber : Biro Pusat Sattistik

Ket. t= data tidak diketahui

Beberapa Faktor yang mempengaruhi Urbanisasi

Adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota atau dari kota-kota kecil ke kota-kota besar merupakan satu proses yang sangat kompleks, yang banyak menimbulkan problem-problem sehingga pendekatan masalahnya juga harus dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sosiologi, maupun dari sudut pandang lainnya. Namun demikian, beberapa factor yang berpengaruh pada proses urbanisasi itu dapat dikelompokan dalm 2 kategori besar saja, yaitu pertama : factor pendorong dan kaedua : factor menarik.

1) Faktor Pendorong (*Push Factors*)

Faktor-faktor penyebab timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut factor pendorong atau push factor, meliputi antara lain :

- a) Men Lang Ratio (perimbangan tanah dan tani) di daerah pedesaan yang makin lama makin, karena penambahan penduduk.
- b) Kurangnya tersedia lapangan kerja diluar bidang per-tandingan
- c) Rendahnay tingkat pendapatan penduduk pedesaan

d) Sering terjadinya kerja gotong royong yang dipaksakan dalam rangka pembangunan di daerah pedesaan.

2) Faktor Penarik (*Pull Factor*)

Disamping adanya factor pendorong di daerah pedesaan, juga terdapat factor penarik, berupa daya tarik kata-kata yang disebut *Pull Factor*, isalnya antara lain :

- a) Keindahan dan kemegahan bangunan-bangunan di kota-kota besar dengan taman-taman dan penerangan yang gemerlapan, dan lain-lain.
- b) Kemungkinan tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih tinggi.
- c) Fasilitas sosial di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, pembangunan dan kewiraswastaan.
- d) Kebebasan dari adat istiadat yang mendukung dan ketenteraman jiwa dari gangguan keamanan.
- e) Kesempatan untuk maju dan berkembang, sesuai dengan bakat, ketrampilan modal dan kesempatan yang tersedia.

Adanya faktor-faktor pendorong yang dibarengi oleh timbulnya harapan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, keadaan penghidupan yang lebih meningkat dengan ketenteraman dan kebosan jiwa yang lebih terjamin di daerah perkotaan, merupakan faktor pendorong utama bagi setiap penduduk pedesaan untuk berpindah ke kota-kota.

Proses semacam ini akan berlangsung terus, selama tidak ada usaha dari pemerintah untuk menggalakan dan menyebarluaskan pembangunan dalam berbagai bidang dan sekitar di seluruh wilayah pedesaan, sesuai dengan tujuan 8 jalur pemerintah pembangunan.

BAB VII

HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL DI PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Meskipun penduduk kota-kota modern dewasa ini telah memenuhi persyaratan sebagai warga dunia, namun secara individual mereka masih melakukan aktivitas mereka sehari –hari dengan penuh semangat, guna dapat mengikuti perjuangan hidup di kota-kota yang serba kompetitif itu.

Penduduk kota dapat membaca surat-surat kabar lokal atau nasional, mendengarkan radio dan televisi, siaran luar dan dalam negeri, sesuai dengan selera hidup mereka masing-masing. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha swasta, karyawan industry, yang hasil produksinya ada yang di ekspor dan sebaliknya mereka bias membeli barang-barang impor dari luar negeri. Mereka juga bias mengikuti program dan aktivitas keagamaan, sesuai dengan keyakinan mereka masing - masing, dapat mengadakan kunjungan-kunjungan insidenetal dan hiburan, serta dapat menikmati rekreasi bersama keluarga dan warga kota lainnya.

Demikianlah penduduk kota itu mengikuti proses hidup mereka dalam dunia kemasyarakatan kota tersendiri, kebiasaan-kebiasaan dan nilai – nilai sosial, dengan lembaga-lembaga dan kelompok khusus yang tersedia bagi mayoritas penduduk dan warga kota. Adanya jaringan hubungan sosial semacam itu yang menjadi ciri-ciri hubungan sosial kota-kota besar, sangatlah dengan hubungan sosial masyarakat pedesaan, yang memiliki cara-cara dan corak-corak tersendiri.

B. Perbedaan Hubungan Sosial Perkotaan dan Pedesaan

Meskipun terdapat perbedaan dalam dunia kemasyarakatan kekotaan dari berbagai bagian kota, karena penyimpanan secara individual dalam pola hubungan khusus mereka, ditinjau dari kategori masing-masing bagian itu, namun masih ada beberapa generalisasi hubungan sosial kekotaan, yang sangat berbeda dengan pola hubungan sosial desa-desa pertanian, antara lain :

1) Kontak-kontak yang beranekaragam dan kompleks

Setiap penduduk kota besar rata-rata mengadakan kontak baik secara *face-to-face*, maupun secara tidak langsung sebanyak ratusan kali lebih banyak, jika dibandingkan kontak yang dilakukan oleh penduduk desa-desa pertanian. Selama seminggu pada umumnya warga kota dapat bertemu dengan sejumlah tetangganya, melihat ribuan orang-orang lain di jalan atau yang menumpang diberbagai kendaraan, dipasar-pasar, kantor-kantor dan lain-lain.

Setiap hari penduduk kota membaca berita-berita di surat-surat kabar mengenai keadaan sesama warga kota dan

kejadian-kejadian lainnya, lalu ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak didalam melakukan sosial control terhadap kebijaksanaan pemerintah setempat dan perusahaan-perusahaan umum, yang melayani kepentingan masyarakat ramai di kota mereka itu.

Beda dengan halnya dengan masyarakat petani, yang tinggal di desa-desa pertanian yang swasembada, dengan penduduk yang kurang dari lima ratus jiwa, yang jarang bertemu satu sama lain, apalagi dengan orang asing mereka tidak pernah mendengar radio, tidak pernah melihat siaran televisi, tidak membaca surat kabar, tidak menjadi langganan suatu took atau tempat hiburan, sudah barang tentu hanya akan bias berjumpa dalam seumur hidupnya sejumlah orang yang dapat dijumpai oleh penduduk kota dalam sehari tunggal saja.

2) Heterogenitas Penduduk Kota

Dunia kemasyarakatan kota memperlihatkan kontak sosial yang beranekaragam dan dalam yang jumlah yang begitu bear. Keanekaragaman itu berpangkal dari keseragaman bangsa-bangsa dan budaya-budaya yang tedapat di kota itu.

Penduduk kota terdiri dari berbagai macam bangsa dan suku bangsa. Adanya migrasi intern dalam suatu Negara menyebabkan berkumpulnya berbagai macam suku bangsa, kelahiran Negara itu sendiri, yang saling bertemu di kota-kota besar. Mereka terdiri dari beberapa kelas sosio – ekonomis, kebiasaan, kepercayaan dan keyakinan agama yang berbeda satu sama lain.

Sebaliknya dengan masyarakat petani, yang lebih kecil mereka biasanya memperlihatkan keseragaman (Hemogeni-

tas), baik dalam kebangsaan dan kesukuan maupun dalam dan tingkatan sosial ekonomi mereka.

3) Spesialisasi peranan-peranan

Keserbaragaman kontak kekotaan juga timbul karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja dari pada penduduk kota itu disamping keserbaragaman secara budaya dan biologis, penduduk kota masih mempunyai keserbaragaman yang tajam dalam kontak-kontak sosial mereka, oleh karena adanya bermacam peranan yang dimainkan oleh penduduk kota itu, yang saling berbeda.

Penduduk kota biasanya berhubungan dengan pengurus iklan, arsitek, pemain bola, kollektor, pemberi kredit, insinyur, pengumpul kotoran, masinis, pekerja sosial, penjual iklan, ikan, dan sebagainya, yang berbeda secara menyolok dalam peranan mereka masing-masing.

Oleh karena bermacam-macam peranan, yang dimainkan oleh para warga kota, maka setiap penduduk kota rata-rata berpengalaman dalam melakukan sejumlah kontak, yang beranekaragam itu, hal mana sangat berbeda dengan petani, yang hanya mempunyai peranan spesialisasi yang relative kecil dan terbatas.

4) Beberapa Variasi Kelompok

Sama halnya dengan kontak-kontak secara individual, kelompok-kelompok dan hubungan-hubungan kelompok dalam masyarakat kota juga menomerkan diversitas dan kompleksitas yang besar, yang tidak mungkin di jumpai dalam masyarakat desa pertanian yang sederhana.

Disamping memegang teguh kelompok-kelompok

primer dasar dan lembaga-lembaga fundamental, yang menjadi cirri-ciri daerah pedesaan, seperti keluarga, kelompok sepermainan, jamaah shalat dan sebagainya, mereka juga mengembangkan jaringan-jaringan kontak yang melambungkan asosiasi sukarela yang berrarisasi secara luas, yang umumnya berkisar pada kegemaran dan peranan seseorang warga kota itu sendiri.

Ilustrasi jaringan kontak kekotaan yang kompleks dan melembaga dan bisa dijadikan contoh, yakni, :

a. Di Bidang Pendidikan :

Dikota-kota terdapat sejumlah besarsekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan atas sampai ke akademi dan perguruan tinggi, baik umum maupun kejuruan. Setiap sekolah itu mempunyai staf administrasi dan korps pengajar, yang berespresi dibawah pengawsan dinas pendidikan dan kebudayaan kotamadya.

Kepala sekola, guru-guru, dan bujang-bujang sekolah, begitu juga murid-murid, pelajar dan mahasiswa, mempunyai organisasi sendiri-sendiri baik berupa organisasi sekolah atau kelas, maupun organisasi ekstrakurikuler. Demikian juga orang-orang tua murid dan guru bersama-sama membentuk assosiasi orang tua murid dan guru.

b. Di bidang ekonomi

Diantara hubungan kepranataan kekotaan yang paling kompleks dan beranekaragam ialah di bidang ekonomi. Ratusan toko, kantor jasa-jasa dan pabrik dari berbagai bentuk dan ukuran semuanya dapat ditandai dengan identitas organisasi intern masing-masing. Toko-toko dan usaha-usaha sejenis membentuk assosiasi sejenis, yang kesemuanya bergabung

didalam induk Organisasi KADIN Kamar Dagang dan Industri, mulai dari tingkat kotamadya, ke Propinsi sampai ke tingkat nasional.

Disamping kedua bidang tersebut, masih terdapat bermacam-macam organisasi spesialisasi lainnya, misalnya : Buruh/ karyawan, Pengusaha-pengusaha, bankers, sekretaris dan kelompok-kelompok professional lainnya, masing-masing bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya.

Demikianlah, bermacam aspek kehidupan kota, yang terdapat dalam berbagai asosiasi sukarela, yang bersesuaian dengan peranan spesialisasi khusus, yang sesuai dengan kehidupan kota.

Jika didesa pertanian yang sederhana hubungan sosial berlaku terus dalam seluruh berlaku terus dalam seluruh kehidupan masyarakat, dimana setiap orang mengenal siapa-siapa saja melalui nama-nama mereka, maka di kota sebagian besar hubungan sosial berlaku diantara orang-orang asing, itu biasanya hanya berlaku untuk waktu yang terbatas.

Hubungan yang tidak kekal dan anonim dalam sistem hubungan sosial kekekotaan merupakan gambaran situasi sehari-hari dengan segala macam variasinya, yang terjadi dalam suatu kota. Penjaga-penjaga toko di pusat pertokoan setiap saat diliwati oleh ribuan orang-orang asing di jalan, biasanya tidak pernah mereka berharap akan bertemu orang-orang sebanyak itu sebelumnya.

Di bioskop atau pada suatu peristiwa atletik, para penonton yang duduk bersebelahan, selama satu dua jam, disamping ada sementara penggemar, yang secara teratur dapat bertemu satu sama lain dalam setiap pertandingan, tetapi

mereka tidak saling mengenal nama, meskipun hubungan temporer semacam itu tidaklah umum sifatnya.

Di tempat pekerjaan, buruh-buruh dari satu perusahaan besar, bekerja dengan para karyawan lainnya selama beberapa bulan bahkan tahun, dibawah pimpinan seorang supervisor, tetapi karena pekerja-pekerja itu sering bertukar dari perusahaan ke perusahaan, dari bagian ke bagian, dari pekerjaan ke pekerjaan, maka hubungan yang permanen dalam perusahaan-perusahaan industry itu lebih bersifat kekecualian dari peranan para pekerja tersebut.

Tetangga-tetangga yang berdekatan sering berbeda secara luas dalam hubungan yang permanen. Ada beberapa lokasi mempunyai proporsi tinggi orang-orang yang bermukim tetap, sedangkan lainnya, dihuni oleh penduduk yang sering berganti-ganti dan tidak saling mengenal, sehingga sejumlah penduduk tertentu dari kawasan itu jarang mengenal atau mengetahui nama satu sama lain.

Jadi kebanyakan hubungan sosial kekuatan itu hanya berlangsung untuk waktu singkat, namun bagaimana pun juga setiap warga kota akan selalu mengadakan hubungan secara kontinu dengan orang-orang yang asing baginya. Kecepatan perubahan kontak sosial semacam itu, yang disebut mobilitas sosial, disertai anonimitas yang tinggi, membawa pengaruh yang besar pada sifat-sifat penduduk kota, yang sangat berbeda dengan sifat-sifat penduduk desa.

C. Pengaruh Hubungan di Perkotaan

Kota-kota besar adalah merupakan satu dunia daripada hubungan sekunder yang dingin, formal dan interpersonal

yang jauh berbeda dengan hubungan primer di pedesaan yang ramah tamah, tidak formal (informal) dan personal. Perbedaan yang menyolok antara hubungan sekunder dan hubungan primer ini, merupakan dasar perbedaan yang penting dalam hubungan sosial dunia kemasyarakatan kota-kota metropolitan dengan masyarakat desa pertanian yang swasembada.

(1) Hubungan Sekunder yang Impersonal

Adapun yang dimaksud dengan hubungan sekunder ialah hubungan yang impersonal, yang sangat berbeda dengan hubungan primer yang personal. Pada bentuk hubungan primer, setiap partisipan, saling menilai satu sama lain sebagai seorang pribadi atau individu, person, tidak hanya sebagai alat melulu untuk sesuatu maksud tertentu. Contohnya : hubungan keluarga adalah primer, karena seorang bayi mempunyai nilai bagi orang tuanya, bukan sebagai alat untuk menurunkan pajak pendapatan atau jaminan hari tua, tetapi kelahiran bayi itu sendiri merupakan satu sumber kepuasan bagi orang tuanya, lalu orang tua sendiri juga dirinya secara pribadi penting bagi anaknya.

Begitu halnya dengan teman sepermainan, satu sama lain mempunyai nilai pribadi secara prinsip, oleh karena permainan itu sendiri memberikan kesenangan bagi mereka masing-masing bukan diperoleh dari sikap pemain yang disengaja. Dalam kehidupan yang persona, kawan-kawan mempunyai nilai yang besar, bukan karena adanya kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang bersifat ekonomis, atau karena adanya prestise sosial yang bisa diperoleh dari hubungan persahabatan itu, tetapi karena setiap partisipasi memperoleh kepuasan langsung dari adanya persahabatan itu sendiri.

Pada hubungan sekunder, yang impersonal, bagaimana-

pun juga, setiap partisipan memandang teman seassosiasinya, bukan sebagai sumber pemuasan langsung, bagi mereka masing-masing, tetapi hanya sebagai alat untuk tujuan selanjutnya. Jadi dalam hubungan sekunder, seorang pembeli di took, menganggap seorang penjual, bukan sebagai sumber kepuasan, sebagaimana dalam hubungan personal, tetapi hanya sebagai pembantu dalam transaksi jual beli.

Demikian juga pandangan kekotaan terhadap sopir taxi, penjual karcis di bioskop, polisi lalu lintas, petugas pemadam kebakaran, dokter dan ahli hukum, yang dianggap bukan sebagai sumber kepuasan yang unik bagi mereka itu sebagai pribadi-pribadi, tetapi hanya sebagai alat untuk tujuan yang impersonal, untuk memperoleh maksud-maksud eksternal yang inginkannya. Sebagian besar proporsi hubungan sosial kekotaan bersifat impersonal, hanya sebagian kecil saja yang bersifat personal, sebagaimana yang lazim terjadi dalam hubungan sosial pedesaan. Jadi hubungan sekunder yang impersonal dalam dunia kemasyarakatan kota adalah sangat bertentangan dengan hubungan sosial pedesaan yang personal dan primer.

(2) Hubungan Sekunder yang Kurang Akrab

Tingkat keakraban merupakan salah satu kriteria merupakan salah satu kriteria lain guna membedakan hubungan sekunder dengan hubungan primer. Keakraban hanya bisa terjadi dalam hubungan imbal balik atau berbalas-balasan, dimana setiap partisipasinya sendiri. Lalu memberikan kesempatan partisipan lainnya untuk membagi kenang-kenangan yang bersifat personal, demikian juga dan masalah-masalahnya. Keakraban dirinya sendiri sebagai nilai serupa dan sama untuk

pihak lainnya. Hal semacam ini hanya terjadi dalam pemuasan kelompok dengan jumlah pengikut yang sedikit.

Keintiman hanya bisa tercapai apabila ia ditawarkan secara bebas dan diterima secara bebas pula, dengan tidak menghitung-hitung biaya dan perolehannya secara rasional. Oleh karena itu maka keintiman tidak bisa timbul dalam perjuangan yang sifatnya kompetitif, atau didalam hubungan yang bersifat memeras. Dia hanya bisa dicapai dalam hubungan timbal balik melalui media interaksi pemuasan yang berbalas-balasan, saling memberi dan menerima serta saling bekerja sama satu sama lain.

Tingkat-tingkat kepribadian dan keakraban yang lebih tinggi sebagai ciri hubungan primer menuntut adanya peningkatan diferensiasi khusus yang individual sifatnya.

Dari uraian tersebut diatas nyatalah, bahwa kebanyakan hubungan sosial kekotaan mempunyaia tingkat ketidakakraban yang tinggi dalam manifestasi dan perwujudannya, hal mana adalah sangat berbeda dengan hubungan sosial pedesaan yang intim (akrab).

(3) Ciri formal hubungan sekunder

Hubungan-hubungan impersonal dan tidak akrab umumnya cenderung untuk memamerkan tingkat formalitas yang tinggi, disbanding dengan hubungan-hubungan personal dan intim. Dalam hubungan formal sifatnya, setiap partisipant cenderung mengikuti sikap dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Misalnya, pada resepsi kenegaraan, yang formal, etiket secara kaku menentukan jenis pakaian yang harus dipakai, begitu bidang dan topic pembicaraan dan konversi-konversi

lainnya tentang kesopanan, ditinjau dari para tamu secara individual.

Hubungan formal, yang diawasi oleh peraturan-peraturan yang terlalu rumit dengan kode-kode sikap tertentu, dalam proporsi yang tinggi, merupakan ciri khusus diantara kontak-kontak kekotaan, yang tidak biasa dijumpai dalam kontak-kontak sosial pedesaan. Jadi hubungan sekunder kekotaan senantiasa dituntun oleh peraturan-peraturan yang formal yang berbeda dengan hubungan primer yang spontan dan kurang diikat oleh peraturan-peraturan yang kaku.

Oleh karena kontak-kontak sekunder kurang berurusan dengan hubungan personal yang spontan dan intim, maka kontak-kontak semacam itu sering memamerkan tingkat emosional yang lebih rendah, biasanya kontak sekunder itu cenderung menjadi hubungan yang sifatnya dingin, rasional dan intelektual, halmana sangat berbeda dengan hubungan primer, yang lebih hangat dan emosional.

Hubungan Kekotaan tidak seluruhnya sekunder

Meskipun hubungan sekunder dan impersonal merupakan corak tertentu dari banyak aspek dunia kemasyarakatan kota, dan walaupun kualitas sekunder itu secara berulang kali memasuki hubungan-hubungan yang sifatnya intim dan personal, namun tidaklah dapat ditarik kesimpulan yang tergesa-gesa, bahwa hubungan-hubungan kekotaan itu secara eksklusif adalah sekunder, sebaba adakalanya terjadi, bahwa ada kelompok-kelompok primer yang merupakan bagian yang *essential* (inti) dalam dunia kemasyarakatan/warga kota.

Mayoritas penduduk kota mendapat asuhan dalam kel-

uarga-keluarga yang bersifat parental, lalu kawin mawin serta membina rumah tangga secara mandiri. Demikian juga halnya, kebanyakan warga kota sempat menikmati pengalaman-pengalaman dalam kelompok bermain yang intim dengan anak-anak tetangganya; oleh karena itu tidaklah mengherankan, jika kebanyakan orang-orang dewasa mempunyai teman-teman yang akrab.

Meskipun di pabrik-pabrik yang besar terdapat organisasi-organisasi informal dalam bentuk klik-klik, yang menyediakan kontak-kontak primer untuk semua pekerja, kecuali bagi segelintir solitaires (orang-orang yang hidup menyendiri), yang tidak mau berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kecil semacam itu.

Jadi tidaklah tepat jika diambil generalisasi, bahwa hubungan-hubungan kekotaan seluruhnya adalah sekunder, juga tidak boleh ada motifikasi, bahwa hubungan-hubungan sekunder adalah predominan di kota-kota, terutama dalam aspek-aspek yang lebih luas yang bisa membedakan hubungan sosial dalam dunia kemasyarakatan kota-kota metropolitan dengan masyarakat pertanian yang sederhana.

(1) Segmentasi Dunia Kekotaan secara Individual

Dalam masyarakat desa pertanian sederhana yang terisolasi setiap penduduk hidup dalam satu dunia kemasyarakatan yang kokoh kuat secara satu kesatuan non segregasi. Meskipun setiap anggota masyarakat boleh memilih dan memasuki kelompok-kelompok yang diinginkannya, seperti kelompok rumah tangga, kekeluargaan, persahabatan, kerja gotong royong dan berjamaah di masjid, namun anggota-anggota dari setiap kelompok semacam itu tetap saling mengenal

satu sama lain secara individual.

Laki-laki dewasa sebagai kepala rumah tangga bekerja disawah atau diladang dengan kawan-kawan sedusun mereka, anak-anak mereka ada yang bersekolah bersama dengan anak-anak tetangga, wanita-wanita dewasa sebagai ibu rumah tangga mengurus keperluan rumah tangga dibantu oleh anak-anak gadis mereka. Di desa pertanian dunia kemasyarakatan penduduk secara pribadi diwarnai oleh intergrasi sosial yang nyata, bukan oleh segmentasi individual.

Di kota-kota besar, dunia sosial mayoritas penduduk kota secara individual nampaknya terbagi dalam segmen-segmen yang relative berbeda satu sama lain, bahkan ada yang sebagian daripadanya yang terpisah dari kelompok-kelompok lainnya.

(2) Berbagai Segmentasi dalam kota

Ada beberapa penduduk kota yang mengalamai tingkast segmentasi secara luas, yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh penduduk lainnya. Ada beberapa diantaranya yang berpartisipasi di berbagai macam kelompok dari setiap bagian dunia sosial kota, yang agak terpisah dari bagian-gabian lainnya. Seorang laki-laki misalnya, bias membentuk keluarga yang dipeliharanya secara simultan di bagian kota yang berbeda, tanpa diketahui eksistensinya oleh salah satu dari keluarganya itu. Sebaliknya ada sementara penduduk kota yang hidup dalam dunia sosial kota yang diwarnai oleh segmen-segmen yang saling bertaut satu sama lain secara layak. Seorang istri misalnya, hanya mengalami sedikit segmentasi, jika dia mampu mengasiakan diri sendiri dengan urusan rumah tangga dan keluarganya. Dia hanya berkenalan dengan tetanga-tetangganya yang dik-

etahui oleh suaminya dan anak-anaknya hanya berpartisipasi dalam lembaga-lembaga tetangga setempat.

(3) Asosiasi sukarela dan segmentasi

Salah satu alasan utama bagi terjadinya segmentasi dalam dunia sosial kekotaan ialah karena banyaknya dan pentingnyaosiasi sukarela, dimana setiap warga kota dapat berpartisipasi. Ada beberapa penduduk yang mempunyai kepentingan yang sama berusaha membentuk asosiasi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka bersama missal, doctor dengan doctor, pengacara dengan pengacara, pengusaha dengan pengusaha, tanpa mempertimbangkan lokasi tempat kediaman masing-masing yang bersangkutan.

Affiasi dan aktivitas keagamaan juga bias menghasilkan kelompok-kelompok khusus bagi kepentingan penduduk kota tertentu, baik pria maupun wanita. Pemuda-pemuda berpartisipasi dalam aktivitas –aktivitas di sekolah dan kelompok permainan dengan teman-teman mereka yang sesuai dan sejenis kelamin, ada diantaranya yang berinisiatif membentuk kelompok-kelompok khusus. Oleh karena suatu variasi asosiasi sukarela meminta waktu dan energy yang tidak sedikit dari para peminatnya, maka segmentasi bagi mereka yang bersangkutan.

D.Kebudayaan yang Didominasi Kota

Salah satu pebedaan utama kebudayaan yang didominasi kota dan desa, ialah tingkat ketergantungan pada warisan kebudayaan. Dalam satu masyarakat pertanian, yang masih stabil hanya berubah secara pelan-pelan, tata cara kehidupan nenek moyang biasanya masih mampu memberi jawaban-

jawaban yang dapat diterima untuk memecahkan masalah hidup mereka sehari-hari. Kebijakan-kebijaksanaan yang terkumpul sejak generasi terdahulu, terutama yang mempunyai sanksi keagamaan dan di sekarang oleh mayoritas orang-orang yang lebih tua, menjadi sumber yang dominan dalam masyarakat itu dan tidak bias dihindari dari pengawasan penduduk desa yang bersangkutan pada umumnya.

Dalam masyarakat desa yang demikian, maka bentuk-bentuk tradisi kebiasaan-kebiasaan dan lembaga-lembaga sosial cenderung untuk diterima begitu saja, secara tidak diragukan dan dianggap mempunyai nilai kualitas yang sakral (suci), sehingga bebas dari kritik dan ujian yang obyektif.

Hal itu adalah sangat berlawanan dengan duni asosial yang didominasi oleh kata-kata, yang kompleks dan senantiasa mengalami kemajuan yang pesat dewasa ini, yang mendesak kepada penduduk kota untuk memilih dari serangkaian variasi kondisi kehidupan baru, yang menuntut adanya perubahan dalam kepercayaan – kepercayaan praktek-praktek yang tradisional.

Pengembangan sikap-sikap dan metode ilmiah serta peningkatan kepercayaan pada kemungkinan dapat diadakan pengawasan terhadap lingkungan hidup sekitar manusia, merupakan gambaran yang jelas tentang adanya transisi perubahan sikap dari penerimaan non kritis praktek-praktek tradisional ke ujian-ujian yang kritis.

Pengembangan sikap-sikap dan metode-metode ilmiah serta peningkatan kepercayaan pada kemungkinan dapat diadakan pengawasan terhadap lingkungan hidup sekitar manusia merupakan gambaran yang jelas tentang adanya transisi perubahan sikap dari penerimaan non kritis praktek-praktek

tradisional ke ujian-ujian yang kritis.

Kebudayaan kota dewasa ini sudah tiba pada satu fase yang memberikan semangat pada ujian-ujian yang serba kritis dan analisa data-data konklusi-konklusi tradisional yang skeptis, disamping penelitian yang berkesinambungan untuk mencari dan memperoleh jawaban-jawaban atas masalah hidup bermasyarakat yang lebih baik.

(1). Pengaruh dari berbagai lembaga

Perbedaan dasar yang kedua antara kebudayaan kota dan desa dapat dijumpai pada peranan dan darinya dari berbagai lembaga. Dalam masyarakat desa yang sedang dalam swasembada, pengawasan terhadap kehidupan individu tidak dapat dipisahkan dengan ikatan dan pertalian keluarga, begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang memainkan peranan yang lebih rendah dan kurang – kurang penting. Sebaliknya dengan pengawasan dalam masyarakat kota besar, yang sebagian besar tergantung pada lembaga super setempat secara besar-besaran.

(2) Perbedaan dalam aspek material

Perbedaan selanjutnya antara kebudayaan yang didominasi kota dan desa, dapat dijumpai pada benda-benda yang bersifat material. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semakin meningkatkan proses mekanisasi dan kemampuan industri yang beroperasi dalam kota, yang ditunjang oleh peningkatan dibidang transportasi dan komunikasi, secara langsung mau pun tidak langsung mempengaruhi, aktivitas, tingkat hidup dan stratifikasi sosial penduduk kota pada umumnya.

Letak bangunan yang saling berdekatan, sistem trans-

portasi dengan jaringan jalan-jalan yang serba teratur, mudahnya supply bahan pangan dari toko-toko, pemakaian listrik dan gas, pengawasan secara otomatis tenaga listrik, penerangan, panas dan udara, dan berbagai kemudahan yang dinikmati penduduk kota modern yang dijalankan secara nasional, menciptakan lingkungan hidup secara material tingkat tinggi bagi penyesuaian hidup warga kota.

Gambaran kebudayaan material, yang mempengaruhi lingkungan hidup material dari penduduk kota-kota modern selain menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara kebudayaan yang didominasi oleh kota-kota dan desa-desa, juga sekaligus dapat membawa pengaruh dalam perbedaan aspek-aspek non material dari kebudayaan kota-kota modern dan desa-desa pertanian yang sederhana.

Pengaruh lingkungan hidup terhadap kepribadian

Adapun kualitas-kualitas kepribadian (personalitas) manusia itu sebagian besar tergantung pada karakteristik lingkungan dimana manusia lahir, bertumbuh dan berkembang. Jadi pembentukan personalitas seseorang sedikit banyaknya terpengaruh oleh sifat-sifat kultural dunia sosial disekitarnya. Meskipun masih ada beberapa dasar kualitas tertentu sehubungan dengan personalitas yang memamerkan similaritas fundamental dari masyarakat ke masyarakat, tetapi oleh karena adanya kesamaan yang timbul-timbul berulang-ulang dalam proses hubungan sosial, maka ada aspek-aspek personalitas lainnya yang berbeda dengan variasi-variasi yang terdapat dalam lingkungan sosio kultural itu.

Adanya perbedaan kualitas personalitas semacam itu

bisa membantu menjelaskan perbedaan hubungan masyarakat pedesaan yang raih sederhana dengan masyarakat kota-kota.

Individualisasi yang ekstrem

Segmentasi pribadi yang menonjol dalam dunia sosial kota nampaknya cenderung memamerkan tingkat individualitas yang tinggi. Warga kota kelas tinggi dan menengah, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara luas dalam kelompok-kelompok sosial, mereka mempunyai kemungkinan memilih berbagai kontak-kontak khusus, dan mengatur banyaknya suatu yang mereka sediakan untuk setiap yang mereka ikut berpartisipasi aktif didalamnya.

Dalam membina kontak sosial, warga kota tidak jumpai adanya pembatasan-pembatasan, seperti yang dialami oleh penduduk desa-desa yang hanya mengadakan kontak terbatas dengan penduduk yang kecil jumlahnya dan serba homogen, yang senantiasa diawasi oleh tradisi dan adat istiadat setempat yang relatif stabil.

Jika karena sesuatu pertimbangan, warga kota tidak menyukai anggota-anggota, aktivitas-aktivitas atau pembatasan-pembatasan dari satu kelompok dimana ia menjadi anggotanya, maka ia mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk berpindah ke kelompok lain yang lebih disukainya. Jadi ketergantungan penduduk kota terhadap kelompok yang diikutinya lebih kurang dibanding dengan penduduk desa pertanian, yang tidak membutuhkan penerimaan ide-ide baru dari suatu kelompok khusus, dimana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih dan menyeleksi cara hidup mereka sendiri.

Secara ideal dapat dikatakan, bahwa penduduk kota bisa memilih kelompok-kelompok secara sukarela, dimana mereka bisa berpartisipasi untuk ikut membangun dunia sosial mereka sendiri, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri.

Individualisasi warga kota demikian itu memberikan kebebasan dan ketidak tergantungan yang cukup banyak, yang sangat berbeda dengan kebebasan pengembala-pengembala di pedesaan yang terisolasi ataupun dengan petani-petani yang swasembada.

Berbeda dengan petani-petani swasembada, penduduk kota adalah relatif tergantung pada berbagai variasi fungsi dan pekerjaan-pekerjaan spesialisasi untuk memenuhi kebutuhan material mereka, yang dipilih secara sukarela dari berbagai kontak-kontak kelompok sosial.

Selanjutnya kebebasan mereka itu tergantung pada adanya kesempatan membuat seleksi dari benda-benda material dan kontak-kontak sosial, secara individual dan sukarela, dari serangkaian kemungkinan pemilihan, tanpa ketergantungan yang ekstrem dan tanpa dominasi dari kelompok sosial manapun.

BAB VIII

PENGANGGURAN DAN SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Definisi pengangguran menurut Konferensi Internasional kedelapan Ahli Statistik Perburuhan di Jenewa tahun 1954 dinyatakan bahwa; penganggur adalah seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan agar memperoleh upah atau keuntungan. Namun istilah mencari pekerjaan seringkali mendapat kritik karena sebagian penganggur memang siap bekerja namun tidak mencari pekerjaan. Sikap tidak mencari pekerjaan tidak harus mengandung pengertian rendahnya keinginan untuk bekerja, tetapi kadang-kadang semata-mata mencerminkan perasaan bahwa tidak ada gunanya mencari pekerjaan. Bila mereka yang siap bekerja juga dihitung sebagai penganggur di kota, maka tingkat pengangguran akan naik cukup banyak, kondisi demikian menurut Turnham (dalam Manning, 1985) maka tingkat pengangguran itu bisa berlipat ganda

Selain perbedaan dalam definisi wilayah kota, maka sesungguhnya ada pula definisi yang bersifat umum yang digu-

nakan di negara sedang berkembang yang menetapkan penduduk 5.000 atau 2.000 jiwa sebagai batas terendah jumlah penduduk kota, batas yang jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan, baik implisit maupun eksplisit tentang masalah pengangguran di kota. Namun, ada kecenderungan yang kuat bahwa dalam kota dengan jumlah penduduk 2.000-20.000, sifat pengangguran itu lebih mirip sifat pengangguran di desa, yang mempunyai tingkat pengangguran relatif rendah. Berhubungan dengan kecenderungan itu timbul juga masalah urbanisasi dan strukturnya. Kenyataannya, dalam negara-negara dengan angka statistik atau perkiraan pengangguran di kota yang didasarkan pada definisi-definisi tentang pemukiman penduduk kota 2.000-5.000 jiwa, tingkat pengangguran di kota amat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang ada dalam pemukiman penduduk yang kecil, terutama bila pemukiman itu merupakan sebagian besar dari penduduk kota.

Tabel. 1 Tingkat Pengangguran di kota dan desa (persentase angkatan kerja)

Negara	Tahun	Pengangguran	
		Kota	Desa
Filipina	1967	13,1	6,9
India	1961-1962	3,2	1,7
Indonesia	1961	8,5	-
Iran	1956	4,5	1,8
	1966	5,5	11,3
Korea	1963-1964	7,0	1,8

Negara	Tahun	Pengangguran	
		Kota	Desa
Asia			
Malaysia (Barat)	1967	11,6	7,4
Muangthai	1966	2,8	-
Singapura	1966	9,1	-
Syiria	1967	7,3	-
Sri Lanka	1959-1960	14,3	10,0

Sumber : Bairoch

Usaha untuk memperkirakan tingkat pengangguran rata-rata di kota tidak banyak artinya karena tingkat itu terlalu berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dari tabel. 1 terlihat bahwa di negara-negara Asia pada tahun-tahun antara 1950 an sampai 1967 tingkat pengangguran di kota itu sangat tinggi dibandingkan dengan di desa.

B. Pengangguran dan Angkatan Kerja

Di hampir setiap negara, tingkat pengangguran di kota lebih tinggi daripada di desa, kecuali di Iran pada tahun 1966, tingkat pengangguran di kota dan di desa cukup berbeda, di kota tingkat pengangguran rata-rata 160 persen lebih tinggi daripada di desa. Meskipun amat bervariasi, perbedaan itu melebihi 90 persen di 60 persen negara dan melebihi 200 persen di 40 persen negara.

Enam sampai 8 juta penganggur di kota pada tahun 1950 merupakan 2 persen seluruh angkatan kerja, dan proporsi ini meningkat pada tahun 1970 menjadi 3,5 persen. Berdasarkan

tingkat pengangguran rata-rata 7,5 persen untuk seluruh angkatan kerja (laporan ILO pada sidang ke 53, tahun 1969), diperkirakan tingkat pengangguran di kota sebelum tahun 1977 lebih dari separuh penganggur di negara sedang berkembang akan menjadi penganggur di kota (Manning, 1985).

Apabila kita lihat keadaan masa kini, tidak dapat disangsikan bahwa tingkat pengangguran di kota negara industri jauh lebih rendah daripada tingkat pengangguran di kota negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan oleh cukup rendahnya tingkat pengangguran pada umumnya di negara maju. Untuk negara Barat, secara keseluruhan, pengangguran diperkirakan kurang dari 3 persen selama masa-masa pertumbuhan ekonomi dan sekitar 4,5 persen pada tahun-tahun resesi sehingga rata-rata selama periode sesudah perang mendekati 3 persen (kurang dari separuh tingkat pengangguran di negara sedang berkembang). Rendahnya tingkat pengangguran ini dan besarnya jumlah angkatan kerja di kota merupakan petunjuk rendahnya tingkat pengangguran di kota.

Salah satu ciri utama pengangguran di kota di negara-negara sedang berkembang adalah proporsi orang-orang muda yang menganggur pada umumnya jumlahnya cukup besar. Di hampir setiap negara tingkat pengangguran untuk kelompok umur 15-24 tahun lebih besar dua kali tingkat pengangguran untuk seluruh penduduk, yang tingkat penganggurannya memang amat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran penduduk usia muda.

Tabel. 2 Tingkat pengangguran di kota untuk kelompok umur 15-24 tahun dan semua kelompok umur (dalam persentase)

Negara Asia	Tahun	Kelompok umur 15-24 Tahun	Semua Kelompok Umur
Filipina	1965	20,6	11,6
India	1961-1962	8,0	3,2
Iran	1966	9,4	4,6
Malaysia	1965	21,0	9,8
Muangthai	1966	7,7	3,4
Singapura	1966	15,7	9,2
Sri Lanka	1968	39,0	15,0

Sumber : Turnham

Antara kelompok usia 15-24 tahun dan semua kelompok umur ada perbedaan tingkat pengangguran. Salah satu sebab tingginya angka pengangguran adalah besarnya arus migran yang masuk ke kota, terutama para migran yang baru. Perpindahan penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk pusat-pusat kota, akan tetapi perlu juga diingat bahwa pada umumnya pengangguran di antara para migran yang baru datang tidak lebih besar dari penduduk lainnya dan banyat sekali penganggur muda baru yang mencari pekerjaan

untuk pertama kali. Ciri pengangguran yang seperti ini tidak hanya terdapat di negara-negara sedang berkembang. Di negara-negara industri pun tingkat penganggurannya juga lebih tinggi di antara penduduk usia muda daripada di antara penduduk lainnya.

Menurut teori ekonomi tradisional, tingkat pengangguran yang tinggi maka upah semestinya menurun. Sebenarnya tidak dibutuhkan tingkat pengangguran yang tinggi untuk terjadinya penurunan upah, karena di negara sedang berkembang selalu terdapat kelebihan tenaga kerja yang berebutan untuk mendapat pekerjaan yang istimewa (*privileged jobs*) di sektor modern. Akan tetapi, bertentangan dengan teori, upah tenaga kerja yang biasanya terorganisir dengan baik di sektor modern tidak menurun. Perserikatan para pekerja tidak hanya menghalangi penurunan upah, melainkan juga berusaha untuk meningkatkannya, meskipun banyak pengangguran atau banyak buruh yang saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan.. Bahkan jika mereka tidak terorganisir, para pekerja sektor modern biasanya dilindungi dari eksploitasi yang sewenang-wenang melalui peraturan upah minimum dan tunjangan. Dalam kasus tersebut upah tidak dapat jatuh di bawah suatu tingkat tertentu, dan biasanya akan meningkat sejalan dengan atau lebih dari tingkat inflasi. Hal ini merupakan suatu perangsang bagi industrialis untuk menggunakan mesin padat modal.

Kekurangan lapangan pekerjaan paling dirasakan oleh mereka yang berumur antara 15 sampai 24 tahun, karena mereka pada umumnya berpendidikan lebih tinggi daripada orangtuanya, sehingga cenderung bertahan agar dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggi di sektor modern.

Tingkat pengangguran di tingkat umur ini hampir dua kali lipat tingkat pengangguran seluruh angkatan kerja, 30% sampai 50% dari seluruh angkatan kerja di berbagai negara bekerja pada sektor jasa yang sering disebut sebagai sektor informal kota (Tambunan, 1970).

Di negara- negara sedang berkembang pekerja yang menganggur di kota adalah orang-orang yang berpendidikan menengah, yakni pemuda yang pernah sekolah 6 sampai 11 tahun; di antara orang-orang seperti itulah tingkat pengangguran paling tinggi. Selanjutnya adalah mereka yang pendidikannya tidak lebih dari tingkat sekolah dasar atau mereka yang pernah bersekolah 1 sampai 5 tahun, kemudia diikuti oleh kaum yang buta huruf, dan akhirnya oleh mereka yang berpendidikan di atas tingkat menengah.

Tingkat pengangguran yang rendah di kalangan penduduk buta huruf khususnya disebabkan oleh karena kecenderungan yang kuat untuk bermigrasi di kalangan orang-orang muda yang terdidik, yang lantaran pendidikan mereka, enggan melakukan pekerjaan yang berstatus sosial rendah, pekerjaan tersebut dilakukan orang-orang yang buta huruf. Sedangkan tingkat pengangguran yang rendah di kalangan orang-orang yang berpendidikan tinggi disebabkan oleh kecilnya proporsi mereka dibandingkan penduduk secara keseluruhan., hal ini menyebabkan kualifikasi mereka sangat dihargai. Namun penduduk yang telah mencapai tingkat pendidikan yang tinggi tapi masih menganggur jumlahnya masih kecil, karena kenyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu perkembangan yang baru. Pada umumnya, pengangguran lebih banyak terjadi pada para pemuda yang nilai-nilai sekolahnya rendah., faktor ini seringkali diperhitungkan oleh para pengusaha ketika me-

milih karyawan.

Jumlah angkatan kerja yang mencapai 70 persen dari 110 juta orang angkatan kerja, menjadi permasalahan tersendiri pada sektor informal, karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita belum tentu memperbaiki tingkat kemiskinan, terutama jika pembangunan yang dilakukan tidak berorientasi pada rakyat miskin. Kegiatan pembangunan harus diukur dengan parameter, dimana dan berapa besar peningkatan kualitas hidup rakyat yang berada dilapisan paling miskin, atau *human development indeks (HDI)*.

Dari jumlah angkatan kerja yang cukup besar yang mencapai 70 persen dari jumlah angkatan kerja, mereka terus mempertahankan dan menyambung hidup sebagai pekerja atau pedagang kecil, seperti buruh tani, nelayan, pengemudi, ojek, penjahit, montir dan lain-lain. Pekerjaan mereka sangat rawan terhadap gejolak ekonomi, seperti harga bahan baku, tingkat suku bunga bank dan kredit bank serta ulah para tengkulak. Ketergantungan terhadap gejolak ekonomi ini, tidak boleh dianggap enteng karena sangat rawan dan muda bangkrut, sehingga muda menciptakan pengangguran baru yang bisa mengakibatkan gejolak sosial, untuk itu hal ini kita cegah sedini mungkin.

Dari hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development (IFAD)*, menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan “masyarakat dilapisan bawah”, telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar, dibanding dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang besar.

Ada yang berpendapat bahwa kesempatan kerja di sektor industri dan urbanisasi yang dialami oleh negara maju seha-

rusnya tidak dianggap satu-satunya modal. Pengalaman negara sedang berkembang lebih menyerupai apa yang seharusnya diharapkan dalam proses pembangunan ekonomi. Meskipun begitu, nampaknya sudah disepakati secara umum bahwa sifat padat modal dari teknologi industri modern menghambat penyerapan tenaga kerja yang setiap tahunnya membengkak di kota. Dibandingkan dengan tingkat pembangunan dan urbanisasi yang sama di negara industri, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri tidak sama banyaknya di negara sedang berkembang, dengan adanya sektor informal akan menjembatani kedua hal ini, namun dapat diragukan karena pertumbuhan sektor jasa sangat tergantung pada pertumbuhan sektor modern. Selain itu, data menunjukkan peningkatan pengangguran dan setengah pengangguran yang cukup besar di kota mencerminkan keterbatasan peranan kegiatan sektor informal yang produktif.

Kinerja ketenagakerjaan dalam laporan perekonomian nasional pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kondisi ketenagakerjaan pada kurun waktu Februari 2005 sampai dengan Agustus 2007 membaik, yang ditandai oleh kenaikan jumlah kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja dari 94,9 juta orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 102,5 juta orang pada tahun 2009. Namun pada periode yang sama tercatat ada pengangguran terbuka 10,8 juta orang atau 10,3 % dari angkatan kerja pada tahun 2005 dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menyisakan pengangguran terbuka sekitar 9,3 juta orang atau 8,2 % dari seluruh angkatan kerja.

Tabel. 3. Perbandingan Angkatan Kerja, Pekerja dan Pengangguran Terbuka Februari 2005 – Februari 2009

Tahun	Angkatan Kerja (juta orang)	Pekerja (Juta orang)	Pengangguran Terbuka (Juta orang)	TPT (persen)
Februari 2005	105,80	94,95	10,85	10,26
November 2005	105,86	93,96	11,90	11,24
Februari 2006	106,28	95,18	11,10	10,45
Agustus 2006	106,39	95,46	10,93	10,28
Februari 2007	108,13	97,58	10,55	9,75
Agustus 2007	109,94	99,93	10,01	9,11
Februari 2008	111,47	102,04	9,42	8,46
Agustus 2008	111,94	102,55	9,39	8,39
Februari 2009	113,74	104,49	9,26	8,14

Sumber : Kolopaking *et.al*

Jumlah penurunan pengangguran terbuka belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh penyediaan peluang kerja akibat tingginya angkatan kerja yang masuk ke lapangan pekerjaan. Terlebih tahun 2008 terjadi pengurangan lapangan

kerja. Sampai Juni 2009 tercatat dampak krisis keuangan telah mengakibatkan 53.388 orang terkena PHK dan 23.440 orang dirumahkan. Para pekerja yang terkena PHK ini terutama mereka yang bekerja di sektor manufaktur, elektronik dan produk tekstil, sepatu, kerajinan, plastik, kertas dan pulp yang umumnya berorientasi ekspor. Alasan pengusaha melakukan PHK dan merumahkan pekerja antara lain, akibat penurunan permintaan pasar ekspor dan domestik, krisis bahan baku yang diimpor, tidak mampu berkompetisi dengan produk impor yang sejenis dihasilkan tetapi harganya lebih murah di pasar domestik.

Dampak krisis keuangan terhadap PHK tenaga kerja dalam periode 2008-2009 berlangsung bertahap mengenai berbagai daerah tempat lokasi perusahaan. Misalnya di kawasan industri Tangerang, Bekasi, Karawang dan Sukabumi di Jawa Barat. Juga di kawasan industri di Semarang Jawa Tengah dan kawasan industri Surabaya dan Sidoarjo di Jawa Timur. Daerah yang juga merasakan dampak krisis di luar Jawa utamanya yang ada di Sumatera (seperti di Propinsi Riau dan Sumatera Utara) serta di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).

Dalam pengendalian dampak krisis ini, pemerintah cenderung melakukan pencegahan PHK. Satu kebijakan yang berkaitan dengan hal itu adalah dikeluarkannya Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri (Tenaga kerja dan Transmigrasi, Dalam Negeri, Perindustrian dan Perdagangan) tentang pemeliharaan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global.

Kebijakan ini dinilai efektif karena dapat menurunkan jumlah penganggur sekitar 500.000 orang. Tabel 3 terlihat

tentang perkembangan jumlah pengangguran terbuka pada periode antara Agustus 2008 sampai Februari 2009. Dari kajian lapangan diketahui bahwa PHK juga terjadi di kalangan petani perkebunan rakyat dan buruhnya yang bekerja di sektor ekonomi pedesaan yang juga terkena dampak negatif Krisial, seperti perkebunan-perkebunan kelapa sawit, karet dan coklat di Sumatera dan Kalimantan yang terpaksa menghentikan kegiatan usaha akibat jatuhnya harga jual pokok mereka. Dengan jatuhnya harga produk pertanian yang mereka hasilkan, maka mereka menghentikan kegiatan dan bahkan tidak menarik buruh kerja. Mereka ini yang dapat disebut sebagai korban krisis keuangan 2008 dengan status PHK tersembunyi.

Krisis Keuangan 2008 yang terjadi dapat menambah tingkat krisis ketenagakerjaan yang selama ini ada. Kondisi ini pada gilirannya menambah beban kehidupan. Terlebih lagi, akibat berkurangnya peluang kerja yang menurunkan kemampuan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan yang memperoleh penghasilan ternyata diikuti oleh peningkatan harga bahan-bahan pokok.

Tingkat resistensi sosial masyarakat pedesaan yang cukup tinggi dalam menyikapi kekurangan peluang kerja yang memberi pendapatan yang layak. Salah satu respon dari angkatan kerja pedesaan adalah dengan melakukan migrasi mencari kerja untuk mendapatkan pendapatan yang cukup. Prosesnya mulai dari melakukan migrasi sekuler desa-kota, urbanisasi sampai mencari kerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Mereka ini juga banyak membentuk usaha-usaha di sektor informal di perkotaan.



Gambar 7. Sektor Informal di Perkotaan

<http://zoodeen.blogspot.com/2015/02/gender-dan-sektor-informal.html>

<https://islambergerak.com/wp-content/uploads/2015/03/informal-worker.jpg>

sektor+informal+di+perkotaan&tbm=isch&safe=strict&chips

Arus migrasi desa kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor industri modern di kota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migran memiliki *skill* atau kemampuan untuk masuk ke sektor industri modern tersebut. Hal ini mengakibatkan para migran yang tidak dapat masuk ke sektor modern lebih memilih sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki. Agar tetap bertahan hidup (*survive*) para migran yang tinggal di kota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak

memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap.

Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Selain kondisi ekonomi mengalami kontraksi parah, usaha kecil di propinsi-propinsi di pulau Jawa juga lebih menderita akibat krisis ekonomi. Sementara itu, menurut hasil analisis Watterberg, dkk (1999), dampak sosial dari krisis ekonomi amat terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan di Jawa, serta sejumlah propinsi di Indonesia bagian Timur. Dengan kata lain, terdapat indikasi adanya dimensi spasial dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.

Kondisi ketenagakerjaan pada masa krisis kiranya dapat memberikan gambaran dampak sosial dari krisis ekonomi (Tabel 4). Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Krisis ekonomi juga telah membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya pangsa pekerja sektor formal menjadi 35,1. Dengan kata lain, peran sektor informal menjadi terasa penting dalam periode krisis ekonomi. Sektor informal sendiri merupakan sektor dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada.

Tabel. 4. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia, 1996 dan 2000

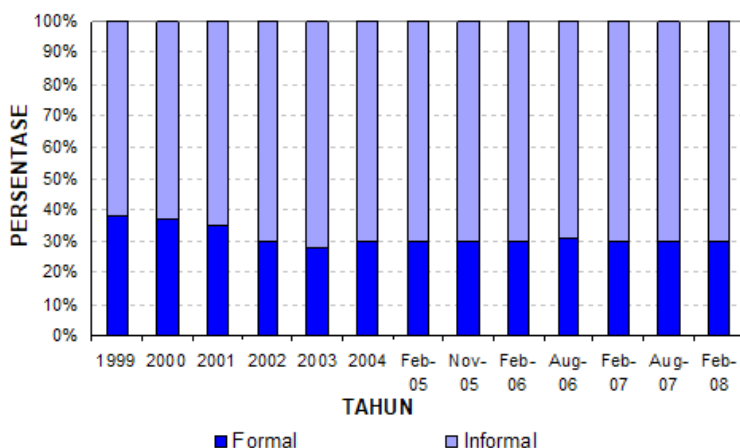
Karakteristik	1996	2000
Angkatan kerja (juta)	88,2	95,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,9	67,8
Angkatan Kerja Perkotaan (%)	33,9	39,3
Pekerja Sektor Formal (%)	37,9	35,1
Pekerja Paruh Waktu (%)	33,3	26,7
Tingkat Pengangguran(%)	4,9	6,1

Sumber : Sakernas, dikutip dari Suryahadi, dkk (2003)

Pada masa krisis keuangan 1998, usaha-usaha sektor informal menjadi “*safety valve*” masyarakat untuk bertahan hidup menahan badai ekonomi. Usaha-usaha informal ini umumnya bersifat usaha mandiri dengan skala kecil sampai menengah. Di pedesaan, selain usaha di sektor pertanian cenderung berkembang juga usaha yang bergerak di sektor “jasa dan dagang”. Sedangkan di perkotaan, polanya cenderung dalam bentuk usaha “jasa dan dagang”. Resistensi sosial menghadapi badai krisis keuangan juga diduga adalah dampak kehadiran sektor ini. Hal ini karena secara umum usaha-usaha yang cenderung digeluti masyarakat ini berada di sektor informal. Namun, pemerintah belum terlalu memperhitungkan peran besar usaha-usaha sektor informal yang membantu masyarakat banyak menyelamatkan diri dari hantaman krisis keuangan 2008.

Dalam menemukan atau membuka peluang kerja, angkatan kerja pedesaan terpaksa harus melakukannya dengan migrasi oleh karena pembangunan yang dilaksanakan di dalam negeri cenderung meminggirkan pedesaan. Pembukaan la-

pangan kerja dengan migrasi ini sampai mendorong mereka bekerja di luar negeri. Angkatan kerja pedesaan telah menginternasional karena bekerja hampir diseluruh dunia. Hanya saja, karena tawaran kerja yang ada dari negara tujuan bekerja kebanyakan adalah sebagai penetalaksana rumahtangga (yang termasuk juga peluang kerja sektor informal), maka prosesnya cenderung mengisi sektor ini dengan lebih banyak melibatkan perempuan.



Sumber : Bappenas, 2009

Gambar. Perkembangan Proporsi Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, 1999 sampai Februari 2008

Kondisi ketenagakerjaan pedesaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah menjadikan pemerintah menyiapkan tiga kebijakan strategis untuk menghadapi goncangan ekonomi yang mengikuti krisis keuangan. *Pertama*, membentuk lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Untuk itu maka penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih

diarahkan pada penempatan tenaga terampil yang bekerja di sektor formal. *Kedua*, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. *Ketiga*, peningkatan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja informal.

Selain itu, melakukan tindakan untuk mengurangi beban masyarakat melalui program stimulus fiskal. Program ini dipandang akan efektif apabila disalurkan untuk menopang pengembangan pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu untuk membiayai program padat karya dalam kerangka meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas sosial ekonomi pedesaan secara terukur agar meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di sektor agro-industri. Dengan dasar, pembiayaan mikro khusus perlu dilaksanakan dalam hal ini (Siregar dan Masyitho, 2009).

Dampak krisis keuangan yang berbeda-beda dibanding dengan krisis Moneter pada tahun 1997/1998 memang membuat pemerintah menetapkan kebijakan yang sedikit berbeda. Selain menyiapkan dana untuk mengendalikan dampak KRISIAL untuk penyelamatan sektor finansial, juga menyiapkan kebijakan menggerakkan sektor riil melalui kebijakan Stimulus Fiskal, hal ini terutama untuk perluasan peluang kerja.

Apabila di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, penyelesaian krisis adalah membuka peluang bekerja secara besar-besaran. Untuk negara kita, dengan arah yang sama tetapi dengan mengutamakan penguatan UMKM. Dalam konteks ini, lembaga keuangan, seyogyanya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, terutama agribisnis/agroindustri dan UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, professional dan bersifat universal. Di pihak lain, proses itu perlu sekaligus digunakan untuk

melakukan pengembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan pola pengelolaan potensi sumber daya dan ekonomi lokal didalam suatu sistem yang menggerakkan dan memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Penetapan agribisnis / agroindustri dan UMKM tersebut juga perlu dijadikan dasar pembangunan secara struktural sebagai satu media juga mengembangkan sistem pendanaan yang tidak hanya akan dapat memacu perbaikan perekonomian, tetapi juga mendukung kondisi sosial, politik, moralitas kehidupan negara dan bangsa ke arah yang lebih baik.

Artinya, penggalakan sektor riil melalui pengembangan UMKM menjadi sebuah sistem penggalian nilai etik dan moral untuk pengembangan kelembagaan ekonomi untuk kemajuan suatu masyarakat. Proses itu juga perlu sejalan dengan pengembangan landasan etik dan moral bagi individu dan penyelenggara pemerintahan. Pengembangan UMKM tidak saja menjadikan pelakunya sebagai makhluk ekonomi, tetapi makhluk ekonomi yang beretika dan menjunjung tinggi norma mencari kebaikan untuk semua orang. Dasar hubungan antara individu dalam transaksi selalu ditujukan atas dasar kerelaan dan untuk kebaikan semua. Pada akhirnya sudah jelas yaitu bahwa ekonomi Indonesia berkembang dengan memberi tempat pada berbagai bangun usaha yang berkembang dan usaha modern baik skala mikro, kecil, menengah dan besar secara berkeadilan.

Pengembangan sektor informal pada dasarnya adalah pemberdayaan yang inisiatifnya berasal dari pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hal-hal yang

diatur dalam hal ini antara lain, pertama menumbuhkan prakarsa sendiri, kedua mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, ketiga, meningkatkan daya saing UMKM, keempat, menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara sinergis, dan kelima, menjadi perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Sektor informal sebagai sebuah pilar utama pembangunan sejatinya masih memiliki banyak permasalahan dalam pengembangan dan perkembangannya. Sekurangnya yang menjadi permasalahan dalam perkembangan sektor informal saat ini adalah :

1. Resistensi pihak perbankan untuk memberikan pendanaan
2. Membantu masyarakat yang bergerak dalam sektor informal untuk mengakses pendanaan
3. Perbankan dan lembaga keuangan lain belum memiliki peta informasi produksi di sektor riil
4. Infrastruktur usaha tidak mendukung
5. Program kemitraan belum berjalan
6. Tingginya tingkat suku bunga perbankan

C.Sektor Informal dan Peluang Kerja di Perkotaan

Gagasan mengatasi pengangguran melalui pemberdayaan sektor informal bukanlah hal yang baru. Krisis ketenagakerjaan adalah gejala yang masih melekat didalam perjalanan ekonomi nasional. Ada kecenderungan bahwa sektor perbankan tidak berani menyalurkan kredit kepada usaha-usaha pada sektor informal sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran. Pengangguran yang tinggi terutama dialami kaum

muda yang baru menyelesaikan pendidikan lanjutan, yang kebanyakan berasal dari masyarakat kota kelas menengah. Aspirasi untuk pekerjaan di kantor di sektor modern dianggap sebagai sebab utama pengangguran yang dialami kelompok ini dan berhubungan dengan kurangnya lapangan pekerjaan baru yang dapat memenuhi harapan mereka tersebut. Sebagian besar migran desa-kota dapat tertampung sebagai pekerja miskin di sektor tersier.

Mengatasi krisis ketenagakerjaan pada hakikatnya berkaitan dengan transformasi struktural suatu negara. Berdasarkan pengamatan terhadap transformasi dari berbagai negara, setidaknya ada tiga jalan yang ditempuh. *Pertama*, transformasi melalui pengembangan system usaha tani kapitalistik, yang dapat melibatkan pembentukan satuan-satuan produksi berskala besar dan menyerap hampir semua sektor pertanian kecil. *Kedua*, transformasi melalui pembentukan usaha tani koperasi berskala besar yang diprakarsai pemerintah; usaha tani kolektif atau usaha tani negara. *Ketiga*, transformasi atas dasar pengembangan model usaha tani atau usaha berskala kecil yang padat modal (Harris, 1982)

Ketidakpastian penentuan kebijakan transformasi struktural diwarnai gejala ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antara sektor keuangan dengan sektor riil. Selama lima tahun dinamika pertumbuhan ekonomi masih terus menyisakan pengangguran, sehingga belum mampu menyelesaikan krisis ketenagakerjaan secara mendasar. Krisis keuangan global tahun 2008 telah mendorong semakin banyaknya pengangguran akibat PHK, mendorong juga PHK tersembunyi akibat sektor-sektor usaha yang berkembang dengan orientasi sektor usaha mengalami masalah yang juga menghilangkan

kesempatan kerja untuk buruh-buruh yang tidak tercatat.

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Apa yang digambarkan oleh Hart memang dirasakan belum cukup dalam memahami pengertian sektor informal yang sesungguhnya. Ketidajelasan definisi sektor informal tersebut sering dilengkapi dengan suatu daftar kegiatan yang agak arbiter yang terlihat apabila kita menyusuri jalan-jalan suatu kota Dunia Ketiga : pedagang kaki lima, penjual koran, pengamen, pengemis, pedagang asongan, pelacur dll. Mereka merupakan pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil dengan pendapatan rendah dan tidak tetap.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pekerja di sektor formal adalah orang yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan orang yang berusaha dibantu dengan buruh tetap. Mengacu pada definisi BPS tersebut, jumlah pekerja di sektor formal tercatat 32,14 juta orang atau hanya 30,65 persen dari total pekerja per Agustus 2009. Sebagian besar atau 67,86 juta orang bekerja di sektor informal. Korban PHK krisis ekonomi global yang dampaknya mulai terasa sejak akhir 2008., membuat banyak industri manufaktur mengurangi jumlah pekerja mereka. Penurunan permintaan dari pasar ekspor menjadi penyebab utama perusahaan nasional mengurangi kegiatan produksi mereka. Para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut akhirnya harus beralih ke sektor informal dan kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup (*survival*). Mereka ting-

gal di pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi, kesehatan dan pendidikan yang sangat minim.

Sektor tersebut dinilai rentan karena pekerja di sektor informal tidak memiliki jaminan kesehatan dan pendapatan yang tetap dan layak untuk membiayai hidup mereka. Produktivitas di sektor ini juga jauh lebih rendah dibandingkan pekerja yang bekerja di sektor formal.

Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk di dalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual Koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lain-lainnya. Mereka dapat dijumpai di pinggir-pinggir jalan di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau oleh golongan tersebut. Tetapi tidak jarang mereka yang berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Batasan mengenai sektor informal sebagai sebuah fenomena yang sering muncul diperkotaan masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria sektor formal yang terorganisir, terdaftar dan dilindungi oleh hukum, dimasukkan kedalam sektor informal, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri “. Dengan kata lain sektor informal merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*) dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar, sulit dicacah dan sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan

kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Di negara-negara sedang berkembang (NSB), sekitar 30-70 persen populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. (www.ugm.ac.id/index.php?page-rilis)

Sektor informal memberikan kemungkinan kepada tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Sektor informal sangat berkaitan dengan sektor formal di perkotaan. Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang-barang bagi pekerja di sektor formal. Sebaliknya, sektor informal tergantung dari pertumbuhan di sektor formal. Sektor informal kadang-kadang justru mensubsidi sektor formal dengan menyediakan barang-barang dan kebutuhan dasar yang murah bagi pekerja di sektor formal. Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya. Sektor informal juga sering terkait dengan

pengolahan limbah atau sampah. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal.

Teori ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kaum miskin berada pada sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara kemiskinan perkotaan yang terjadi dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Jika ketrampilan merupakan cerminan kasar dari tingkat pendidikan, sebagai gambaran pada tahun 1998, sekitar 82 persen pekerja di sektor informal berpendidikan SD ke bawah, SLTP 11,6 persen, SLTA 6,2 persen dan diploma/universitas 0,2 persen. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya produktivitas, sehingga pada dasarnya penambahan kesempatan kerja baru di sektor informal tidak dapat meningkatkan produktivitas.

Peningkatan keterampilan tidak harus memerlukan biaya sangat tinggi karena itu bisa dilakukan secara kerjasama dengan lembaga non profit. Hal yang sama juga untuk penataan performa usaha, lembaga non profit yang memiliki kapasitas di bidang ini dapat di ajak kerjasama dengan pemda. Kerjasama antara pemda dan lembaga non profit ini akan bermanfaat ganda, yakni selain bisa menekan biaya juga membuat program berjalan lebih efektif karena pelaku sektor informal umumnya masih respek terhadap lembaga-lembaga non profit dibanding kepada pemerintah daerah. Pemerintah lebih memilih pasif daripada aktif dan lebih memilih berkelit daripada berbuat, termasuk dalam membenahi sektor infor-

mal. Mudah-mudahan kelalaian ini tidak sampai berkembang menjadi parah. Kalau tidak, kita hanya bisa melihat kota-kota yang super semrawut dan tidak aman.

D.Penataan dan Pembinaan Sektor Informal

Masalah lain menyangkut pendekatan pembinaan yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal, sebab tidak sedikit di kalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah. Mengingat hal tersebut, perlu kiranya dibedakan unit-unit sektor informal dengan usaha kecil karena akan berimplikasi operasional. Umumnya, usaha kecil cenderung berorientasi keuntungan dan sudah didukung keterampilan yang memadai.

Masalah yang dihadapi pengusaha kecil lebih condong pada peningkatan kemampuan manajerial dan peluang lebih besar dalam mendapatkan dukungan permodalan. Perbedaan karakteristik ini mengisyaratkan bahwa pola pendekatan untuk membantu sektor informal haruslah berbeda dengan usaha kecil. Program pengembangan usaha kecil lebih mengarah pada pembinaan manajemen usaha dan pemberian kemudahan mendapatkan kredit modal kerja/ perluasan usaha. Sedangkan orientasi pembinaan unit-unit sektor informal yang tidak tergolong usaha formal kecil adalah pada peningkatan keterampilan, pendidikan dan penataan performa usaha. Ciri-ciri pekerja sektor informal juga menunjukkan bahwa mereka tidak selalu dapat mengartikulasikan dan menetapkan kebutu-

hannya. Dalam hal ini perlu dicatat, meskipun berbagai usaha telah dilakukan pada waktu lalu untuk membantu sektor ini, usaha ini tidak selalu sesuai dengan harapan, misalnya seperti operasi Hari Esok Penuh Harapan (HEPH) yang dicanangkan pemerintah pada awal tahun 90-an.

Kelemahan-kelemahan ini sebagian disebabkan oleh fokus yang kurang jelas terhadap kebutuhan dan kegagalan dalam menilai kemampuan unit-unit sektor informal untuk menyerap bantuan. Dengan kata lain, tidak seperti pada program pengembangan usaha kecil, program yang ditujukan pada sektor informal harus dapat menciptakan kepercayaan, membantu mereka dalam menetapkan kebutuhannya atas berbagai bentuk bantuan, mengetahui hubungan antara berbagai bentuk bantuan dan menilai kemampuan mereka untuk menyerap bantuan. (www.theindonesianinstitute.org/daily/2002.htm.)

Di sisi lain, meskipun pekerja sektor informal membutuhkan berbagai bentuk bantuan, tipis harapan mereka akan mendapatkannya. Hal ini disebabkan, banyak kalangan mencurigai kemauan baik atau menyangsikan kemampuan pemerintah daerah untuk membantu mereka. Tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan umum terhadap sektor ini di berbagai negara malah 'dimusuhi' sehingga mengurangi kredibilitas program, seperti operasi HEPH. Tampaknya penting untuk memulihkan keadaan ini melalui perubahan dalam kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah. Dalam hal ini, lembaga-lembaga sukarela atau LSM-LSM dapat memainkan peranan positif yang berguna membantu sektor informal. Pendekatan tersebut diperlukan agar dapat mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan (misalnya: kredit, keterampilan, peralatan, teknologi pemasaran, prasarana) dan memberikan paket yang

disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Banyak negara berkembang telah menerapkan kebijakan dan pendekatan baru dalam pengembangan sektor informal. Pemerintah Ghana misalnya, menerapkan kebijakan bantuan khusus seperti penyediaan tempat atau kios untuk membangun kinerja unit-unit sektor informal yang lebih baik. India berusaha meningkatkan kredit melalui program-program khusus untuk golongan lemah dan sektor informal, serta mengembangkan kemudahan dalam pemasaran. Sedangkan Filipina berusaha memberikan keterampilan sebagai suatu sarana untuk mobilitas pekerjaan. Sudah sangat diperlukan reorientasi pembinaan yang mengacu pada peningkatan keterampilan, penataan performa usaha dan wilayah pemasaran. Selain itu, perlu adanya penataan aturan yang seimbang untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang terhadap pelaku sektor informal dan sekaligus untuk menghindari kota dari kesemrawutan. Bagaimanapun, sektor informal yang tidak terkendali akan cenderung menyebabkan ketidaktertiban kota, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah punya komitmen untuk membenahi sektor informal.

Dalam membahas mengenai pengangguran dan sektor informal di kota maka tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan di perkotaan, dalam hal ini ada dua teori yang perlu diperhatikan . Pertama adalah Teori Marjinalitas, tentang kaum miskin kota, dalam Teori Marjinalitas yang menjelaskan tentang pemukiman kumuh, melihat bahwa kaum miskin sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota. Secara sosial, memiliki ciri-ciri yang mengungkapkan adanya disorganisasi internal dan isolasi eksternal. Secara budaya, mereka

mengikuti pola hidup tradisional perdesaan dan terkungkung dalam "budaya kemiskinan". Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak menyerap sumber daya kota daripada menyumbangannya, boros, konsumtif, cepat puas, tidak berorientasi pasar, tidak berjiwa wiraswata, berproduksi secara pas-pasan. Secara politik, mereka berwatak apatis, tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik revolusioner karena frustrasi, disorganisasi sosial dan ketidakpastian yang mereka alami.

Sebaliknya, dalam Teori Ketergantungan, masyarakat miskin kota tersebut dilihat sebagai pendatang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka adalah bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, pedagang kecil, pemulung sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Secara budaya, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan golongan lain seperti ingin hidup lebih baik, kerja keras, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi, di mata golongan yang berkuasa, mereka dipandang rendah, sumber malapetaka kota seperti kejahatan, pelacuran, dan kekotoran. Secara ekonomis, mereka lebih banyak memberi daripada menerima. Merekalah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota.

Teori Ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kaum miskin kota berada pada sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara kemiski-

nan perkotaan yang terjadi dengan sektor informal. Sektor informal sering kali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus.. Konsep tentang sektor formal dan sektor informal tersebut bukan tanpa perdebatan.

ILO dan Bank Dunia memandang hubungan yang ada antara sektor formal dan sektor informal sebagai diskriminasi terhadap dua sektor ekonomi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Potensi sektor informal terhambat karena kondisi pasar yang tersedia bagi sektor formal lebih menguntungkan, terutama berkat perlindungan dan dukungan pemerintah sehingga sektor informal tidak mampu terintegrasi secara baik ke dalam pasar namun di negara-negara berkembang, kapitalisme belum mampu membawa berkah kekayaan kepada masyarakat. Prinsip pemecahan yang diusulkan terhadap masalah tersebut adalah dengan memberikan perlakuan yang seimbang dan peningkatan kesaling-mengisian di antara kedua sektor tersebut. Untuk itu, perlu diakhiri diskriminasi yang merugikan sektor informal, sektor yang dianggap sebagai sumber pembangunan yang paling memberikan harapan. Di samping penghapusan diskriminasi melalui peraturan, pembela sektor informal juga mengusulkan agar pemerintah mengambil kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan sektor informal melalui berbagai fasilitas seperti bantuan kredit, bimbingan manajerial, peningkatan keterampilan, promosi pemasaran, pemasokan bahan mentah. Dengan usaha-usaha ini, diharapkan tercipta hubungan yang seimbang, koperatif, dan saling menguntungkan antara kedua sektor yang berdampingan tersebut. Dengan demikian, sedikit demi sedikit ketimpangan

- ketimpangan struktural (*structural inequality*) yang dikutuk selama ini dapat dihilangkan.

Konsep ini mendapatkan kritik tajam dari Leys. Menurut Leys, konsep dan garis-garis kebijakan ILO tentang sektor informal tersebut akan memacu berkembangnya kapitalisme lokal yang otonom berdasarkan pemerasan tenaga kerja murah. Penelitian telah menunjukkan bahwa program-program resmi yang bertujuan untuk merangsang industri di sektor informal tidak banyak bermanfaat. Peningkatan bantuan negara tidak bisa diharapkan selama sistem politiknya didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan sektor formal. Situasi ini mengandung paradoks, karena perubahan kebijakan yang dianjurkan akan merugikan kaum elit yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Dengan mengabaikan kenyataan ini, misi ILO di Kenya melakukan kesalahan akibat kenaifan. Berman, berdasarkan berbagai penelitian, berkesimpulan bahwa hubungan antara sektor informal dan sektor formal tidak bisa dilihat sebagai dualitas dari dua sektor yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai hubungan ketergantungan. (Manning, 1985).

Kegiatan informal masih dominan dalam perekonomian suatu daerah karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sehingga sering disebut sebagai “katup pengaman” ketenagakerjaan. Diyakini bahwa dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya, jumlah pencari kerja (penganggur) akan berkurang dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Beberapa penelitian berbicara sebaliknya, justru meningkatnya kegiatan informal sebagai ciri kemiskinan yang nota bene bukan semakin sejahtera. Oleh sebab itu diberbagai negara berkembang maraknya sektor in-

formal yang mampu menekan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan malahan menurun daya belinya.

Data mengenai kegiatan informal dapat diperoleh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dilakukan dua kali dalam setahun. Melalui status pekerja, kegiatan informal dapat diperkirakan dari jumlah pekerja yang bekerja sendiri (tanpa bantuan orang lain); berusaha dengan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga; pekerja keluarga; pekerja bebas pertanian maupun non-pertanian. Sebaliknya kegiatan formal adalah pekerja (karyawan) atau buruh; dan berusaha dengan pekerja tetap/dibayar. Intinya adalah kegiatan informal secara kasat mata merupakan kegiatan ekonomi yang biasanya tidak berbadan hukum; omzet relatif kecil; mudah berganti usaha dan lokasi usaha (*mobile*); sering melanggar peraturan daerah tentang ketertiban; produktivitas pekerja rendah dan tidak membutuhkan ketrampilan atau persyaratan khusus bagi tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja (*free entry and free exits*).

Namun, pertumbuhan sektor informal yang cukup pesat tanpa ada penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Sebagaimana kita ketahui, banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi *Public Space*. *Public Space* merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Tempat umum tersebut bisa berupa taman, trotoar, halte bus, dan lain-lain.

Trotoar yang digunakan untuk berjualan dapat mengganggu para pejalan kaki, seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas karena para konsumen pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dipinggir

jalan. Ketidakteraturan tersebut mengakibatkan *Public Space* kelihatan kumuh sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai ataupun berkomunikasi.

Untuk mengatasi masalah sektor informal, diperlukan ketegasan dari pemerintah kota. Selama ini, pemerintah hanya melakukan “penertiban” dalam mengatasi masalah sektor informal. Namun hal tersebut terbukti tidak efektif, karena setelah para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan maka beberapa hari kemudian mereka akan kembali ketempat semula untuk berjualan. Selain itu, ada kecenderungan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut diperjualbelikan, padahal mereka berjualan dilokasi *Public Space* yang merupakan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah kota adalah relokasi bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah harus menyediakan tempat yang dapat digunakan mereka untuk berjualan. Hal tersebut ditujukan agar pedagang kaki lima tidak mengganggu kepentingan umum karena berjualan dilokasi *Public Space*. Selain itu, relokalisasi dapat menumbuhkan perasaan aman bagi pedagang karena mereka tidak perlu khawatir ditertibkan oleh aparat pemerintah.

Selain itu, pemerintah harus melakukan proteksi bagi pedagang kaki lima sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan oleh sektor informal. Proteksi tersebut ditujukan agar pedagang kaki lima tersebut tidak kalah bersaing dengan pedagang besar yang telah memiliki nama. Karena apabila mereka sampai kalah bersaing dan harus gulung tikar, itu berarti akan terjadi pengurangan kesempatan kerja.

Sektor informal sebagai sektor alternatif bagi para migran cukup memberikan sumbangan bagi pembangunan

perkotaan. Selain membuka kesempatan kerja, sektor informal juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kota. Namun, pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa mendapat penanganan yang baik dan terencana akan menimbulkan persoalan bagi kota. Untuk itu, pemerintah kota harus jeli dalam menangani masalah sektor informal itu. Sehingga, sektor informal dapat tumbuh dengan subur tanpa mengganggu kepentingan umum, terutama tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, N. (2010). Kamus Sosiologi. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashley, D. and Orenstein, D. M. (2005). *Sociological Theory Classical Statements*. Sixth Edition. New York: Pearson Education, Inc.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality*, Garden City, New York: Doubleday (Anchor books).
- BN Marbun.1990. Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek. Jakarta: PT. Erlangga
- Chris Manning dan Tadjoeeddin Noer Effendi. 1985. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Gramedia Jakarta
- Daldjoeni. 1986. Masalah Penduduk Dalam Fakta dan Angka. Penerbit Alumni Bandung
- Dieter Evers, Hans. 1982. Sosiologi Perkotaan Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. Penerbit LP3ES, jakarta
- Gilbert, Alan dan Gugler, Josef: *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, P.T Tiara Wacana Yogya.

- Goldthorpe, J.E. 1992. Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan, dan Pembangunan (Alih bahasa Suhadijo). Jakarta: Gramedia.
- Hauser, Philip, Robert W Gardner. 1985. Penduduk dan Masa Depan Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Hendropuspito, 1989, Sosiologi Sistematis, Yogyakarta : Kanisius.
- Henslin, James.M. 2007. Essentials of Sociology: A Down-To-Earth Approach (Book Alone), 6th Edition. Published by Pearson Education, Inc, Publishing as Allen & Bacon.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 1992. Sosiologi Jilid 2. Di Indonesiakan oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jonhson, D. P. (1994). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lawang, R.M.Z. (1984). Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Leight, D. (1989). Sociology. Fifth Edition. New York: Alfred A Kenopf.
- Narwoko, J. D. dan Suyanto, B. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman, 2007. *Teori Sosiologi Modern* (Terjemahan: Alimandan), Jakarta: Kencana
- Riyanto, G. (2009). Peter L. Berger Perspektif Metateori



ISBN 978-623-6886-27-0



9 786236 686270